Kholil Lur Rochman | Izzah Purwaningsih
Heru Sunoto | Taufiq Akbar

POTRET KEMISKINAN PERKOTAAN

Assesment Psikososial Disfungsi Struktur dan Ironi Budaya di Kampung Dayak Purwokerto

Penulis:
Kholil Lur Rochman, Heru Sunoto,
Izzah Purwaningsih dan Taufiq Akbar

xlvi+118 halaman; 15x23 cm

ISBN: 978-623-7066-47-7

Editor: Ubaidillah, M.A.
Pemeriksa Aksara: Tim Pustaka Ilmu
Perancang Sampul: Atta Huruh
Pewajah Isi: Nur Afandi

Penerbit Pustaka Ilmu
Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan
Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: redaksipintukata@gmail.com
Website: https:// www.pustakailmu.co.id
Layanan sms: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Februari 2019

Penerbit dan Agency
CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan
Yogyakarta Telp/Faks: (0274) 4435538
Email: pustakailmugroup@gmail.com
Website: www.pustakailmu.co.id
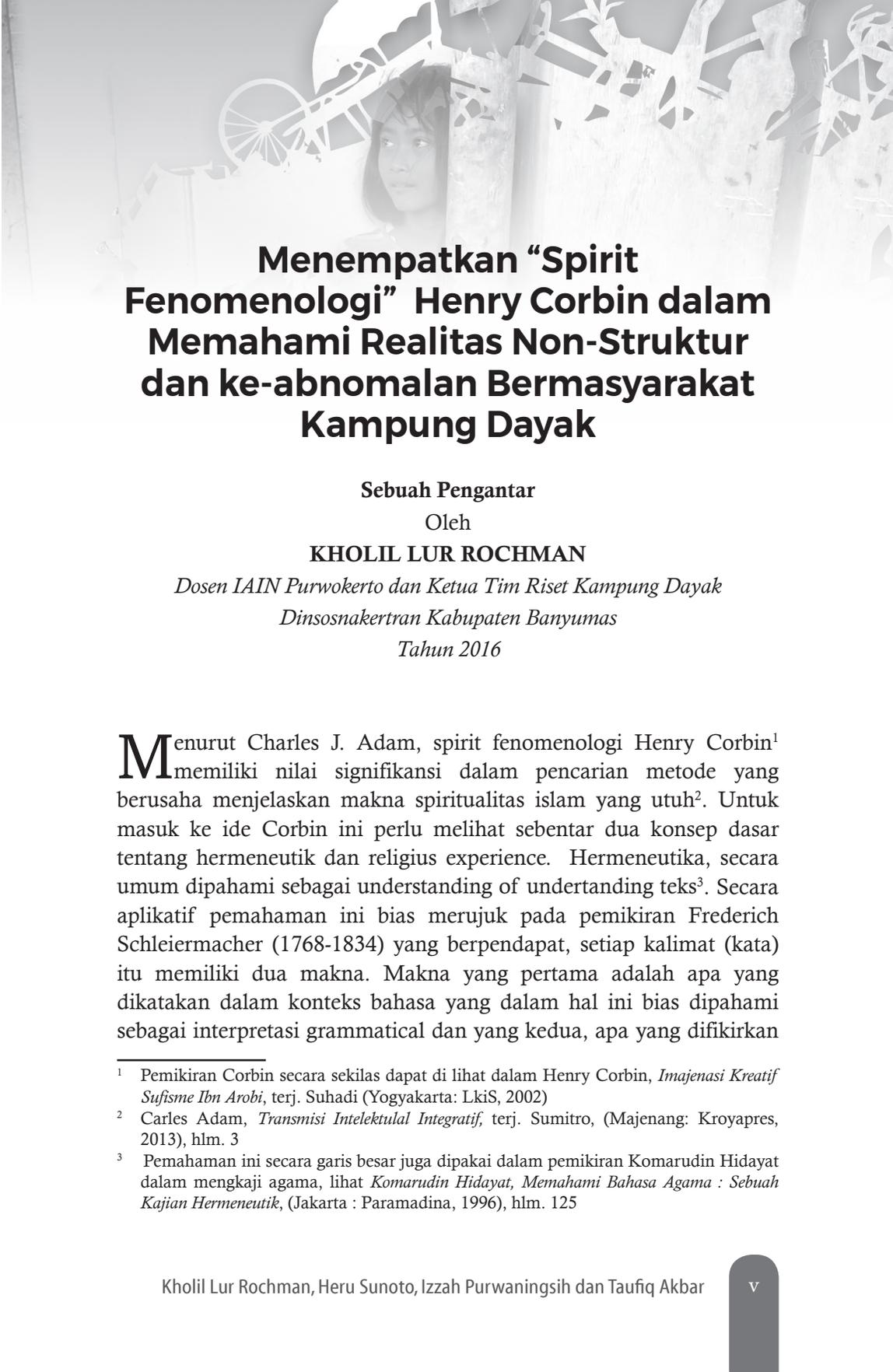
Menempatkan “Spirit Fenomenologi” Henry Corbin dalam Memahami Realitas Non-Struktur dan ke-abnomalan Bermasyarakat Kampung Dayak

Sebuah Pengantar

Oleh

KHOLIL LUR ROCHMAN

Dosen IAIN Purwokerto dan Ketua Tim Riset Kampung Dayak

Dinsosnakertran Kabupaten Banyumas

Tahun 2016

Menurut Charles J. Adam, spirit fenomenologi Henry Corbin[1] memiliki nilai signifikansi dalam pencarian metode yang berusaha menjelaskan makna spiritualitas islam yang utuh[2]. Untuk masuk ke ide Corbin ini perlu melihat sebentar dua konsep dasar tentang hermeneutik dan religius experience. Hermeneutika, secara umum dipahami sebagai understanding of undertanding teks[3]. Secara aplikatif pemahaman ini bias merujuk pada pemikiran Frederich Schleiermacher (1768-1834) yang berpendapat, setiap kalimat (kata) itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah apa yang dikatakan dalam konteks bahasa yang dalam hal ini bias dipahami sebagai interpretasi grammatical dan yang kedua, apa yang difikirkan

---

[1] Pemikiran Corbin secara sekilas dapat di lihat dalam Henry Corbin, *Imajenasi Kreatif Sufisme Ibn Arobi*, terj. Suhadi (Yogyakarta: LkiS, 2002)

[2] Carles Adam, *Transmisi Intelektulal Integratif,* terj. Sumitro, (Majenang: Kroyapres, 2013), hlm. 3

[3] Pemahaman ini secara garis besar juga dipakai dalam pemikiran Komarudin Hidayat dalam mengkaji agama, lihat *Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 125

oleh pembicara (interaksi psikologis). Wilhelm Dithey (1833-1911), memahami hermeneutic sebagai kesinambungan makna secara terus menerus. Menurutnya makna sebuah teks itu tidak pernah berhenti pada suatu masa tetapi selalu berubah menurut modifikasi sejarah. Dalam posisi ini interpretasi memiliki makna yang hampir sama dengan benda cair yang selalu mengikuti bentuk dan terus mengalir dengan menapaki makna-makna masa lampai yang sudah usang sesuai kontrak sejarah. Di sisi lain George Gadamer berpendapat, alam memahami sebuah teks ada dua langkah utama yang perlu ditempuh, pertama : membuang segala pra konsepsi sehingga kita terbuka tentang apa yang dikatakan oleh teks, kedua : pemahaman kita harus mempunyai prastruktur. Ini penting untuk menghindari bias pemaknaan dikarenakan kekurangmampuan menangkap konsep. Jurgen Habermas, memodofikasi social undertanding pada tiga wilayah pendekatan yaitu pendekatan hermeneutic, lingguistik dan fenomenologis. Dalam perspektif ini hermeneutic menjadi varian dan bagian dari pendekatan social. Hal menarik dari pemikiran Habermas ini adalah konsepnya yang mendesain pendekatan fenomenologis berdasarkan pengalaman rutinitas keseharian dari interseubyektifitas dan pengalaman yang berproses dari kesepakatan makna, sedangkan Paul Recover, memaknai hermeneutic sebagai upaya menghilangkan misteri sebuah symbol[4]. Dari deskripsi ini dapat dipahami secara mendasar bahwa hermeneutic setidaknya melibatkan tiga unsur yang saling terkait, yaitu teks, penulis dan realitas. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan untuk mengungkap dan memahami secara detail sebuah obyek. Persoalannya adalah apakah segala sesuatu dapat dijawab dan didekati dengan metode ini. Apakah dapat dan mampu hermeneutic ditarik dalam prespektif religious experience?.

Religious experience[5], seperti dikonsepkan oleh Michaela Ozelsel, merupakan pengalaman spiritual yang tidak bisa dideskripsikan secara sempurna melalui kata-kata dan tulisan bahkan akal sekalipun[6].

---

[4] Diskripsi ini secara lebih detail dapat dilihat dalam, E. Sumaryoto, *Hermeneutik : Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hlm. 68

[5] Untuk diskripsi lebih jauh lihat diantaranya, al Hallaj, *Tawasin : Kitab Kematian*, terj. M. al Fadil, (Yogyakarta : Pustaka Sufi, 2002), Muhammad Zaki Ibrahim, *Tasawuf Salafi : Meluruskan Tasawuf dari Noda-Noda*, terj. Rivai Usman (Jakarta : al Hikmah, 2002), William C. Chittick, *Jalan Cinta Sang Sufi : Ajaran-Ajaran Spiritual Jalaludin Rumi,* terj. Sadat Ismail, (Yogyakarta : Qolam, 2001)

[6] Michaella Ozelsel, *40 Hari Kholwat : Catatan Harian Seorang Psikolog Dalam Pengasingan Diri Sufistik,* terj. Nurudin Hidayat, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2002), hlm. 6

Menurut William James, religious experience ini memiliki empat karakteristik dasar, *pertama* : bersifat *ineffrability* dalam arti tidak dapat dirasakan orang lain dan tidak dapat didiskripsikan dengan kata, *kedua* : *neutic nuality* yaitu berupa *state of feeling* (kondisi perasaan) yang juga *state of knowledge* (kondisi pengetahuan) sehingga tidak dapat di ukur dengan pendekatan inteletualitas, *ketiga : transiency,* maksudnya *religious experience* itu merupakan sebuah kejadian yang amat singkat dan cepat hilang serta tidak berlangsung lama, dan *keempat : passivity*, yaitu bagi pelaku pengalman ini merupakan kehendak pasif dan tidak mungkin ditimbulkan oleh kehendak sendiri[7]. Menurut Muhammad Iqbal, *religious experience* juga memiliki empat karakteristik dasar. Pertama: Validitas pengetahuan tentang Tuhan: manusia memerlukan informasi yang cepat dan akurat mengenai adanya Tuhan yang beku entitas matematis dan sistem konsep. Kedua: Tidak dapat dianalisa : pengalaman mistik adalah pengalaman dimana indra dan rasa melebur tidak dapat dipisahkan dan dibedakan apalagi dianalisis. Ketiga: Obyektif : pada sisi ini pengalaman mistik seseorang adalah penyatuan diri secara sahdu dan mesra dengan tuhan yang tidak dapat disamakan dengan pengalaman yang lain. Keempat: pengalaman mistik dialami langsung dan tidak dapat di komunikasikan. Pengalaman ini lebih berorientasi pikiran dari pada perasaan[8].

Religious experience, menurut al Ghazali bisa terjadi karena peran penting ruh. Ruh atau sesuatu yang bersumber dari hati yang tersebar melalui urat urat yang memancar keseluruh tubuh berfungsi memberi pancaran hidup, penglihatan, pendengaran, perasaan dan penciuman. Ruh juga dapat mengantarkan manusia mengetahui (*al alimah*) dan merasakan (*al mudrikah*) yang ada di luar diri manusia[9]. Dalam hal ini sesungguhnya dapat dikatakan, manusia itu tidak hanya

---

[7] William James, *The varieties of Religious Exsperience* (New York : The New Amirica Library, 1950), hlm. 290

[8] Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religius Thought in Islam,* (Pakistan : SH. M.Asraf, 1971), hlm. 11

[9] al Ghazali, *Misykah al Anwar wa Mishfah al Asrar*, (Beirut : Alam al Kutub, 1986), cet. I, hlm. 100. secara garis besar al Ghazali membagi ruh menjadi lima kategori. Pertama : al ruh al Hasas, ruh yang merespon segala sesuatu yang dapat di rasa oleh panca indra. Kedua : al Ruh al Khayati, ruh yang mampu melukiskan setiap keadaan yang dirasakan oleh panca indra. Ketiga : al Ruh al Aqli, ruh yang mampu mengmbangkan kemampuan akal pikiran. Keempat : al Ruh al Fikri, ruh yang merekonstruksi pengetahuan – pengetahuan yang diperolih akal menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kelima ; al Ruh al Qudsiyah al Nabawiyah, ruh suci kenabian yang mampu membuka tabir ghaib. Ruh ini merupakan ruh khusus yang dimiliki para Nabi dan Auliya.

mampu mencerna alam nyata akan tetapi mampu juga merasakan yang lebih dari itu. Dengan ruh *al qudsiyah al nabawiyah* seseorang mampu melihat yang prediktif. Kemampuan wawasan prediktif ini menurut Javad Nurbackhsy, mampu melihat sesuatu yang tidak dapat diinterpretasikan dan tidak dapat di abstraksikan dengan lidah[10]. Perjalanan spiritual menuju yang tertinggi ini merupakan pengalaman keberagamaan (*religious experience*) seseorang yang bersumber dari ekspresi mistik (*mystical expresion*) yang dalam bahasa William James di sebut dengan kesadaran mistik (*mystical states of consiousness*). Exspresi mistik ini menurut W.T. Stace memiliki inti universal (*universal core*) yang bisa di alami oleh para pengembara. Pengalaman spiritual ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang rasional (*logic of mysticism*)[11]. Persoalannya kemudian adalah apakah bisa hermeneutik seperti yang di deskripsikan di atas diterapkan sebagai metode analisa dalam mengkaji *religious vexperience*?.

Pada posisi seperti inilah pemikiran Corbin ditawarkan. Menurut Corbin[12], hermeneutika yang di dasarkan atas konteks, fakta sejarah

---

[10] Javad Nurbackhsy, *Psikologi Sufi*, terj. Arif Rachmad, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2000, cet. II, hlm. 233

[11] Geoffrey Parrinder, *Mysticism in The Worlds Religions*, (London : The Camelot Press Shothampton, 1976), hlm. 11

[12] Secara garis besar pemikiran Corbin dibangun atas tiga hal, yaitu fisafat, Iran dan Islam Syiah. Tiga pilar ini mempunyai tingkatannya sendiri dengan perhatiaannya pada filsafat sebagai yang paling fundamental dan lainnya menduduki posisi sub ordinat. Corbin sebagai filosof dapat dilihat dari semua yang ia lakukan dalam edisi teks, studi analisis dan kontribusi pada studi filsafat Islam dan mistisisme merupakan bagian terbesar dari pencarian filsafat. Dengan alasan ini perhatiannya pada hermeneutika sangat penting untuk memagami pemikirannya. Corbin juga seorang Iranolog. Ia terlihat dari minatnya pada tradisi filsafat dan mistik kuno yang ia pelajari lewat Syiah. Minatnya pada Syiah adalah sejalan dengan motivasinya yang inging memmpelajari Syiah pada masa pra Islam. Keunggulan dari segala hal yang bersifat Iran dibuktikan dengan banyak cara, salah satunya melalui *magnum opus*-nya "En Islam Irranien". Pembahasan dalam karya ini tidak hanya mencakup Islam semata, tetapi mengedepankan Iran sebagai fenomena Islam. Dalam prolog dan dimanapun ia menyatakan niatnya adalah untuk menggali alam spiritual Iran dan membuatnya dikenal di tempat lain. Bukti dari orientasi ini juga datang dari karya besarnya *Corps Spirituel et Terre Celeste*. Yang lebih penting dari indikasi apapun tentang orientasi Iran adalah keasikannya dengan Sughrawardi yang menjadi awal dan akhir dari seluruh karyanya. Corbin memuji kontribusi utama Sughrawardi dalam menghidupkan kembali hikmah Persia Kuno, filsafat Iran kuno tentang *cahaya* dan *kegelapan,* atau *Teosofi Timur* menurut istilah Corbin. Pilar ketiga dari pemikiran Corbin adalah Syiah. Ia berminat dengan cabang-cabang Syiah besar dan karya-karyanya memuat beberapa kajian pentng tentang para penulis dan karya-karya Ismailiyah. Pusat perhatiannya adalah komunitas Ithna Ashari. Ia memandang Syiah Ithna Ashariyah sebagai esensi Islam.

dan di dominasi fakta social yang konsep umumnya terdiri atas telaah terhadap penulis, teks dan konteks yang merupakan ruang lingkup hermeneutika biasa tidak bisa ditepakan dalam wilayah pengalaman spiritual. Karena hermeneutika biasa ini menurutnya akan terjebak pada matrealisme sejarah Hegel dan Marx yang secara jelas membedakan secara dikotomis mitos dan fakta yang arahnya akan ke demitologisasi. Kalau ini dipaksa diterapkan menurut Corbin merupakan tindakan dosa besar intelektual yang tidak dapat diampuni. Alternatipnya menurut Corbin, pengalaman keagamaan yang dalam bentuk formalnya seperti peristiwa-peristiwa jiwa atau realitas yang tak bersifat fisik dan intelektual yang disebutnya sebagai meta sejarah harus di dekati dengan pendekatan baru yang ia sebut sebagai Fenomenologi Spirit[13]. Untuk memahami fenomenologi spirit, kita harus lari ke pengertian awal tentang fenomenologi, yaitu pendekatan yang memandang, manifestasi budaya dari suatu agama dapat direduksi menjadi esensi pengalaman keagamaan. Untuk itu, manifestasi agama harus dipandang menurut bahasanya sendiri oleh sang peneliti. Hal lain dari pengertian fenomenologi yang menarik adalah peneliti harus

[13] Untuk memahami *Fenomenologi Spirit* Henry Corbin ini harus dipahami dulu Islam dalam pespektipnya. Menurut Corbin hal mendasar dalam realitas spiritual yang disebut Islam adalah fenomena kitab. Islam adalah agama kitab tetapi tidak hanya dalam pengertian bahwa Islam mempunyai kitab suci yang diwahyukan pada Muhammad oleh Tuhan karena al-Qur'an tidak hanya untuk lingkungan masa Arabia abad tujuh. Dalam signifikansinya yang lebih luas, fenomena kitab merupakan petunjuk yang berkesinambungan, kebenaran yang terus hidup yang mempertahankan spiritualitas bagi mereka yang melihatnya. Apa yang penting tentang al-Qur'an tidak hanya apa yang dikatakannya, pengertian harfiahnya dalam bahasa Arab, jika demikian maka al-Qur'an akan menjadi kitab yang mati. Sekarang ini, hanya relevan untuk masa dimana ia turun, dan kepada siapa yang hidup pada masa itu juga. Disamping arti harfiahnya, penting juga memahami makna kitab. Ada banyak kata dalam bahasa Arab dan dataran artinya, tetapi ada juga sesuatu yang lebih, sesuatu yang lain yang dikandung kata-kata itu. Puas dengan arti harfiah sama dengan membuang kulit kacang, menjaganya dan melemparkan bijinya. Kita dapat kesenangan dan nutrisi dari kacang dengan memakan bijinya. Kulit tanpa biji tidak berguna, tetapi biji tidak akan ada tanpa ada yang menutupi dan melindunginya. Jadi keduanya tidak akan dipisahkan. Ini mirip tentang doktrin tentang dhahir dan bathin, artinya al-Qur'an mempunyai arti yang jelas, harfiah, eksternal dan temporal sekaligus makna tersembunyi, spiritual, internal dan transtemporal. Menurut pemahaman Corbin, Islam Sunni dengan perhatiannya pada syariah sebagai model perilaku yang benar pada tahap temporal dan kalam sebagai ekspresi rasional tentang pengalaman keagamaan menyajikan aspek literal kitab, sementara Syiah mencari sesuatu yang mengatasi aspek eksternal dan literal untuk menemukan rahasia terdalam yang tersembunyi. Dengan kata lain, Sunni gagal melakukan apa yang dilakukan Syiah. Dan apa yang dilakukan Syiah adalah mengupayakan hermeneutika kitab.

meninggalkan sementara waktu keyakinan-keyakinan agamanya sendiri agara sampai kepada kebenaran agama lain, sehingga konsep Corbin ini secara garis besar menempatkan seorang peneliti ditempat orang-orang yang dikajinya untuk merasakan pengalaman mereka, mengetahui persepsi mereka, dan mengetahui reaksi spiritual yang biasanya bersifat tertutup dan tak semua orang mampu tetapi hanya orang-orang yang mau. Seperti klaim kebanyakan orang tentang hal yang sama, Corbin merasakan bahwa fenomenologi spirit harus menempatkan dirinya di tempat orang-orang yang dikajinya untuk merasakan pengalaman mereka persepsi dan reaksi mereka dalam menjalankan spiritualitas yang menjadi minatnya. Seorang sarjana harus menjadi tamu dalam alam spiritual orang-orang yang dikajinya dan membuat alam itu menjadi miliknya. Sikapnya merupakan salah satu simpati yang membawa pada identifikasi. Jadi yang penting adalah muatan kesadaran tanpa merujuk pada persoalan konteks, determinasi sosial, atau fakta sejarah. Metode ini adalah fenomenologi sejauh ia melibatkan upaya menghadapi fakta keagamaan dengan membiarkan obyek keagamaan untuk muncul sebagaimana ia muncul di depan siapa dan apapun.[14].

Dalam konteks seperti inilah, tim peneliti memasuki dan memahami Kampung Dayak Purwokerto sebagai intitas yang secara kasat mata masuk dalam wilayah non-struktur dan penuh dengan anomali yang terdasari dan ternikmati tanpa ada beban kehidupan.

Daftar Pustaka

al Ghazali, *Misykah al Anwar wa Mishfah al Asrar*, (Beirut : Alam al Kutub, 1986), cet. I

al Hallaj, *Tawasin : Kitab Kematian*, terj. M. al Fadil, (Yogyakarta : Pustaka Sufi, 2002),

E. Sumaryoto, *Hermeneutik : Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1993)

Geoffrey Parrinder, *Mysticism in The Worlds Religions*, (London : The Camelot Press Shothampton, 1976)

Henry Corbin, *Imajenasi Kreatif Sufisme Ibn Arobi*, terj. Suhadi (Yogyakarta : LkiS, 2002)

---

[14] Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam Dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawi, (Surakarta : UMS Press, 2002), hlm. 188-189

Javad Nurbackhsy, *Psikologi Sufi*, terj. Arif Rachmad, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2000, cet. II

Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadina, 1996)

Michaella Ozelsel, *40 Hari Kholwat : Catatan Harian Seorang Psikolog Dalam Pengasingan Diri Sufistik,* terj. Nurudin Hidayat, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2002)

Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religius Thought in Islam,* (Pakistan : SH. M.Asraf, 1971)

Muhammad Zaki Ibrahim, *Tasawuf Salafi : Meluruskan Tasawuf dari Noda-Noda*, terj. Rivai Usman (Jakarta : al Hikmah, 2002)

Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam Dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawi, (Surakarta : UMS Press, 2002)

William C. Chittick, *Jalan Cinta Sang Sufi : Ajaran-Ajaran Spiritual Jalaludin Rumi,* terj. Sadat Ismail, (Yogyakarta : Qolam, 2001)

William James, *The varieties of Religious Exsperience* (New York : The New Amirica Library, 1950)

Ringkasan Riset Untuk Kadinsosnakertran

ASSESSMENT PSIKOSOSIAL KEMISKINAN:
Guna Membaca Penikmatan atas Kesemprawutan Tata Nilai dan Relasi Bermasyarakat Di Kampung Dayak Purwokerto
Oleh: Tim Peneliti

A. Sejarah Kampung Dayak Purwokerto

Cerita ini dimulai dari tahun 1970 – 1980, saat itu Kampung Dayak masih berupa persawahan. Hanya terdapat lima rumah gu*bug*. Kondisi jalan setapak masih tanah dan batu krikil sehingga apabila hujan keadaan jalan menjadi becek. Periode 1980 – 1990, berdiri sebuah pasar buah kemudian beralih menjadi pasar kambing. Pada masa itu di bangun terminal lama, terminal tersebut merupakan pindahan dari terminal kebon dalem. Jumlah rumah mulai bertambah, dengan kondisi rumah berbahan bilik. Penduduk yang bekerja disekitar terminal lama mulai mengontrak di daerah tersebut. Pada masa ini listrik belum masuk, sehingga untuk penerangan masyarakat menggunakan lampu teplok. Kondisi jalan mulai agak lebar dan berbahan batu padas. Periode 1990 – 2000, mulai berdiri Perum Damri, areal persawahan mulai berkurang. Kampung Dayak pada masa ini seperti perkampungan liar, mulai berdiri rumah-rumah *bedeng*, penduduk yang bekerja di areal terminal lama mulai memadati perkampungan tersebut.. Kondisi jalan sudah mulai lebar dengan berbahan paving blok sehingga pada saat hujan tidak terlalu becek. Pada tahun 1995 listrik sudah mulai masuk ke perkampungan tersebut, sedangkan PAM belum ada pada saat itu.

Kampung Dayak yang berada di tengah kota Purwokerto dengan rumah hampir seluruhnya terbuat dari bilik bambu dan tanah sewa.

Secara geografis Kampung Dayak belum memiliki wilayah, maka masyarakat berinisiatif untuk membuat perkumpulan berupa Pokja RT dengan ikut bergabung dengan RT 02. Secara geografis RT 02 wilayahnya sangat luas, sehingga dilakukan pemekaran. Kampung dayak memisahkan diri menjadi RT 06. Dua tahun setelah pemekaran yaitu tahun 1997, Kampung Dayak (RT 06) pecah menjadi RT 04 dan RT 05 dan berubah menjadi Kampung Sri Rahayu.

Kondisi terminal lama yang semakin ramai serta di ikuti dengan berdirinya perkampungan liar di sekitar terminal lama berdampak pada munculnya berbagai macam permasalahan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, pemulung, waria, pekerja seks komersial, dan pengamen. Untuk mengatasi hal tersebut ada sekelompok masyarakat yang peduli dengan mendirikan Yayasan "Biung Emban". Yayasan tersebut menjadi rumah singgah bagi para pengamen, mereka juga mendidik warga dengan memberikan serangkaian pelatihan dan keterampilan. Tahun 1998 mulai berdiri PAUD di wilayah Kampung Sri Rahayu. Periode 2000 – 2010, Kampung Sri Rahayu mulai dilengkapi fasilitas umum. Kondisi perkampungan mulai padat seiring dengan berkembangnya kota Purwokerto menjadi tujuan utama bagi para pencari kerja di wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Permasalahan sosial pun makin berkembang dengan adanya tempat lokalisasi didaerah tersebut. Periode 2010 – hingga sekarang, terminal lama sudah pindah ke daerah teluk. Taman Andhang Pangrenan mulai berdiri, taman tersebut menjadi fasilitas umum bagi masyarakat Purwokerto untuk kegiatan sehari-hari seperti bersantai, olahraga, dan berkumpulnya para komunitas. Areal persawahan sudah berkurang karena di dominasi dengan munculnya rumah-rumah permanen dan semi permanen. Penduduk mulai memadati rumah-rumah kosan dan kontrakan. Fasilitas umum mulai dibangun lebih baik seperti adanya PAM, MCK umum, Musholah, PAUD, dan tempat billiard. Pada tahun 2010 berdirilah Yayasan Sri Rahayu "Tombo Ati" yang di pimpin oleh Bapak Musafa. Walaupun ada yayasan tersebut ditengah kehidupan masyarakat, namun masyarakat tidak merasakan manfaat yang begitu besar. Pada akhirnya yayasan tersebut tidak berlangsung lama.

.

B. Kondisi Geografis Kampung Sri Rahayu

Kampung Sri Rahayu terletak tepat tengah kota Purwokerto, di belakang Taman Andhang Pangrenan yang dahulunya merupakan Terminal Bus. Kampung tersebut merupakan kampung yang secara administratif adalah legal namun secara geografis bisa disebut tidak legal. Legal administratif karena terbukti memiliki kepengurusan RT dan RW. Tidak legal secara geografis karena kampung dengan 2 RT tersebut tidak memiliki tanah sendiri. Dengan jumlah warga 524 jiwa yang tergabung di dalam 189 KK, hanya ada 20KK yang memiliki tanah dan bangunan sendiri, selebihnya sewa tanah per dua tahun untuk bisa kemudian mendirikan bangunan/rumah tidak permanen. Informan Rs mengatakan: "*Wargane ning kene sing nduwe omah dhewek nduwe lemah dhewek mung 20, liyane ngontrak lemah kabeh"*. Hal ini juga diperkuat oleh Informan CFC, "*Wargane kene ana 400-an jiwa, sing nduwe lemah dhewek karo umah dhewek, mung siji loro, tuan tanah ning kene, liyane nyewa kabeh*".

C. Kondisi Demografis Kampung Sri Rahayu

Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin. Jumlah penduduk Kampung Sri Rahayu (RT 04 dan RT 05) berjumlah 524 jiwa yang terdiri dari 273 orang laki-laki dan 251 orang perempuan. Jika di lihat berdasarkan golongan umur, maka usia antara 11 – 20 tahun menduduki urutan pertama sebesar 21,75 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kampung Sri Rahayu sebagian besar pada usia sekolah dan produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Kategori Umur	Jenis Kelamin		Frekuensi	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 10 tahun	59	30	89	16,98
2	11 – 20 tahun	65	49	114	21,75
3	21 – 30 tahun	31	32	63	12,04

4	31 – 40 tahun	39	43	82	15,64
5	41 – 50 tahun	24	46	70	13,35
6	51 – 60 tahun	32	42	74	14,12
7	>61 tahun	23	9	32	6,12
	Jumlah	273	251	524	100

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan. Pendidikan merupakan bagian indikator yang tidak terpisahkan ketika mengkaji tentang kemiskinan. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor seseorang apakah dapat terserap di pasaran kerja atau tidak. Kampung Sri Rahayu yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang migran, datang ke kota dengan tidak di ikuti oleh bekal ilmu maupun keterampilan yang mumpuni untuk dapat menjalani kehidupan di kota. Hal ini dapat di lihat dari latar belakang pendidikan penduduk Kampung Sri Rahayu yang sebagian besar berlatar pendidikan yang rendah. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.2. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	175	49,45
2	SLTP	93	26,27
3	SLTA	75	21,18
4	Diploma III	1	0,28
5	Sarjana (S1/DIV)	10	2,82
	Jumlah	354	100

Tabel 1.2. menunjukan bahwa tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk Kampung Sri Rahayu sebagian besar adalah tamatan SD, yaitu sebanyak 175 orang atau 49,45%. Selanjutnya di urutan kedua yaitu SLTP sebanyak 93 orang atau 26,27%, dan urutan ketiga yaitu SLTA sebanyak 75 orang atau 21,18%. Sedangkan yang menamatkan ke perguruan tinggi hanya 10 orang atau 2,82%. Adapun penduduk yang belum masuk masa sekolah sebanyak 72 orang. Sebanyak 29 orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan, dan 69 orang lainnya

tidak tamat Sekolah Dasar. Apabila ditinjau secara keseluruhan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan orangtua untuk membiayai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak lebih memilih untuk mengamen dan mengemis di bandingkan harus pergi ke sekolah. Hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mengais rejeki demi bertahan hidup. Pemerintah melalui Program Bantuan Siswa Miskin dan Kartu Indonesia Pintar berupaya untuk menekan angka putus sekolah, namun hal tersebut kurang memberikan efek yang besar terhadap jumlah anak putus sekolah di Kampung Sri Rahayu.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan. Kemunculan Kampung Sri Rahayu tidak terlepas dari keberadaan terminal lama. Keberadaan terminal lama yang kini sudah berganti menjadi Taman Kota Andhang Pangrenan tetap menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat Kampung Sri Rahayu. Mereka yang memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang minim, tidak mampu bersaing di pasaran kerja. Sebagian besar penduduk Kampung Sri Rahayu menggantungkan hidupnya pada aktivitas kehidupan jalanan.. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	2	0,38
2	TNI	1	0,19
3	Guru	2	0,38
4	Wiraswasta	14	2,67
5	Karyawan Swasta	25	4,77
6	Wartawan	1	0,19
7	Aktivis LSM	1	0,19
8	Pedagang	60	11,45
9	Nelayan	1	0,19
10	Petani	1	0,19
11	Buruh	69	13,19
12	Buruh Harian Lepas (BHL)	29	5,56

13	Penyedia Jasa Uang	8	1,52
14	Pemulung	14	2,67
15	Pengemis	42	8,01
16	Pengamen	36	6,87
17	Pekerja Seks Komersial	19	3,62
18	(PSK)	37	7,06
19	Tidak Bekerja (Nganggur)	162	30,9
	Belum Bekerja		
	Jumlah	524	100

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk (13,19%) bekerja sebagai buruh. Di urutan kedua ialah pedagang, penduduk yang berdagang kebanyakan berasal dari warga RT 04. Urutan selanjutnya ialah pengemis (8,01%), pengamen (6,87%), dan pengangguran (7,06%). Warga yang bekerja sebagai pengemis dan pengamen kebanyakan berasal dari RT 05. Mereka setiap harinya menjadi pengemis dan pengamen di pasar, perempatan lampu merah, terminal, bahkan sampai ke luar kota seperti Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap. Menjadi Pengamen dan pengemis merupakan alternatif pekerjaan yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menjadi pengemis dan pengamen dapat diibaratkan seperti penyakit yang menular dan turun temurun di setiap generasinya. Karena untuk menjadi pengemis dan pengamen tidak membutuhkan skill yang tinggi, pekerjaan yang sangat mudah dilakukan oleh siapa saja tanpa membutuhkan modal.

Jumlah Tanggungan Keluarga. Secara keseluruhan jumlah Kepala Keluarga di Kampung Sri Rahayu sebanyak 189 KK yang terdiri dari RT 04 sebanyak 52 KK dan RT 05 sebanyak 127 KK, sisanya terdapat 10 KK yang terdata di kedua RT tersebut. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Memiliki Tanggungan	47 KK	24,87
2	1 – 2	85 KK	44,98
3	3 – 4	36 KK	19,04
4	>5	21 KK	11,11
	Jumlah	189 KK	100

Tabel 1.4. menunjukan bahwa jumlah sebagian besar penduduk memiliki jumlah tanggungan keluarga dengan interval 1-2 sebanyak 85 KK atau 44,98%. Sebanyak 47 KK atau 24,87 % tidak memiliki tanggungan berada di urutan kedua. Mereka yang tidak memiliki tanggungan rata-rata merupakan penduduk pendatang yang bekerja di sekitar Purwokerto, mereka ngekos di daerah Kampung Sri Rahayu. Sebanyak 21 KK yang memiliki tanggungan lebih dari 5 orang, mereka terdiri dari beberapa keluarga dan tinggal dalam satu atap.

Status Rumah. Status kepemilikan rumah menjadi sangat penting apabila mengkaji tentang kemiskinan di sebuah daerah. Kampung Sri Rahayu yang identik dengan perkampungan yang kumuh menjadi sebuah gambaran bahwa suasana di daerah tersebut jauh dari kata nyaman. Kita dapat menemukan pemukiman yang padat dengan bangunan-bangunan semi permanen yang tidak beraturan. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan status kepemilikan rumah dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Status Rumah

No	Status Rumah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Milik Sendiri	42 KK	22,24
2	Kontrak	96 KK	50,79
3	Kost	34 KK	17,98
4	Menumpang	17 KK	8,99
	Jumlah	189 KK	100

Tabel 1.5. menunjukkan bahwa, sebagian besar penduduk Kampung Sri Rahayu tinggal dengan status mengontrak sebanyak 96 KK (50,79%). Ada yang mengontrak tanah dan bangunan, dan ada juga yang mengontrak tanah saja dan membangun rumah sendiri. Status kepemilikan rumah milik sendiri berada di urutan kedua yaitu sebanyak 42 KK atau 22,24%. Mereka yang memiliki rumah maupun tanah sendiri merupakan warga yang memiliki pekerjaan tetap, dan merupakan tuan tanah. Sebanyak 34 KK atau 17,98 % memilih untuk kos, biasanya jumlah tanggungan keluarga relatif sedikit dan kebanyakan para pendatang yang mengadu nasib bekerja di Purwokerto. Sebanyak 17 KK atau 8,99% dengan status menumpang. Biasanya ini dialami oleh keluarga muda yang masih ikut menumpang dengan orangtua, atau ada juga famili lain yang ikut menmpang namun dengan KK terpisah.

D. Kondisi Sosial Ekonomi Kampung Sri Rahayu

a. Karakteristik Ekonomi Secara Umum

Kampung Sri Rahayu memang identik dengan wilayah kemiskinan perkotaan. Sebagian besar warga adalah tunawisma dengan penghasilan yang diperoleh dari jalanan. Mereka kebanyakan tinggal di *gubuk reyot* dengan cara mengontrak dari pemiliknya. Pekerjaan utama ialah pengemis, pencopet, waria, pekerja seks komersial, pengamen, pemulung, dan berbagai profesi yang identik dengan kehidupan jalanan. Namun tidak semua warga bekerja seperti itu, ada juga warga yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, buruh, dan karyawan swasta, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Penghasilan mereka pun beragam mulai dari Rp 100.000/bulan hingga lebih dari Rp 1.000.000/bulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim mengenai gambaran aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga Kampung Sri Rahayu, pada pagi hari warga yang berasal dari kalangan pencopet, pengamen, pemulung, dan pengemis mulai berangkat kerja dan menyebar ke pusat keramaian seperti terminal, pasar, perempatan lampu merah, dan lain-lain. Namun, pada saat menjelang petang seusai Maghrib, giliran para waria dan PSK yang

mengais rezeki di tempat-tempat pangkalan. Pelanggannya kebanyakan juga berasal dari kalangan masyarakat bawah, seperti tukang becak dan tukang ojek.

b. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Kemunculan Kampung Sri Rahayu tidak terlepas dari keberadaan terminal lama. Kota Purwokerto pada saat itu berkembang menjadi kota transit di Jawa Tengah. Aksesibilitas Kota Purwokerto menjadi daya tarik bagi para pelaku urbanisasi. Sebagian besar para migran berasal dari luar daerah berbondong-bondong datang melalui terminal. Sayangnya para pendatang yang tiba di terminal didominasi oleh mereka yang tidak memiliki bekal yang mumpuni untuk hidup di kota. Dengan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, pada akhirnya mereka membuat hunian dan tinggal berkelompok di kawasan terminal. Seiring berjalannya waktu, jumlah migran semakin bertambah, sehingga membentuk sebuah pemukiman yang berkarakter kampung di tengah kota. Keberadaan terminal lama menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat Kampung Sri Rahayu. Mereka yang memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang minim tidak mampu bersaing di pasaran kerja. Masyarakat menggangtungkan hidupnya pada aktivitas terminal lama, sebagian besar bekerja sebagai pengemis, pengamen, waria, dan pekerja seks komersial.

c. Pola Perumahan

Secara umum konsep pemukiman di Kampung Sri Rahayu cenderung tidak beraturan. Kondisi yang tidak teratur dan tidak terurus, jalanan yang sempit dan tidak memiliki halaman. Dihuni oleh banyak penduduk karena adanya urbanisasi yang tak terkendali. Sebagian besar rumah-rumah yang ada di daerah tersebut merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas yang tidak layak, ada yang terbuat dari papan dan bilik beratap seng atau asbes. Sebagian rumah juga sudah ada yang permanen, tembok, beralaskan keramik, dan beratap genting. Kondisi sanitasi yang rendah, hal ini ditandai dengan lingkungan fisik yang jorok, saluran air yang tidak lancar. Kelangkaan air bersih,

walaupun PAM sudah masuk ke kampung tersebut, namun hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.

d. Interaksi Sosial Secara Umum

Problematika sosial yang kompleks membuat Kampung Sri Rahayu ini menjadi unik. Bagaimana tidak, dengan mayoritas penduduk yang berasal dari luar daerah Kabupaten Banyumas serta mata pencaharian seperti pengemis, pengamen, pekerja seks, bahkan mafia dari kelas *'kroco'* hingga kelas *'kakap'* pun dapat ditemukan di kampung ini. Masyarakat pada umumnya lebih mengenal kampung ini dengan Kampung Dayak. Penamaan Kampung Dayak sendiri tidak ada hubungannya dengan suku Dayak yang berasal dari Kalimantan. Melainkan karena stigma masyarakat yang berasumsi bahwa pola hidup 'ndayak' adalah pola hidup yang tidak sistemik, tidak teratur, atau bisa dikatakan kacau, dan seenaknya sendiri. Kehidupan di kampung ini pun bisa dikatakan tidak teratur, mengingat wilayah berada di pemukiman padat dan kumuh mewarnai lokasi Kampung Sri Rahayu. Tidak hanya itu saja, terjerat hutang rentenir menjadi hal yang biasa.

E. Model Dan Teknik Assessment Yang Dipilih

Assessment merupakan satu tahapan dalam proses pemecahan masalah. Secara umum dapat diartikansebagai memutuskan atau menilai sesuatu hal. Hal ini menandakan bahwa di dalam proses asesmen terdapat aktivitas yang didasarkan pada keterampilan tertentu yang berkompeten untuk memutuskan hal-hal menurut nilai-nilai dan standart tertentu untuk melakukan penilaian. Dengan kata lain *assessment* berarti memahami. Ian O'Connor dkk (2006: 81) menyatakan: *"Assessment is the process of coming to understand the nature of interactions between people and social arrangements in order to understand the areas and sources of tension between people and social arrangements. Assessment is undertaken to facilitate purposeful intervention, that is, to aid in the development of strategies and tasks which assist people to develop power and control over their own lives and to form equitable relationships* (*Assessment* adalah proses untuk memahami interaksi di antara orang dan tatanan sosial dalam rangka memahami arena dan sumber-sumber tekanan antara keduanya.

Assessment itu dilakukan untuk memfasilitasi intervensi agar berhasil maksimal, dengan cara membantu pengembangan strategi dan agenda yang bisa membantu orang untuk mengembangkan kekuatan dan kontrol terhadap kehidupannya sendiri dan untuk mencipta hubungan yang berkeadilan)."

Secara teoritis, ada dua model *assessment*, yaitu *assessment* partisipatif dan non-partisipatif. *Assessment* partisipatif terbedakan dari non-partisipatif pada semua tahapannya. Assessment partisipatif melibatkan peran aktif warga pada semua tahapannya secara hakiki, bukan meniadakannya apalagi partisipasi semu. Sebaliknya, *assessment* non-partisipatif tidak melibatkan masyarakat sebagai partisipan, hanya sebagai objek kegiatan, dan keputusan hasil *assessment*-nya juga dilakukan oleh *outsider*.

1. Model.

   Kami melakukan *assessment* dengan menggunakan model yang mengikutsertakan masyarakat, yaitu *Methodology for Participatory Assessment* (MPA). MPA adalah sebuah metodologi untuk melakukan *assessment* secara partisipatif. Metodologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat yang mengalami masalah adalah lebih tahu tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, dan kemampuan apa yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini disebut juga bisa disebut dengan istilah *bottom-up process* atau *change from below* apabila kita meminjam istilah oleh Jim Ife (2002: 119; dan 2009)..

2. Teknik

   Teknik-teknik yang kami gunakan untuk melakukan *assessment* adalah sebagai berikut:

   a. *Community Involvement* atau Berbaur dengan Masyarakat

      Kami berusaha berbaur untuk bisa diterima di semua level masyarakat, dari para tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hal ini kami lakukan dengan cara berkunjung ke lokasi, yaitu di rumah Pak Rujito (Ketua RW 10), Pak Chen Fat Cam (Ketua RT 05), Pak Rasmin (Ketua RT 04), Pak Rasmin (Mantan Ketua RT 04). Kunjungan ini kami lakukan berkali-kali sehingga hubungan yang "cair" dapat terwujud. Kami juga banyak berkomunikasi dengan masyarakat dengan menyambangi berbagai level masyarakat, ngobrol dengan

warga seperti Ibu Daryono (penjual lotek) dan para warga yang kebetulan ada di warungnya; berkunjung ke rumah Syarikun (tukang pijat refleksi) yang termasuk sesepuh warga karena sudah tinggal di Kp. Sri Rahayu sejak tahun 1968; dan dengan warga-warga lainnya dalam kesempatan berbeda.

b. *Studi dokumentasi*

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum profil Kp. Sri Rahayu, kondisi geografis, demografis, permasalahan sosial ekomoni, dan kemiskinan secara kuantitatif. Studi dokumentasi, kami lakukan terhadap dokumen resmi yang ada di pengurus RT.

c. *Observasi*

Observasi digunakan untuk mengetahui tentang kondisi geografis dan demografis serta sosio-kultural masyarakat Kp. Sri Rahayu. Observasi yang kami lakukan adalah proses yang simultan dan terus berjalan selama kegiatan assessment berlangsung (*on going process)*. Observasi juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan kelurahan setempat, selain kami sebagai observer secara langsung kami juga melibatkan masyarakat, baik tokoh-tokoh Kp. Sri Rahayu.

d. *Wealth Clasification atau Wealth Ranking*

Wealth Clasification (klasifikasi kesejahteraan) dilakukan untuk melakukan *assessment* tentang tingkat kesejahteraan warga, kebutuhan, masalah, dan potensi Kp. Sri Rahayu. Hal ini mengacu kepada definisi kebutuhan yang dikemukakan oleh Bradshaw (1972) yang meliputi *Normative Need, Perceived Need, Expressed Need, dan Relative Need* (Peter M. Kettner, 2008). Klasifikasi kesejahteraan adalah teknik mendefinisikan kesejahteraan menurut persepsi masyarakat itu sendiri (*perceived needs*).

e. *Indepth Interview* atau Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau *Indepth Interview* merupakan suatu bentuk teknik wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur, sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Untuk hal ini,

kami melakukan kegiatan wawancara terhadap masyarakat dan pihak terkait. Dari hal ini terketahui berbagai sistem, baik *inisiator system, change agent system, client system, target system, support system, controlling system, host and implementing system, dan action system*.

f. Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focussed Group Discussion*

Diskusi kelompok terfokus atau Focussed Group Discussion (FGD) adalah salah satu *tool* untuk *rapid assessment* atau assessment cepat (Kumar, 1987). yang kami gunakan dalam mengungkap dan memahami potensi dan permasalahan masyarakat Kp. Sri Rahayu, khususnya terkait pemetaan PMKS dan PSKS. Kami melakukan FGD beberapa kali untuk membahas topik berbeda. FGD pertama dengan Ketua RT 05, Bapak Chen Fat Cam dan ke dua dengan Bapak Rasmin (Mantan Ketua RT 04).

g. *Community Meeting* atau Rembug Warga

Community meeting (CM) atau *public meeting* (PM) atau rembug warga merupakan salah satu *tool* dalam melakukan generalisasi terhadap data kualitatif. CM juga merupakan *tool of rapid assessment*. CM/PM dapat digunakan untuk mendapatkan informasi seputar perilaku, pengalaman, opini/pendapat, dan *assessment* dari masyarakat (Kumar, 1987). Kami menggunakan CM beberapa kali. CM pertama membahas topik w*ealth ranking* atau *wealth classification* atau klasifikasi kesejahteraan, historical mapping (memetakan sejarah kampung), dan Logical Framework Analisis (LFA). Hasil dari CM ini kami pertajam melalui berbagai pertemuan informal dengan tokoh masyarakat dan warga dalam *indepth interview.*

F. Proses Assessment

Proses *assessment* yang kami lakukan adalah dengan mengikuti pentahapan profesional pekerjaan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Sosial

Persiapan sosial, secara teoritik sebenarnya bukan bagian dari tahapan *assessment*. Persiapan sosial atau *social preparation* ataupun *social initiation* adalah murni aktivitas kognitif tim yang dimulai

dengan menentukan fokus topik, penentuan lokasi, mereview literatur yang terkait. Namun karena untuk melakukan kegiatan assessment ini diperlukan izin administratif dari pemerintah setempat, maka proses perizinan masuk di dalam tahap persiapan sosial. Hal-hal yang kami dalam persiapan sosial adalah sebagai berikut:

- Diskusi internal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang sama dalam memenej waktu tiga bulan kegiatan assessment dengan mendapatkan hasil maksimal dalam semua tahapan pekerjaan sosial. Diskusi internal juga dimaksudkan agar tim bisa mereview beragam landasan ilmiah yang sesuai terkait dengan lokasi yang kami sedang garap, yaitu Kp. Sri Rahayu. Kegiatan pembekalan dilakukan di kampus IAIN, Purwokerto, di Rumah Ketua Tim, dan di Kafe Warung Inyong.
- Mereview literatur terkait. Dalam kegiatan ini kami membuat kajian ilmiah dengan mencocokkan lokasi yang menjadi fokus assessment psikososial kami, yaitu Kp. Sri Rahayu. Review literatur ini kami susun bersamaan dengan kegiatan assessment di lapangan. Tujuannya agar kami bisa me-*refreshment* setiap temuan lapangan dengan landasan ilmiah dalam berpraktik secara profesional. Hasilnya dari review literatur tersebut didiskusikan di dalam tim agar diperoleh hasil yang paling tepat dan lengkap.
- Mengurus perizinan. Hal ini diawali dengan kami menghubungi Lurah Karang Klesem, Beberapa tokoh Kp. Sri Rahayu, Koramil Purwokerto Selatan, Camat Purwokerto Selatan, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

2. Assessment Awal

Assessment awal dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal kondisi Kp. Sri Rahayu secara keseluruhan, baik aspek geografis, demografis, sosial budaya, potensi, dan kebutuhannya. Tahapan assessment awal, kami laksanakan dengan kegiatan berupa:

- Pertemuan dengan Lurah, Camat, dan Koramil. Caranya adalah kami mendatangi rumah Lurah dan berdiskusi tentang kemasyarakatan Kp. Sri Rahayu; mendatangi markas Koramil Purwokerto Selatan dan mendiskusikan secara

umum keadaan Kp. Sri Rahayu. Demikian juga dengan Camat Purwokerto Selatan.

- Diskusi bersama Tokoh Kampung. mengawali assessment, kami melakukan menemui para tokoh kampung untuk mendapatkan gambaran umum dan agak mendetail tentang potret masyarakat Kp. Sri Rahayu. Tokoh-tokoh tersebut adalah Pak Rujito (Ketua RW 10), Pak Chen Fat Cam (Ketua RT 05), dan Pak Rasmin (EksKetua RT 04).
- Melakukan penelusuran wilayah sekilas atau Snapshoot. Kegiatan ini kami laksanakan di sudut-sudut Kp. Sri Rahayu. Kami masuk lebih dekat dengan setiap tokoh kampung..
- Home visiting ke beberapa tokoh untuk melengkapi potret Kp. Sri Rahayu. Para tokoh tersebut adalah Warsono (Lurah), Pak Rujito (Ketua RW 10), Pak Chen Fat Cam (Ketua RT 05), dan Pak Rasmin (Mantan Ketua RT 04).

3. Assessment Lanjutan
   - Wawancana mendalam dengan tokoh RT 04 dan tokoh RT 05. *Assessment* lanjutan kami lakukan di Kp. Sri Rahayu yaitu di RT yaitu RT 04 dan RT 05, meskipun lebih banyak menyorot RT 04 karena jumlah penduduknya yang lebih banyak (150 KK) dan dalam konsisi miskin. Hal ini tergambarkan dari hasil *assessment* awal, kami menyimpulkan bahwa kondisi masyarakat yang tingkat ekonominya paling rendah untuk kajian kemiskinan adalah di RT 04, sedangkan RT 05 merupakan pemekaran dari RT 02 yang mayoritas warganya (50 KK) adalah dari etnis tionghoa yang tinggal diperumahan yang secara sosial ekonomi lebih mapan. Tahapan *assessment* lanjutan ini kami mendatangi Ketua RW 10, Bapak Rujito, Bapak Rasmin (mantan ketua RT 04) dan Bapak Chen Fat Cam (Ketua RT 05). dan sampling secara acak kepada warga yang kami datangi ke rumahnya.
   - *Community Meeting* atau Rembug Warga. Kami juga melakukan "Rembug Warga" dengan 100 orang warga Kp. Sri Rahayu, yaitu 50 orang dari RT 04 dan 50 orang dari RT 05. Acara dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan, para Pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyumas.

- *Focussed Group Discussion*. Aktivitas berikutnya yang kami lakukan bersama warga Kp. Sri Rahayu adalah *Focussed Group Discussion* (FGD). Diskusi ini membahas tentang *history of community* (sejarah kampung), *wealth clasification* (klasifikasi kesejahteraan), *logical framework analysis*/LFA (cara berfikir logis untuk menyelesaikan permasalahan warga.
- Melakukan *transect walk* atau penelusuran wilayah atau survey kampung sendiri (SKS). Kegiatan ini kami laksanakan di kedua RT tersebut. Kami bersama tokoh kampung masuk lebih dekat ke setiap gang dan saat berjumpa dengan warga langsung mendiskusikan apa yang penting di setiap sudut kampung tersebut.

G. Hasil Assessment

1. Hasil *Assessment* Awal

Kami bersama para tokoh masyarakat setempat melakukan *assessment* partisipatif. Teknik *assessment* yang digunakan adalah: (i) Interview tak terstruktur, (ii) Rembug warga pertama atau c*ommunity meeting*, (iii) *snapshoot*, (iv) *Home visit* ke sejumlah tokoh. Berdasarkan empat langkah dalam mendapatkan data dan dilakukan *assessment* partisipatif, kesimpulan kondisi sosial-ekonomi warga Kp. Sri Rahayu adalah mayoritasnya ekonomi miskin (76%), yang berpenghasilan kurang dari Rp.500.000,.per bulan. Pendidikan mereka rendah, ada yang tidak lulus SD, ada yang lulus SMP, dan SMA. Warga yang sosial-ekonominya baik itu rata-rata tinggal diperumahan, yaitu di RT 5 yang mayoritasnya adalah dari etnis Tionghoa. Adapun yang sosial-ekonominya lebih rendah, rata-rata tinggal di kampung, yaitu RT 04 (150 KK). Namun, seluruh orang-orang yang kami temui dalam langkah *assessment*di RT 04, sepakat menyatakan bahwa daerah yang paling rendah tingkat sosial-ekonominya adalah RT 04. Hal itu dikuatkan dengan penyampaian Lurah Karang Klesem, mantan Ketua RT 04, dan ibu-ibu kampung tersebut. Mereka menyatakan bahwa di Kp. Sri Rahayu, warga yang jumlah miskinnya paling banyak, penerima Raskin dan penerima kartu BPJS adalah warga RT 04.

2. Hasil Assessment Lanjutan

Hasil assessment lanjutan yang kami lakukan bersama masyarakat Kp. Sri Rahayu melalui dua kali rembug warga, *home visit*, interview tidak terstruktur dengan para tokoh Kp. Sri Rahayu, dan *social mapping* (*transect walk* dan *ecomap*).

Tabel 1: Hasil *Wealth clasification* atau *wealth ranking*

No	Kategori	Kaya	Miskin
1	Pendidikan	▪ SMP ▪ SMA ▪ Sarjana	▪ Tidak sekolah ▪ SD ▪ SLTP
2	Rumah	▪ Permanen/Gedong ▪ Rumah kayu bagus	▪ Kayu, jelek ▪ Gedhek, reyot ▪ Numpang orang tua/ keluarga
3	Kepemilikan	▪ Tanah banyak ▪ Punya mobil, motor	▪ Tidak punya kendaraan ▪ Tidak punya rumah ▪ Tidak punya apa-apa ▪ Tidak punya tanah
4	Penghasilan	▪ Tidak pernah kekurangan ▪ > Rp. 3 juta per bulan	▪ < Rp. 500 ribu per bulan ▪ Kerja serabutan ▪ Tidak kerja tetap ▪ Tidak punya modal usaha
5	Pemenuhan pangan	▪ Makan 3 kali sehari ▪ Bisa makan daging lebih dari 1 kali dalam seminggu	▪ Makan sehari 1 kali ▪ Tidak pernah/jarang makan daging ▪ Tidak tau besok bisa makan atau enggak

Berdasarkan tabel di atas, kondisi orang miskin dan orang kaya menurut warga Kp. Sri Rahayu adalah sangat jelas. Persentase warga miskin dibandingkan orang kaya adalah 89% berbanding 11 %. Ini artinya Kp. Sri Rahayu dengan permasalahan sosial ekonomi yang kompleks, mencerminkan sebagai potret kemiskinan kota.

a. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat

- Kemiskinan di Kp. Sri Rahayu, oleh masyarakat, didefinisikan dengan menyebutkan ciri-cirinya, yaitu (i) Penghasilan di bawah Rp. 500.000,- per bulan, (ii) Pekerjaan serabutan, mengemis, BHL, pengamen dan mengojek, (iii) rumahnya dari papan, dinding, dan atap sudah rapuh, (iv) Tidak bisa menabung, (v) Pendidikan rendah, yaitu SD dan SLTP, (vi) Menerima beras Raskin dan Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS Kesehatan).
- Penghasilan mayoritas warga (76%) per bulan kurang dari Rp. 500.000,-
- Mayoritas pekerjaan warga adalah serabutan, mengemis, BHL, pengamen danmengojek;
- Pendidikan warganya adalah mayoritas (78%) sampai dengan jenjang SD dengan perincian 35% tidak tamat SD dan 43% tamat SD, beberapa lulusan SLTP, sedikit SLTA.
- Mayoritas rumah warga (86%) adalah dengan rumah reyot, tembok menggunakan bilik/papan dan tanah bukan milik sendiri, tapi menyewa. Dari semua itu, ada 86% rumahnya tergolong tidak layak huni. Hal ini bisa karena lantainya dari tanah, bilik yang sudah rusak disana-sini, bangunan miring dan atap dari seng; kondisi rumah lembab, dan jika hujan air masuk ke dalam rumah.
- Tidak semua keluarga memiliki rumah sendiri. Rata-rata dalam satu rumah ditempati dua atau tiga keluarga. Hal ini disebabkan anak-anak mereka setelah berkeluarga belum mapan sehingga masih nempel kepada orang tuanya yang dalam hal ini bukan hanya tempat tinngalnya saja yang bergantung pada orang tua namun untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan lainnya keluarga pioner ini juga masih menggantungkan pemenuhan kebutuhannya pada orangtua, sehingga beban tanggungan norang tua secara ekonomi bertambah. Bahkan mayoritas tanah adalah tanah sewa yang dibayar setiap 2 tahun sekali seharga Rp.

1.400.000,-, sedangkan kos-kosan satu kamar rerata Rp.150.000,-.

- Tidak ada kelompok UEP yang bisa mengelola dan mengakomodir beragam usaha warga.
- Kebutuhan akan rumah singgah (26%) menjadi harapan dari remaja dan anak anak yang sebagian besar bekerja sebagai pengamen, asongan dan penganggguran. Keberadaan rumah singgah biyung emban di tahun 1990-an pernah menjadi ruang bersama untuk bertemu bersama-sama menuangkan harapan akan adanya perubahan dan menjadi tempat bernaung bagi mereka yang banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Rumah singgah juga dapat menjadi wahana pendidikan non-formal dan unit hynian sehingga tercipta hubungan yang positif antara penghunu dan lingkungan
- Sebagian besar warga Kp. Sri Rahayu (25%) memerlukan pelatihan ketrampilan untuk dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga tidak lagi mengahabiskan waktu di jalanan atau menganggur.
- Untuk dapat menyalurkan kemampuannya dan (38%) warga memerlukan modal usaha, stimulan modal untuk bersaha dengan berdagang, membuka bengkel dan menambah modal diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan, meningkatkan penghasilan, Namun pemberian modal bagi warga Kp.Sri Rahayu harus kembali dilakukan dengan pendampingan mengingat sebagian besar warga terjerat hutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tanpa pendampingan tidak mustahil modal yang diberikan akan habis untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan atau untuk membayar hutang dan pemenuhan kebutuhan sekunder.
- Pendampingan dan penguatan mental menjadi kebutuhan bagi (11%) warga. Karena 32% masyarakat di KP.Sri Rahayu berpenghasilan tidak tetap dan tidak berpenghasilan merupakan buruh lepas dan pengemis yang setiap hari Jum'at memanfaatkan domain *Jum'at berkah* di Kota Purwokerto. Penghasilan dari mengemis

setiap Jumat inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama satu minggu dan selebihnya mereka berhutang pada rentenir. Kemudahan mendapatkan penghasilan dengan cara cepat tanpa harus lelah membuat warga menjadikan mengemis merupakan pekerjaan yang dianggap "biasa" tanpa harus malu dalam menjalankannya. Pendampingan dan penguatan mental diharapkan mampu merubah pola pikir dari mengemis dan malas sehingga mereka tertarik untuk mencari pekerjaan yang halal.

b. Analisis Kebutuhan

Setelah dilakukan assessment terhadap 100 informan, diperoleh data kebutuhan informan sebagai berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Informan

No.	Kebutuhan	Jumlah	Ket
1	Rumah dan tanah	100	Seluruh informan
2	Modal usaha (UEP)	38	
3	Rumah singgah	26	
4	Pelatihan keterampilan	25	
5	Pendampingan untuk penguatan mental spiritual	11	

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh informan (100%) membutuhkan tempat tinggal yang layak, baik itu berupa tanah dan bangunan. Selanjutnya sebanyak 38 orang membutuhkan modal usaha. Mereka yang membutuhkan modal usaha sebelumnya memang sudah memiliki keterampilan seperti berdagang, salon, perbengkelan, dan lain-lain. Bentuk modal usaha yang diberikan bisa berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sebanyak 26 orang membutuhkan rumah singgah. Mereka menginginkan adanya rumah singgah sebagai sarana untuk menyalurkan hobi, bakat, dan potensi. Selain itu juga rumah singgah dapat dijadikan sarana kegiatan pembelajaran berbasis masyarakat. Informan yang membutuhkan rumah

singgah antara lain pengamen, anak jalanan, dan anak putus sekolah. Sebanyak 25 orang yang membutuhkan pelatihan keterampilan dan juga strategi pemasaran produk. Sebanyak 11 orang yang membutuhkan pendampingan mental dan spiritual, pendampingan ini sangat penting untuk pembentukan karakter manusia yang beradab dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Analisis potensi dan sumber

Analisis potensi dan sumber adalah sangat penting. Dalam hal ini kami menggunakan pendekatan *locality development*. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan *strenght perspective* yang memandang bahwa sistem target memiliki kekuatan dan potensi yang bisa digali dan digunakan dengan optimal maka akan bisa menyelesai masalahnya sendiri.

Jim Ife (2002) menjelaskan terdapat lima prinsip yang harus dihargai oleh pekerja sosial ketika akan memberdayakan masyarakat, yaitu *valuing the local principles, yaitu: (i) local knowledge, (ii) Local culture, (iii) Local resources, (iv) Local skills, and (v) Local process.*Terkait dengan analisis potensi dan sumber, terdapat beberapa pendapat tentang potensi dan sumber. Ada banyak aset di dalam masyarakat, sebagian ahli menyebut tiga jenis aset, sebagian menyebut empat, sebagian lain menyebut lima aset, dan sebagian lagi menyebutnya tujuh jenis aset. Kesemuanya adalah benar dilihat dari perspektifnya masing-masing. Anna Haines menyebut aset komunitas berupa individu, asosiasi, institusi lokal, dan organisasi. Ferguson dan Dicken (1999) menyebut ada lima, yaitu: Fisik, manusia, sosial, politik, dan finansial. Green dan Haines (2007) menyebut ada tujuh aset, yaitu: Fisik, manusia, sosial, politik, finansial, environmental, dan budaya. Reiny, Robinson, Allen, dan Kristy (2003) menyebut ada tiga aset, yaitu manusia, publik/fisik, dan sosial. Aset manusia terdiri atas tiga: Ketrampilan/*skill*, kemampuan/*talents*, dan pengetahuan/*knowledge*; Aset publik/fisik meliputi seluruh sarana infrastruktur fisik, termasuk bangunan sekolah dan pabrik, serta sarana lainnya; aset sosial meliputi: kepercayaan/*trust*, norma/*norm*, dan jejaring sosial/*social networks*. Semua aset di masyarakat ini apabila

diarahkan secara tepat, diberdayakan dan digunakan, maka pada gilirannya akan dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka (*problems and needs*). Kami mencoba untuk menggunakan pendapat dari Reiny, Robinson, Allen, dan Kristy yang kami anggap lebih detail. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

No	Capital/Modal	*Details*/Perincian Modal
1	*Human capital* Modal Manusia	Ketrampilan/*skill*, Kemampuan/*talents*, Pengetahuan/*knowledge*
2	*Public/physical capital* Modal Publik/fisik	Seluruh sarana infra-struktur fisik, termasuk bangunan sekolah dan pabrik, serta sarana lainnya
3	*Social Capital* Modal Sosial	Kepercayaan/*trust*, Norma/*norm*, dan Jejaring sosial/*social network*.

Keterangan: Diadaptasi dari: Reiny, Robinson, Allen, dan Kristy (2003).

1) *Human capital* atau Modal Sumber Daya Manusia

   Modal manusia maksudnya adalah sumber daya manusia yang bermakna pengetahuan dan ketrampilan serta tenaga.

   a) Dari 150 KK di RT 04 dan 50 KK di RT 05, jumlah warga Kp. Sri Rahayu seluruh ibu-ibu berperan sebagai ibu rumah tangga. Ini adalah potensi yang besar untuk menjadi faktor penentu kesejahteraan keluarga; mampu menambah pendapatan keluarga, disamping suaminya yang menjadi tukang ojeg, pemulung, BHL dan serabutan;

   b) Usia produktif warga Kp. Sri Rahayu sebanyak 45 %. Jumlah ini sangat potensial untuk pengembangan UEP untuk beragam usaha dengan bahan baku dan akses yang mudah diperoleh, karena Kp. Sri Rahayu lokasinya tepat di tengah kota;

c) Warga Kp. Sri Rahayu, sekalipun menjadi serabutan, pengemis, pemulung, dan ojeg, namun ada beberapa ketrampilan warga yang sudah bergabung mewujudkan UEP meski masih dikerjakan sekedarnya. Ketrampilan itu adalah membuat criping (kripik pisang/tempe). Hal ini terkuat saat rembug warga dengan ibu-ibu dan pertemuan dengan Ketua RW.

2) *Physical capital* atau Modal Fisik Infrastruktur

Yang dimaksud dengan *physical capital* adalah seluruh sarana infrastruktur fisik, termasuk bangunan sekolah dan sarana lainnya.

a) Jalan akses masuk ke Kp. Sri Rahayu sudah diaspal.
b) Ada satu mushalla yang ada di RT 04.
c) Listrik masuk sejak tahun 1995.
d) Terdapat beberapa warung kelontong yang menjual beragam kebutuhan warga sehari-hari, warung tuak yang diwarung tersebut juga menjual daging biawak, ular dan warung lotek di pojok gang.
e) Tidak ada fasum untuk pemuda/remaja melakukan olah raga di Kp.Sri Rahayu meskipun di Tahun 1990-an terdapat lapangan voley dan sering digunakan oleh remaja, saat ini di Kp.Sri Rahayu terdapat 1 bh meja billyard dan game on line yang menjadi pusat anak muda berkumpul di siang maupun malam hari.

3) *Social capital* atau modal sosial

a) Solidaritas antar warga sangat kuat. Hal ini terlihat pada beragam kegiatan yang melibatkan seluruh elemen warga, warga kompak mengiur, seperti dalam rangka *muharroman,* dengan antusias warga mengiur untuk *nanggap ebek,* yaitu pertunjukan tari dan kuda lumping khas Purwokerto. Warga sangat mudah meminjamkan sepeda motor kepada tetangganya. Hal ini terlihat saat kami berdialog dengan salah satu warga, warga lain hilir-mudik meminjam sepeda motor untuk keperluan pribadi.

b) Di Kp.Sri Rahayu warga masih menghargai peran tokoh seperti Ketua RW, ketua RT, mantan ketua RT, dan sesepuh kampung.

d. Analisis masalah dan sistem sumber

Dalam *strenght prespective*, istilah "masalah atau *problem*" tidak digunakan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun menggunakan istilah tantangan (*challenge).* Hal ini karena *strenght perspective* melihat kepada potensi dan kebutuhan, bukan kepada "masalah" sebagai masalah, sehingga masalah merupakan tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan hasil dua kali rembug warga, interview tak terstruktur kepada para tokoh, Kasus, ketua RW, dan para ketua RT diperoleh informasi tentang tantangan yang ada di Kp. Sri Rahayu adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pendapatan warga;
2. Rendahnya tingkat pendidikan warga;
3. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan warga;
4. Rendahnya semangat kebersamaan/berkelompok;
5. Rendahnya peran serta dalam aktivitas sosial kemasyarakatan;
6. Sulitnya mengakses kebutuhan papan/rumah dan ekonomi.

Dari keenam point tantangan tersebut di atas, kami mengagas bersama warga dua agenda solusi, yaitu agenda utama dan agenda tambahan. Agenda jangka panjang adalah urgensi kebutuhan papan/perumahan yang layak, termasuk di dalamnya penyediaan tanah. Agenda jangka pendek adalah urgensi pendampingan sosial dengan membuka akses pemberdayaan sosial (permodalan UEP).

H. Refleksi

1. Kesan dan perasaan Tim *Assessment* terhadap proses *assessment*

Tahapan *assessment* adalah tahapan yang paling krusial, paling sulit dalam seluruh tahapan pekerjaan sosial. Hal ini karena tahapan ini adalah proses memastikan potensi dan masalah,

tantangan dan peluang bagi 100 warga Kp. Sri Rahayu dan meramunya dengan keinginan atau kebutuhan setiap orang tersebut. Kekeliruan pada hasil *assessment* akan berakibat pada kegagalan rencana intervensi dan intervensi yang berimbas pada rusaknya tatanan masyarakat dalam kondisi ekstremnya. Kami terinspirasi oleh ucapan Mary Richmond (1917:9) bahwa *social diagnosis* atau *social investigation* atau *thegathering of evidance* adalah upaya yang paling sulit dalam mempresentasikan bukti-bukti atau fakta sosial.

Mengandalkan satu teknik dalam menggali informasi untuk kemudian membuat *assessment* adalah kekeliruan. Ibaratnya untuk bisa melihat rumah, tidak boleh hanya dari sisi depan saja, namun harus dari depan, belakang, kanan, kiri, dan masuk ke dalam rumah, maka kita akan bisa menggambarkan dan menyimpulkannya. Oleh karena itu, kami menggunakan beragam teknik, tidak hanya rembug warga, tapi juga interview tidak terstruktur, wawancara mendalam dengan beragam tokoh dan anggota masyarakat. Apalagi, salah satu sifat orang Kp. Sri Rahayu, dan ini adalah sifat umum orang Indonesia, adalah tidak banyak berbicara kalau ada dalam acara formal/dengan orang yang baru mereka kenal. Ketika pertama kali kami masuk di Kp. Sri Rahayu kami merasa ada protektif yang cukup tinggi terhadap lingkungan Kp.Sri Rahayu, dimana apapun gerak-gerik kami selalu menjadi bahan perhatian dan terdapat orang-orang yang secara spesifik memperhatikan dan berusah mendengar percakapan kami. Hal ini terlihati ketika kami melakukan observasi interaksi sosial dan keruangan di sore dan malam hari. Pengawasan terhadap tim seakan dilakukan secara bertahap dimana mereka melakukannya secara bergantian dengan cara yang cukup sistematis dengan bahasa kode yang agak sulit dipahami oleh orang awam. Namun demikian setelah kami malakukan kontak dengan tokoh dan aparat setempat, melakukan kontak dan *smalltalk* dengan beberapa warga kami tidak mengalami kesulitan dan mereka cukup *welcome* dengan kehadiran kami di Kp.Sri Rahayu.

Banyak ide dan *uneg-uneg* yang justru muncul ketika pembicaraan informal. Kami menggunakan rembug warga

menjadi alat legitimasi atas apa yang sudah kami serap melalui *involving* dengan warga. ternyata, apa yang muncul pada acara rembug warga sama dengan apa yang kami serap, bahkan memperkuat kesimpulan kami. Setelah *community involving*, masyarakat kami rasakan ramah kepada kami. Kami tidak kesulitan untuk sekedar kenal dan melakukan *small talk.* Namun, ketika menyangkut masalah data kependudukan dalam rangka *gathering of information*, kami mengalami kesulitan. Kesulitan pertama karena urusan data adanya hanya di Ketua RT 05, sehingga Ketua RT tidak memberikan data kecuali jika ada perintah langsung dari Lurah. Kedua, data meskipun sudah terketik di komputer, namun masih mentah, Kami mendapatkan data dari format word, sehingga harus diubah ke dalam data yang bisa diakses lebih mudah, yaitu di aplikasi excel. oleh karena itu, menjadi tantangan sendiri bagi kami untuk memilah dan mengolah data, serta melakukan triangulasi data ke RT dan warga secara langsung.

2. **Tantangan selama melaksanakan assessment**

   Assessment sosial merupakan rangkain kegiatan menggali dan memahami kondisi sosial suatu tempat. *Assement* sosial memiliki kesamaan dengan diagnosis dokter. Kesamaanya adalah sama-sama untuk menyimpulkan penyebab dan jenis penyakit serta memberikan resepnya. Perbedaanya adalah *assessment* sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan adalah *assessment* partisipatif, sedangkan diagnosis dokter adalah *self-assessment* atau *assessment* mandiri. Maka, tantangan yang dihadapi *assessment* partisipatif lebih kompleks karena melibatkan masyarakatsecara aktif. Tingkat pendidikan masyarakat Kp. Sri Rahayu mayoritasnya adalah SD, bahkan ada peserta yang tidak bisa menulis. Rendahnya tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan keterbatasan dalam memahami bahasa-bahasa pekerjan sosial. Oleh karena itu dalam kegiatan assessment ini, kami berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami oelh masyarakat. Kami berusaha menggunakan bahasa dan cara yang sangat sederhana sehingga masyarakat mampu menangkap

hakikat persoalan yang sedang kita kupas bersama. Kami akhirnya menanyakan setiap kali dialog dengan warga untuk memastikan peserta benar-benar faham apa yang dimaksud sehingga dalam meng-*assess* masalah yang sedang dikupas. Ternyata berkomunikasi dengan masyarakat di *grasroot* itu tidak semudah yang dibayangkan, penggunaan bahasa yang mudah di fahami, *body language* yang kuat dan membaur dalam berpenampilan sehingga partisipasi masyarakat bisa terbangkitkan karena masyarakat tidak merasa berjarak dengan kami.

3. **Peluang, kekuatan, dan solusi dalam proses *assessment***

   Assessment secara kolektif melalui rembug warga, meski format acara dibuat sesantai mungkin dan serileks mungkin, namun peserta yang aktif berbicara selalu itu-itu saja. Mayoritasnya hanya *hear, see and agree* (mendengar, melihat, dan setuju). Sejumlah orang yang aktif itu adalah kami anggap sebagai *key persons* atau tokoh kunci di Kp. Sri Rahayu. Maka, setelah diadakan rembug warga, kami mengambil kesempatan untuk memastikan *assessment* dengan *home visit*. Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar pekerjaan sosial bahwa proses *assessment* adalah *on going process*. Oleh karena itu, selalu ada data baru dalam setiap sesi kegiatan.Tingkat kemudahan atau kesulitan *assessment* bergantung kepada seberapa kental *involving* kita. *Involving* atau berbaurnya tim *assessment* dengan masyarakat adalah penting, sehingga kami benar-benar menyatu dengan masyarakat. Perasaan tidak ada jarak bagi masyarakat adalah modal bagi kami untuk bisa melaksanakan semua tahapan assessment. Tanpa *involving* yang memadai, maka kegiatan apapun yang akan dilaksanakan disana akan merusak tatanan masyarakat yang telah dsepakati disana.

I. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan terdahulu, dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut: Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang paling klasik muncul dan hingga kini masih *up to date* untuk selalu dikaji. Meski namanya kemiskinan, namun setiap zaman

dan tempat ada karakteristik yang berbeda. Dan setiap zaman ada pula model dan pendekatan penanggulangannya yang berbeda pula. Hal ini karena permasalahan spesifik setiap masyarakat dan daerah itu berbeda. Apabila kita menelisik pada kaca mata Sosiologi yaitu struktural-fungsional, kemiskinan muncul sebagai wujud disfungsi struktur. Permasalahan kemiskinan di Kp. Sri Rahayu, Kel. Karang Klesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh adanya disfungsi struktur di masyarakat. Struktur sosial yang ada, dari *Goal-attainment, Adaptation, Integration*, dan *Latency*, kesemuanya bekerja namun mengalami disfungsi sehingga memunculkan potret kemiskinan perkotaan seperti di Kp. Sri Rahayu ini.

Aspek *Goal-attainment* yang berperan meletakkan tujuan-tujuan mulia berdirinya masyarakat, dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kab. Banyumas, telah menjalankan fungsi secara benar, yaitu perencanaan pembangunan yang mengikuti RPJM dan RPJP. Aspek Adaptation, dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Karang Klesem yang berperan mengadaptasikan tujuan-tujuan pembangunan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Kel. Karangklesem, khususnya Kp. Sri Rahayu belum mencerminkan fungsi yang optimal. Hal ini terbukti dengan adanya kampung yang berdiri lebih dari 40 tahun lengkap dengan organisasi RT dan RW namun berdiri di atas lahan perorangan. Dari hal ini memunculkan banyak masalah sosial. Aspek Integration yang diperankan oleh para tokoh kampung, dianggap belum melaksanakan fungsi yang optimal. Hal ini terbukti dari masing-masing tokoh merasa punya kepentingan sendiri-sendiri. Aspek Latency yang diperankan oleh masyarakat umum, yaitu peran menjaga keberlangsungan peradaban. Peran ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan setiap warga berusaha mempertahankan kehidupannya masing-masing dengan apa yang bisa mereka lakukan, tanpa menunggu adanya campur tangan kebijakan/pembangunan.

Melakukan assessment terhadap masyarakat yang "sakit" tidak mudah, apalagi masyarakat tidak menyadari dirinya sakit dan terkesan menikmatinya. Maka, proses assessment yang tepat, agar bisa secara benar memotret masalah dan kendala, tantangan dan peluang, masyarakat harus terlebih dahulu disadarkan. Aktivitas *consciousness raising* (menggugah kesadaran) inilah yang selalu kami lakukan sebelum akhirnya membuat assessment bersama warga Kp. Sri Rahayu. Ada

dua besaran kebutuhan warga (informan), yaitu jangka panjang dan jangka menengah. Kebutuhan jangka panjang adalah kebutuhan akan perumahan beserta tanah/lahan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan seluruh warga yang kami temui. Yang kedua adalah kebutuhan jangka menengah, seperti kebutuhan akan modal usaha, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, pendidikan bagi anak putus sekolah, dan kebutuhan pendampingan biopsikhososialspiritual. Hasil kegiatan assesment ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan pelayanan atau perencanaan intervensi terhadap masyarakat Kp.Sri Rahayu yang yang goalnya adalah implementasi kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan supervisi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Sjafari, 2014. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Graha Ilmu

Al-Ghaziy, Syamsuddin. 2005. *Fath-hul Qarib*. Cetakan pertama. Beirut, Libanon: Daar Ibn Hazm.

Al-Hishniy, Taqiyuddin Abu Bakr Al-Hushainiy. 2001. *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar.* Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Al-Jarullah, Abdullah. 1992. *Masharif Al-Zakah fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cetakan pertama. Riyadh, KSA: Maktabah Al-Ma'arif.

Al-Sa'diy, Abdurrahman. 2002. *Al-Qawa'id Al-Hissan fii Tafsir Al-Qur'an*. Cetakan pertama. Cairo, Mesir: Maktabah Al-Sunnah.

Azariadis, Costas and John Stachurski. 2005. *Poverty Traps* in Handbook of Economic Growth.

Baldock, John, et.al. (editors). 2007. *Social Policy*. 3th ed. New York., USA: Oxford University Press.

Barret, Christopher B. 2005. *the Social Economics of Poverty: on Identities, Comunities, Groups, and Networks*. 1st Published. New York, USA: Roudledge.

Coombs, Philip H. and Manzoor Ahmed. 1980. *Attacking Rural Poverty: How nonformal Education Can Help*, a World Bank Research Publication, 3rd Printing. Baltimore, USA: the John Hopkins Univ. Press.

Coundouel, A. et.al. 2006. *Poverty and Social Impact Analysis of Reforms: Lessons and Examples from Implementation*. Washington DC., USA: World Bank.

Danziger, Sheldon H. and Robert H. Haveman (Ed.). 2001. *Understanding Poverty*. New York, USA: Russel Sage Foundation.

Dasgupta, P. and Ismail Sirajudin. 1999. *Social Capital: A Multifaceted Perpective*, 1st Ed., Washington DC., USA: the World Bank,

Dziedzic, Nancy. 2007. *World Poverty*. MI, USA: Thomson Gale.

Durkheim, Emile. 1957. *Professional Ethics and Civil Morals*. 1st published in English version in 1957, and edited in 1992 and 2003. New York, USA: Routledge.

_______________ 1982. *The Rules of Sociological Method.* 1st American Edition, translated by W.D. Halls. New York, USA: the Freepress.

Edi Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia.* Cet. I, Bandung: Alfabeta.

____________ 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan ke empat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Field, John. 2008.*Social Capital*, 2nd Ed., Canada, USA: Routledge.

Fukuyama, Francis. 1996. الثقة: دورالثقافةوالفضائلالاجتماعيةفيتحقيقالازدهارالاقتصادي (*Trust: the Social Vertues and the Creation of Prosperity*), Jurnal Ilmiah Dunia Arab, *Khulashat*, Cairo, Mesir, Ed. IV, Februari 1996, www.edara.com

Fukuyama,Francis. 2000. *Social Capital and Civil Society*, IMF Working Paper, WP/00/74, April 2000.

Handler, Joel F. and Yeheskel Hasenfeld. 2007. *Blame Welfare: Ignore Poverty and Inequality.* New York, USA: Cambridge University Press.

Häuberer,Julia. 2011. *Social Capital Theory: Towards a Metodological Foudation*, 1st Ed., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Germany.

Houghton, J. and Shahidur R. Kandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality.* Washington DC., USA: World Bank.

Hout, Wil. 2007. EU *Development Policy and Poverty Reduction: Enhancing Effectiveness*. Burlington, USA: Ashgate.

Ife, Jim. 2002.*Community Development: Community-based alternatives in an age of globalization*, 2nd Ed. NSW, Australia: Longman Pearson Education.

______.2008. *Human Right and Social Work: Toward Right-Based Practice*". New York, USA: Cambridge Univercity Press.

______ 2009. *Human Rights from Below: Achieving rights through community development.* 1st Ed. Melbourne, Australia: Cambridge Univ. Press.

Kirst-Ashman, K.K., and G.H. Hull Jr. 2009. *Generalist practice with Organizations and Communities.* 4th Ed. Belmont, CA., USA: Brook/Cole.

Kohl, Richard (Ed). 2003. *Globalisation, Poverty and Inequality*. Paris, France: OECD The Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Kumar,Krishna. 1987.*Conducting Group Interviews in Developing Countries*, Agency for International Development (AID), USA.

Landes, David S. 1998. the Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor. New York, USA: WW. Norton and Company.

Lewis, Oscar. 1966. *The Culture of Poverty*. Diunduh dari www. ignaciodarnaude.com/, 15 Januari 2015.

Lin, Nan. 2001. *a Theory of Social Structure and Action*, Melbourne, Australia: Cambridge University Press.

_______. 2008.*A Network theory of Social Capital*, dalam *Handbook of Social Capital*, Dario Castiglione et.al. (editors), 1st Published, New York, USA: Oxford University Press.

Mayoux, Dr. Linda, Participatory Methods; downloaded at Desember 1st 2014.

Mehrotra, Santosh and Enrique Delamonica. 2007. *Eliminating Human Poverty: Macro ekonomi dan social policies for Equitable Growth*, 1st Ed. New York, USA: CROP Int'l Studies in Poverty Research.

Mingione, Enzo. 1996. Urban Poverty and the Underclass. 1st published, Cambridge, Massachusetts, USA: Blackwell Publishers Inc.

Mukherjee, N., et.al. 2000. *Methodology for Participatory Assessments: with Communities, Institutions, and Policy Makers*, Metguide, IRC.

Narayan, D. and P. Patesch (Ed). 2007. *Moving out of Poverty: Cross-Diciplinary Perspectives on Mobility*. Washington DC., USA: Palgrave MacMillan and World Bank.

Netting, F. E., Kettner, P.M., McMurtry, S.L.2004.*Macro Practice Social Work*, 3rd Ed., USA: Pearson Education.

O'Connor, Ian, et.al. 2006.*Social Work and Social Care Practice*, Australia: Sage Publication.

Ostrom, E. and Ahn, T.K., (eds)., 2003. Critical Writings in Economic Institutions: Foundations of Social Capital (Cheltenham, UK: Edward Elgar(.

Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New Ed. 1st Published 1991. London, England: Roudledge.

______________. 1982. *Talcott Parsons on Institution and Social Evolution*. Chicago, USA: The University of Chicago Press.

Phillips, R. and Pittman, R.H.2009. *An Introduction to Community Development*, Roudledge, 1st Ed., Canada, USA: Routledge.

Putnam, Robert. 2002.*Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*, New York, USA: Oxford University Press.

Rakodi, Carole and Tony Lloyd-Jones (ed), 2002. Urban Livelihoods: A People-centred Approach to Reducing Poverty. USA: Earthscan Publications Ltd

Richmond, Mary. 1917. *Social Diagnosis.* Philadeplhia, USA: Russel Sage Foundation.

Rustanto, Bambang. 2014. *Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*. Cet. I. Bandung: STKS *Press.*

Sach, Jefferey D. 2005. *The End of Poverty: Economic Posibilities for Our Time.* 1st Ed. New York, USA: Penguin Press.

Sajogyo dan Pujiwati (Editor). 1992. *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan.* Cet. ke sepuluh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press-UGM.

Shower, Karen M and Catherine N. Dulmus. 2008. *Comprehensive Handbook of Social Work and Social Welfare: Social Policy and Policy Practice*. Volume 4. New Jersey, Canada: John Wiley and Sons. Inc.

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Walker, Robert (Ed.). 1999. *Ending Child Poverty: Popular welfare for the 21st century*. Great Britain: the Policy Press.

Wang, Ya Ping 2004, Urban Poverty, Housing and Social Change in China, NY, USA: Routledge.

Weiss, John (Editor). 2005. *Poverty Targeting in Asia*. Cheltenham, UK., and Massachussets, USA: Asian Development Bank Institute and Edward Elgar Publishing.

Zastrow, Ch. and Karen K. Kirst-Ashman. 2007. *Understanding of Human Behavior and the Social Environment*, 7th Ed. Belmont, CA., USA: Thomson/Brook-Cole.

Zastrow, Ch. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering people.* 10th Ed. Belmont, USA: Brook/Cole.

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memotret kemiskinan harus dilakukan secara benar. Pemotretan secara keliru dan serampangan atau sambil lalu akan memunculkan gambaran kemiskinan yang juga keliru, kabur, terdistorsi. Pemotretan kemiskinan yang dilakukan secara benar berdimensi ilmiah, sistematis, terstruktur, dan menangkap gambar kemiskinan sesuai aslinya. Ilmiah artinya adalah didasarkan kepada sandaran ilmu yang dikemukakan oleh para ahli di bidangnya, menggunakan referensi akurat, dan bukan asal bunyi. Sistematis artinya satu bagian terkait dengan bagian yang lain, interrelasi dan interdepedensi, seluruhnya berjalan sesuai kaidah dan koridornya. Terstruktur artinya pemotretan dilakukan secara berjenjang, mendengarkan pandangan para pemangku jabatan, dari Kantor desa hingga kantor RT, mendengarkan suara masyarakat dari kalangan Bapak-bapak hingga ibu-ibu. Menangkap gambaran sesuai aslinya artinya potret kemiskinan tidak menurut perspektif pemerintah dan mengabaikan suara masyarakat. Akan tetapi mengakomodir semua suara yang ada dan diambil garis merah sebagai kesimpulan akhir yang merupakan potret kemiskinan bersama.

Potret kemiskinan merupakan hasil *assessment* dalam tahapan profesional pekerjaan sosial. Ia bukan awal atau akhir kegiatan. Tetapi, ia merupakan hasil *social diagnosis* atau *social investigation* kalau meminjam istilah yang dikemukakan oleh Mary Richmond (1917: 9).

Ia merupakan bahan dalam merancang program dan kegiatan solusi bagi masyarakat. Lebih lanjut, Richmond mengatakan bahwa diagnosis sosial merupakan tahapan yang paling sulit karena melibatkan banyak hal yang harus diperhatikan, kedinamisan manusia, beragam faktor yang melingkupinya. Kekeliruan dalam tahapan ini berakibat kekeliruan di dalam memberikan tahapan berikutnya, rencana intervensi. Oleh karena itu, diagnosis sosial harus penuh kehati-hatian, cermat, dan selalu *ongoing process*. Karena assessment yang dibuat tidak tepat atau tidak lengkap, perubahan positif yang diharapkan dari suatu kondisi nampaknya tidak akan terjadi

Istilah Assessment psikososial adalah aktivitas menilai dalam konteks psikologis dan konteks sosial terhadap masyarakat Kp. Sri Rahayu. Assessment mencakup seluruh aspek kehidupan dari sasaran yang akan dinilai sehingga diperoleh berbagai macam komponen baik permasalahan maupun potensi yang ada di Kp. Sri Rrahayu. Dalam kegiatan ini juga akan dapat menghasilkan data pilah antara PMKS dan PSKS yang natinya dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam perencanaan intervensi maupun implemantasi perencanaan program kegiatan. Blythe and Reithoffer (2000) dalam Kirst-Ashman and Hull Jr. (2000: 29 - 32):

> *Assessment is a cornerstone of effective practice. It involves identifying the nature and extent of client needs and concerns, as well as critical information about client resources and supports and other environ-mental factors. The results of assessment activities form the basis for developing, implementing, and modifying [an intervention] . . . plan*. (Assessment adalah tahapan yang penting dalam praktik yang efektif; di dalamnya terkandung proses identifikasi tentang klien beserta kebutuhan dan cita-citanya, juga penting untuk menggali beragam informasi penting yang meliputi sumber-sumber dan dukungan serta faktor lingkungan lainnya. Hasil dari assessment adalah menjadi dasar bagi pengembangan, implementasi, dan rencana pengubahan/intervensi).

Untuk memperoleh assessment yang akurat diperlukan pendalaman terhadap situasi dan kondisi di Kp.Sri Rahayu, baik pada aspek psikologis maupun sosial. Pendekatan yang tepat akan mempermudah tim masuk dan berbaur dengan masyarakat. Mereka

akan percaya dan dengan mudah tim akan mengungkap informasi yang objektif sehingga diperoleh hasil assessment yang sesuai dengan perspektif masyarakat baik definisi, kebutuhan, harapan atau keinginan. Mengingat Kp.Sri Rahayu adalah kampung yang secara histori selalu terkait dengan budaya terminal sehingga kompleksitas persoalan memerlukan assessment yang *up to date* karena sifatnya *ongoing process* dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sistem sumber lainnya yang ada di sekitar Kp.Sri Rahayu yang dinamis.

B. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini adalah *Assessment* psikososial terhadap masyarakat Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Tahun 2016.

C. TUJUAN KEGIATAN

Untuk mengetahui potensi dan masalah masyarakat, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi salah satu bahan bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyumas dalam program pembangunan di daerah tersebut.

D. MANFAAT KEGIATAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum merupakan salah satu bahan pertimbangan penting dalam mengambil kebijakan secara holistik dan terintegrasi antar SKPD dalam menangani kemiskinan perkotaan;
2. Bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Banyumas merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya penanganan 100 orang yang tinggal di Kp.Sri Rahayu;
3. Bagi SKPD terkait dan berbagai *stakeholders* merupakan informasi penting di dalam peran serta aktif mereka menanggulangi kemiskinan dalam berbagai klaster sebagaimana diamanatkan di dalam Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

4. Bagi masyarakat Kp. Sri Rahayu, mendapatkan pengalaman menarik karena aspirasi mereka didengarkan untuk kemudian menjadi saran-saran kebijakan bagi pemerintah Kab. Banyumas.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasarannyaadalah masyarakat kampung Sri Rahayu Kel. Karang Klesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas secara umum di dalam assessment global, dan 100 warga sebagai informan dalam menentukan assessment khusus.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober 2016 (*time schedule* terlampir).

***

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEMISKINAN PERKOTAAN

1. Pengantar tentang Kemiskinan

Definisi kemiskinan, merujuk dari apa yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, menerangkan bahwa kemiskinan dibagi menjadi dua (2) bentuk, pertama kemiskinan relatif, kedua kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20% persen atau 40% lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin.

Dalam prakteknya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan Ravallion. Ravallion memaparkan angka kemiskinan resmi (official figure) pada awal tahun 1990-an mendekati 15% di Ameika Serikat dan juga mendekati 15% di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang,

kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Selain dua terminologi tersebut, masih ada terminologi yang lain terkait dengan kemiskinan. Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Sub Direktorat Analisis Statistik mengatakan ada yang disebut dengan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan strukural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menerbitkan, namun melanggengkan kemiskina di dalam masyarakat. Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang untuk melakukan perubahan ke arah hidup yang lebih baik. kemiskinan karena tradisi sosio kultural terjadi pada suku Badui di Cibeo, Banten Selatan, suku dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi oleh berbagai negara berkembang, akan tetapi, belum membuahkan hasil yang maksimal. Dalam konteks Indonesia, data yang dipaparkan oleh Yoghi Citra Pratama menunjukkan bahwa 14% dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin dengan menggunakan indikator berpendapatan 1$ perhari, artinya masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Yang lebih ironis, apabila kita menggunakan indikator dari bank dunia dimana rakyat miskin adalah orang berpendapatan kurang dari 2% perhari maka angka tersebut melonjak menjadi 35%. Selain data yang dipaparkan oleh bank dunia, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan data kemiskinan di Indonesia periode 2003 hingga 2010. Hasil riset BPS menunjukkan bahwa tahun 2003 kemiskinan di

Indonesia sebanyak 37 juta jiwa, tahun 2004 sebanyak 36 juta jiwa, tahun 2005 berjumlah sekitar 35 juta jiwa, tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 39,3 juta jiwa, tahun 2007 turun menjadi 37,2 juta jiwa, tahun 2008 mengalami penurunan kembali menjadi 35,0 juta jiwa, tahun 2009 sekitar 32,5 juta, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sekitar 31,0 juta jiwa. Jadi, data kemiskina tersebut menunjukka perubahan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2006 kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan hingga 5% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, untuk tahun 2007 hingga 2010 selalu mengalami perubahan penurunan jumlah penduduk yang miskin.

Dengan data tersebut, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya semakin menguat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata, akan tetapi, masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perspektif sejarah, tentu masih terekam dengan jelas fenomena krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997-1998. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu timpang, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mulai terkikis, dan tidak stabilnya dinamika politik, hingga berujung kepada demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada Mei 1998 untuk menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya sebagai seorang presiden merupakan fenomena gunung es. Mengapa demikian? Karena implikasi dari kemiskinan masih sangat luas sehingga perlu waktu, pendekatan, dan strategi yang tepat untuk melakukan perbaikan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana gambaran kemiskianan di Indonesia pasca krisis 1998?.

Pertanyaan ini cukup menarik untuk dijawab sebab setelah rezim represif Soeharto dan Orde Lamanya runtuh lalu diganti dengan Reformasi dengan Demokrasi sebagai ujung tombaknya, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap keadaan perekonomian yang lebih baik, yang sejurus kemudian terjadi stabilitas pada bidang yang lain terutama pendidikan dan kesehatan, sekaligus politik. Untuk menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena kemiskinan pasca krisis, maka penting kiranya untuk memberikan gambaran umum tentang kemiskinan sebelum krisis 1998 dan menjelang krisis. Informasi yang diperoleh dari Rahma Iryanti, Deputi Kemiskinan,

Ketenagakerjaan, dan UKM Kementerian PPN/ Bappenas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebelum krisis 1998 telah berhasil mengurangi kesenjangan. Pada periode menjelang krisis kesenjangan mulai melebar. Meskipun pertumbuhan merata ditingkat ekonomi, ketimpangan wilayah mulai terjadi dengan pertumbuhan di Jawa lebih tinggi dibanding daerah yang lain, sedangkan kemiskinan pasca krisis menunjukkan bahwa ketimpangan cenderung meningkat terutama antar kelompok ekonomi dan antar kota - desa.

Ketimpangan/ kesenjangan tersebut, masih menurut Rahma Iryanti terjadi bukan hanya pada sisi ekonomi, akan tetapi, terjadi pada sisi non-ekonomi juga. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dengan timpangnya pertumbuhan pengeluaran antar kelompok masyarakat. Kesenjangan non-ekonomi ditunjukkan dengan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, dan pelayanan dasar lainnya. Memasuki milenium baru, prosentase kemiskinan di Indonesia sesungguhnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 terkoreksi sebesar 11,25 %, turun 0, 11 % dibandingkan Maret 2013. Namun, penurunan ini diikuti oleh naiknya kesenjangan (GINI Ratio). Berbagai kondisi ekonomi yang terjadi mendorong lambatnya penurunan kemiskinan dan kesenjangan antara lain, lapangan pekerjaan yang terserap tidak seperti yang ditargetkan karena pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,78% dari target 6,3%, tingkat inflasi yang cukup tinggi pada bulan Juli dan Agustus 2013, pendorong kenaikan inflasi akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2013, dan perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan tidak hanya sebatas pada masalah tinggi rendahnya tingkat konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam proses pembangunan. Pendidikan dan kesehatan secara umum bisa menjadi penyebab kemiskinan, namun bisa juga menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif pengentasan, pendidikan dan kesehatan menjadi modal yang utama bagi suatu bangsa untuk mencapai tingkat perekonomian dan kesejahteraan yang baik. Pendidikan yang baik dan berkesinambungan melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni, sedangkan kesehatan menjadi

faktor pendukung utama, agar masyarakat Indonesia memiliki mental yang produktif.

Dengan kenyataan yang sedemikian, perlu kiranya peningkatan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan yang sudah sangat sistemik. Diakui atau tidak selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan baik pada tingkat nasional, regional, maupun daerah umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kurang pendapatan saja. Sangat kelihatan pula diberbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya. Memang, untuk jangka pendek pemberian bantuan ekonomi itu bisa bermanfaat. Akan tetapi, untuk jangka yang panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas, dari konteks kemiskinan kota hingga kemiskinan desa, bahkan seluruh wilayah di Indonesia

Kemiskinan adalah masalah manusia yang paling klasik muncul dan hingga kini masih eksis. Eksistensi kemiskinan bisa langgeng bisa karena kondisi absolut dan bisa pula karena relativitas kebutuhan manusia. Kondisi absolut adalah keadaan manusia yang benar-benar serba kekurangan, tidak mampu memenuhi kebutuhan asasi kehidupan; kondisi relativitas adalah maksudnya keadaan manusia di dalam memenuhi kebutuhan yang sangat dinamis, tidak pernah stagnan. Misalnya, kebutuhan manusia pada era 40-an tidak sama dengan era 2000-an; kemiskinan di kota berbeda dengan kemiskinan di desa, kemiskinan di Negara Barat tidak sama dengan di Negara kita. Contoh relativitas kemiskinan adalah bahwa angka kemiskinan di Amerika Serikat pada tahun 2004 sebesar 15% (Zastrow, 2007) dan kemiskinan di Indonesia pada tahun yang sama juga sebesar 15% (BPS). Meski persentase kemiskinan kedua negara tersebut sama, namun detail kondisinya berbeda.

Beragam buku penulis luar negeri, baik dari Barat maupun Bank Dunia rata-rata hanya menjelaskan kemiskinan dari dua aspek, absolut dan relatif. Sebutlah misalnya: Narayan dan Petesch (Volume I, 2007), Coundouel, Dani, dan Paternostro (2007: 246 - 249), Barret (2005), Landes (1998), Jeffrey D. Sachs (2005), Handler and Hasenfeld (2007),

Weiss (2005), Shower and Dulmus (2008), Dziedzic (2007), Richard Kohl (2003), Walker (1999), Mehrotra and Delamonica (2007), Hout (2007), Houghton and Kandker (2009), Danziger and Haveman (2001). Mereka semua membahas kemiskinan sebagai objek masalah dan kemudian menawarkan beragam solusi penanggulangannya (poverty reduction). Dua aspek ini memahamkan kita tentang kemiskinan dari sisi substansi miskin dan kemiskinan.

Memahami kemiskinan juga bisa dilakukan dengan melihat penyebabnya. Sejauh pengetahuan kami, hanya Oscar Lewis yang menjelaskan kemiskinan dari aspek budaya. Untuk tema ini, Lewis menulis buku *Five Families and The Children of Sanchez* dan menulis jurnal dengan judul *the culture of poverty* pada tahun 1963. Teori Lewis ini kemudian diikutip oleh para pakar belakangan dalam berbagai kajian mereka, semisal Zastrow (2007: 448 - 450).

2. Definisi Kemiskinan

Ada banyak definisi tentang kemiskinan, baik dari lembaga internasional maupun dari para ahli. Definisi-definisi tersebut tidak satu kata karena perbedaan dalam melihat fokusnya, basis sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya, dan tujuan program yang akan diimplementasikannya. Peneliti akan kemukakan di sini, diantaranya adalah sebagai berikut: Ensiklopedia internasional Meriam Webster mendefinisikan "*Poverty is scarcity, dearth, or the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money* (Kemiskinan adalah tidak memiliki apa-apa, atau orang yang tidak memiliki harta benda atau uang)". World Bank (2000) dalam Houghton dan Kandker (2009) menyatakan, "*Poverty ispronounced deprivation in wellbeing* (Kemiskinan adalah istilah untuk kekurangan dalam kesejahteraan).

Narayan dan Petesch (2007: 45 dan 46) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:

> *"Poor" here means lacking most or all of these assets and capabilities: Material assets, Bodily health, Bodily integrity, Emotional integrity, Respect and dignity, Social belonging, Cultural identity, Imagination, information, and education, Organizational capacity, Political representation and accountability (Miskin di sini dimaknai dengan ketiadaan asset/kekayaan dan kemampuan: kekayaan harta, kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial, identitas budaya,*

imajinasi, informasi, dan pendidikan; kemampuan: berorganisasi, dalam ranah politik dan akuntabilitas).

Berdasarkan definisi Narayan di atas, dapat diketahui bahwa orang disebut miskin adalah apabila tidak memiliki beberapa atau seluruh aset dan kapasitas untuk menopang kehidupan, semisal materi, kesehatan, integritas, menghormati dan menghargai orang lain, keterikatan sosial dan budaya, imaginasi, informasi, pendidikan, organisasional, dan diperhitungkan dalam aspek politik.

Houghton dan Kandker (2009) menjelaskan tentang kemiskinan sebagai:

> *Poverty is "pronounced deprivation in well-being." The conventional view links wellbeing primarily to command over commodities, so the poor are those who do not have enough income or consumption to put them above some adequate minimum threshold. This view sees poverty largely in monetary terms. Poverty may also be tied to a specific type of consumption; for example, people could be house poor or food poor or health poor. These dimensions of poverty often can be measured directly, for instance, by measuring mal-nutrition or literacy. The broadest approach to well-being (and poverty) focuses on the capability of the individual to function in society. Poor people often lack key capabilities; they may have inadequate income or education, or be in poor health, or feel powerless, or lack political freedoms (*Kemiskinan adalah istilah yang terkait dengan kesejahteraan. Pandangan konvensional menyatakan bahwa sejahtera pada dasarnya apabila semua kebutuhan hidup terpenuhi; maka orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum secara layak. Pandangan ini melihat kemiskinan dalam koridor keuangan. Kemiskinan juga bisa dilihat pada jenis yang lebih khusus, misalnya konsumsi, misalnya orang yang berhak mendapatkan rumah sederhana, raskin, atau jamkesmas. Dimensi-dimensi tersebut seringkali bisa kita ukur secara langsung dengan mengukur mal-nutrisi (gizi buruk) ataupun buta huruf. Pendekatan lain untuk melihat kesejahteraan (dan kemiskinan) difokuskan pada kemampuan individu dalam fungsi sosialnya. Orang miskin, dalam pendekatan ini, adalah mereka yang seringkali SDM-nya rendah, sehingga pendapatan/pendidikan mereka pun tidak memadai, atau kesehatannya yang buruk dan

merasa tidak berdaya ataupun tidak memiliki kebebasan politik).

Dari pendapat Houghton dan Kandker ini, kemiskinan dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: (i) Perspektif konvensional, (ii) Perspektif garis kemiskinan/*Poverty line*, dan (iii) Perspektif sosial.

Handler dan Hasenfeld (2007) menjelaskan kemiskinan sebagai berikut:

> *There are two different approaches conceptualize poverty. An economic approach narrowly focuses on identifying the income needed to purchase a basket of goods and services that provides a minimum level of material subsistence. This is the approach taken in the United States. In contrast, a social approach considers not only material subsistence but also the ability to participate as full members of society. This is a standard based on a moral imperative that all people should have sufficient resources to develop their capacities and to lead a satisfactory and productive life* (Ada dua pendekatan berbeda dalam melihat konsep kemiskinan: Pendekatan ekonomi yang memfokuskan pada identifikasi pendapatan yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang dan jasa untuk kebutuhan minimal; dan di sisi lain ada Pendekatan Sosial yang terkait dengan tidak hanya pemenuhan aspek materi tapi juga kemampuan untuk bisa berpartisipasi secara optimal sebagai anggota masyarakat. Pendekatan sosial ini didasarkan pada prinsip moral bahwa setiap orang harus bisa memanfaatkan beragam sumber untuk mengembangkan kapasitas mereka dan mendapatkan kepuasan serta kehidupan yang produktif).

Dari penjelasan Handler dan Hasenfeld di atas, dapat difahami bahwa koridor kemiskinan mencakup dua konsep: konvensional dan kekinian; konsep konvensional mengacu pada pertimbangan ekonomi semata, yaitu ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak; dan konsep kekinian, yaitu perspektif sosial, mengacu pada rendahnya SDM dan ketidakberfungsian sosial.

Istilah untuk kemiskinan yang aplikatif di Indonesia adalah fakir dan miskin. Hal ini mengacu kepada UUD 1945, pasal 34 (1): "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir-Miskin. Kami sudah mencoba mencari buku-buku referensi, baik dari penulis Barat maupun lembaga internasional semisal Bank Dunia, namun tidak menemukan

pembahasan tentang fakir dan miskin. Kami menemukan pembahasan fakir dan miskin justeru pada referensi buku-buku ilmiah Islam yang tentu saja berbahasa Arab.

Al-Sa'diy (2002: 39) berkata: "Istilah 'fakir dan miskin' apabila disebutkan sendiri-sendiri maka disamping bermakna fakir juga mengandung makna miskin, namun apabila disebutkan bersamaan 'fakir dan miskin' sebagaimana dalam surat At-Taubah: 60, maka fakir adalah level yang lebih rendah dari miskin". Maksudnya adalah istilah "fakir" mencakup makna fakir sekaligus miskin, dan istilah "miskin" juga mencakup makna miskin sekaligus fakir. Tetapi bila disebut "fakir dan miskin" secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna tersendiri.

Al-Jarullah (1992: 31): "Fakir menurut imam yang tiga: Malik, Syafii, dan Ahmad, adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan halal yang layak untuk memenuhi kebutuhan: pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan asasi lainnya bagi dirinya beserta orang-orang yang ada di dalam tanggungannya; seperti seseorang yang dalam sehari membutuhkan 10 dirham namun hanya memiliki 4 dirham atau kurang. Adapun menurut Abu Hanifah, fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari nishab zakat yang digunakan untuk keperluan hidup keseharian". Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama karena ia berpandangan bahwa fakir lebih tinggi daripada miskin, sementara mayoritas ulama berpandangan bahwa fakir lebih rendah dari miskin.

Al-Ghaziy (2005: 132 – 133) menjelaskan definisi fakir dan miskin adalah sebagai berikut:

فالفقير في الزكاة: هو الذي من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، أما الفقير العرايا هو من لا نقد بيده. والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يحتح إلى عشرة دراهم وعنده سبعة.

Artinya: Fakir, dalam zakat, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Adapun fakir secara absolut adalah orang yang tidak punya uang di tangannya. Adapun miskin adalah orang yang memiliki harta

atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan 10 dirham namun hanya memiliki 7 dirham.

Berdasarkan definisi Imam Al-Ghaziy di atas, orang miskin tergolongkan menjadi dua jenis, yaitu fakir dan miskin. Orang fakir adalah pengangguran yang tentu saja tidak punya penghasilan. Adapun orang miskin adalah orang yang hanya bisa memenuhi 70% kebutuhan hidupnya. Orang fakir adalah orang miskin yang paling dasar, sedangkan orang miskin adalah orang miskin yang mendekati ambang batas *poverty line*. Maka, menurut definisi ini, orang kaya adalah orang yang bisa memenuhi 100% kebutuhan hidupnya.

Al-Hishniy (2001: 277 – 278), mendefinisikan fakir dan miskin sebagai berikut:

الصنف الأول: الفقراء، وحد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقع من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين ... والصنف الثاني: المساكين للأية، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقع من كفايته ولا يكفيه بأن كان مثلا محتاج إلى عشرة وعنده سبعة، وكذالك حتى لو كان تاجرا أو كان معه رأس مال تجارة وهو نصاب جاز له أن يأخذ ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظرا إلى الجنبين. إهـ

Artinya: Yang pertama, Al-Fuqara, jamak dari fakir. Dan batasan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan, atau memiliki harta atau pekerjaan namun hasilnya tidak bisa untuk kebutuhannya, seperti seseorang yang membutuhkan 10 dirham, misalnya, namun hanya memiliki dua dirham… Yang ke dua, Al-Masakin, jamak dari miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak mencukupi, seperti seseorang yang membutuhkan 10 dirham namun hanya memiliki 7 dirham. Yang termasuk kategori orang miskin adalah seorang pedagang atau seseorang yang memiliki modal perdagangan yang mencapai nishab, namun

kebutuhan hidupnya belum tercukupi, maka ia boleh menerima zakat meskipun pada saat yang sama ia harus menunaikan zakat perdagangannya. Hal ini karena ia termasuk ke dalam dua golongan, yaitu golongan miskin yang belum tercukupi kebutuhannya dan golongan pedagang yang *omzet*-nya telah mencapai nishab.

Berdasarkan definisi dari Al-Hishniy di atas, kemiskinan ada dua jenis, yaitu fakir dan miskin. Orang fakir adalah level terbawah dari kemiskinan dan orang miskin adalah pada level ambang batas *poverty line*. Orang fakir hanya memiliki 20% harta untuk seluruh kebutuhan dasarnya, sedangkan orang miskin itu adalah jika memiliki 70% harta untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Menarik juga ditelisik, karena ada orang miskin tapi wajib membayar zakat, di sini, yaitu pedagang yang *omzet*-nya mencapai nishab, maka ia wajib menunaikan zakat meskipun pada saat yang sama ia tergolong miskin. Hal ini karena status miskin adalah satu perkara, sedangkan perdagangan adalah perkara lain pula. Definisi fakir dan miskin di atas juga memilah kemiskinan pada aspek pendapatan, aspek pemenuhan kebutuhan, dan aspek interaksional.

3. Kemiskinan menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2011

Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir-Miskin, pada Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam UU No 13 tahun 2011 di atas adalah (i) kebutuhan pangan, (ii) sandang, (iii) perumahan, (iv) kesehatan, (v) pendidikan, (vi) pekerjaan, dan/atau (vii) pelayanan sosial.

Definisi dari UU No. 13 Tahun 2011 di atas mengakomodir dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif ekonomi dan perspektif sosial. Perspektif ekonomi berupa tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan perspektif sosial berupa tidak punya kemampuan. Perspektif pertama adalah *economic minded*, dan perspektif kedua adalah *human resources minded.*

Definisi fakir-miskin di atas sama persis dengan definisi yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh Islam sebagaimana yang kami sampaikan di atas. Hal ini tidak mengherankan karena definisi yang baik tentang sesuatu sebaiknya sesuai dengan keyakinan warganya, karena mayoritasnya adalah muslim. Oleh karena itu, UUD 1945 pasal 34 (1) dan UU No 13 Tahun 2011 jelas-jelas menyebut dua istilah dalam kemiskinan, yaitu fakir dan miskin.

4. Ciri-ciri Kemiskinan

Edi Suharto (2009: 16) menyebutkan ada sembilan ciri-ciri kemiskinan, yaitu:

a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
b. Tidak mampu berusaha, karena cacat fisik atau mental;
c. Tidak mampu berfungsi sosial;
d. Rendahnya SDM;
e. Rentan terhadap kegoncangan, baik individual maupun massa;
f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan;
g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (kesehatan, dll);
h. Tidak ada jaminan masa depan;
i. Tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak punya harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses di ranah publik, rendahnya pendidikan, dan ketrampilan yang berguna untuk kehidupannya. Kesembilan ciri-ciri kemiskinan tersebut merinci aspek ekonomi dan sosial karena mengacu pada sejumlah definisi yang sudah peneliti paparkan di atas.

5. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sangat beragam, tergantung kondisi demografis, sosiologis, dan geopolitik yang sedang melingkupinya. Coombs dan Ahmed (1980: 10 - 26) menyebutkan bahwa ada tiga faktor kritis kemiskinan pedesaan, yaitu (i) penduduk, (ii) tanah, dan

(iii) kesempatan kerja. Pertambahan penduduk yang tinggi di wilayah pedesaan, penggunaan tanah untuk permukiman yang tidak terkendali, pergeseran fungsi tanah dari pertanian kepada permukiman dan industri, dan rendahnya pendidikan penduduk merupakan tiga faktor penyebab kemiskinan di perdesaan.

Zastrow dan Ashman (2007) menyebutkan secara filosofis delapan hal yang menyebabkan kemiskinan, yaitu:

a. Menganggur
b. Tidak Sehat
c. Masalah emosi
d. Terlibat narkoba
e. Pendidikan rendah
f. Diskriminasi ras dan gender
g. Retardasi mental
h. Salah urus Negara

Houghton dan Kandker (2009: 153) menyebutkan ada empat karakteristik penyebab kemiskinan. Keempat faktor tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.1. Penyebab Kemiskinan (Houghton and Kandker, 2009: 153)

Karakteristik Regional	▪ Terisolasi, terpencil, termasuk di dalamnya buruknya infrastruktur dan tertinggal sehingga tidak mampu mengakses pasar dan pelayanan public ▪ SDA, termasuk di dalamnya kemampuan lahan dan kualitas tanah ▪ Cuaca, termasuk iklim, kondisi lingkungan, frekuensi gempa, dll ▪ Tata kelola wilayah dan ketidakmerataan manajemen.
Karakteristik Komunitas	▪ Infrastruktur (Pipanisasi air bersih, jalan, listrik, dll ▪ Distribusi lahan ▪ Akses terhadap barang dan jasa (pasar, pendidikan, kesehatan, dll) ▪ Struktur sosial dan modal sosial.

Karakteristik Rumah Tangga	▪ Ukuran rumah ▪ Rasio ketergantungan (anggota keluarga yang menganggur, termasuk yang belum berusia kerja) ▪ Jenis kelamin kepala keluarga, termasuk yang berusia dini ▪ Aset (tanah, peralatan, alat produksi, rumah, perhiasan, dll) ▪ Pekerjaan dan income ▪ Kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.
Karakteristik Individu	▪ Usia ▪ Pendidikan ▪ Status pekerjaan ▪ Status kesehatan ▪ Suku

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada banyak penyebab kemiskinan, baik yang sifatnya individual, keluarga, maupun massal, baik faktor internal si miskin maupun faktor eksternal; baik Negara maupun masyarakat. Kesemuanya adalah semisal pertambahan penduduk yang tinggi, pendidikan rendah, kesempatan kerja sempit, menganggur, tidak sehat, emosi yang desdruktif, narkoba, tindak kriminalitas, disabilitas, diskriminasi ras dan gender, kezaliman si kuat kepada si lemah, dan salah urus negara. Semua faktor penyebab ini memunculkan kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

6. Kategori Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari objek kemiskinan dan bisa dilihat dari faktor penyebab. Dilihat dari objeknya, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut *(absolute poverty)* dan kemiskinan relatif *(relative poverty)*.

a. Kemiskinan absolut *(absolute poverty)*

Kemiskinan absolut (Jonathan and Shahidur, 2009: 45; Danziger and Haveman, 2001: 29) adalah standar yang tetap untuk mengukur batasan minimal kemiskinan pada berbagai tempat dan berbagai keadaan. Ukuran standar minimal tersebut biasanya

mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dalam kualitas minimal untuk hidup secara standar.

Menentukan batasan minimum untuk miskin dan tidak miskin adalah kesulitan tersendiri. John Baldock (2007: 125 – 126) menyatakan adalah teramat susah untuk mengukur berapa kemiskinan absolut, karena setiap orang memiliki kebutuhan fisik yang berbeda, beda usia beda kebutuhan. Demikian juga dengan lingkungan kota, desa, negara maju, negara berkembang, dan seterusnya. Contohnya adalah standar dari Bank Dunia. Jonathan dan Shahidur (2009: 45) mengatakan standar yang digunakan oleh Bank Dunia pun berubah-ubah karena mengalami revisi. Dengan standar 1.25 dollar AS per hari, maka ada 1.38 milliar orang miskin di dunia. Namun, apabila standarnya dinaikkan menjadi 2 dollar AS per hari, maka ada 2.09 milliar orang miskin di dunia.

b. Kemiskinan Relatif*(Relative Poverty)*

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan masyarakat dimana warga miskin itu tinggal. John Baldock dkk (2007: 127 – 128) dan Danziger and Haveman (2001: 29) mengatakan bahwa pendekatan ini merupakan penyempurnaan dari pendekatan awal, kemiskinan absolut, yang sulit untuk bisa memotret kemiskinan secara tepat.

Pendekatan ini melihat kemiskinan dari masyarakat tempat orang-orang tinggal dianggap lebih realistis, lebih mendekati kebenaran, dan akurat. Caranya, orang kaya dan orang miskin di wilayah tersebut dibandingkan, dan jurang ketertinggalan antara si Kaya dan si Miskin itulah yang disebut kemiskinan relatif. Dengan penjelasan ini, maka standar kemiskinan yang ada di negara-negara kaya pasti lebih tinggi daripada di negara-negara miskin. Amerika Serikat (AS) memiliki 15% kemiskinan pada tahun 1990-an (Zastrow and Ashman: 2007: 344) dan Indonesia (BPS) pun memiliki jumlah kemiskinan 15% pada tahun yang sama, namun indeks kemiskinan kedua negara tentu berbeda.

Dilihat dari sumber penyebabnya, ada kemiskinan struktural dan ada kemiskinan budaya.

a. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang penyebabnya adalah struktur yang merugikan, baik struktur sosial,

pemerintahan, maupun kemasyarakatan. Edi Suharto (2010: 135) menyatakan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal (di luar kemampuan individu miskin), seperti birokrasi atau peraturan resmi yang menghambat dalam pemanfaatan sumber daya, dan "ketidakmampuan" sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan bagi si miskin. Zastrow dan Ashman (2007: 448) menyebutkan ada delapan penyebab kemiskinan, dua diantaranya adalah (i) diskriminasi ras dan jenis kelamin dan (ii) salah urus negara (mis-management resources). Berbagai sumber atau potensi karena salah urus akhirnya masyarakat menderita kemiskinan. Dua hal ini yang menyebabkan munculnya kemiskinan struktural: masyarakat tidak mampu menembus sekat-sekat aturan dan kepentingan yang mencengkeram mereka, sehingga terhalang dari pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Kemiskinan kultural *(the culture of poverty)*.

Teori tentang budaya miskin *(the culture of poverty)* pertama kali dikemukakan oleh Oscar Lewis. Lewis (1966) menjelaskan bahwa kemiskinan akibat budaya miskin adalah bukan semata-mata karena tidak berfungsinya sistem atau struktur, melainkan ada hal yang hilang, yaitu budaya. Budaya miskin adalah budaya yang menjadikan kehidupan terus-menerus dalam kemiskinan, seperti kebiasaan buruk, konsumtif, tindak criminal, malas, tidak menghargai waktu dan kesempatan, dll. Zastrow dan Ashman (2007: 448) menyatakan kemiskinan kultural atau budaya miskin adalah kemiskinan yang terjadi akibat dari berlakunya sistem kapitalisme. Munculnya budaya miskin disebabkan oleh dua sifat buruk kapitalisme, yaitu banyaknya pengangguran akibat penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi tanpa karena madzhab kapitalisme adalah *cost-benefit analysis*, yaitu dengan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, pertama. Kedua, Upah buruh yang rendah karena madzhab *cost-benefit analysis* yang mengedepankan material dan meremehkan analisis pada aspek sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat difahami bahwa kemiskinan tidak *ujug-ujug* muncul. Tidak demikian. Kemiskinan bisa muncul karena disfungsi struktur/sistem ataupun karena budaya yang memiskinkan.

7. Ukuran Kemiskinan

Tidak ada satu cara yang disepakati untuk mengukur kemiskinan. Para pakar sosial menyampaikan satu jenis alat ukur kemiskinan disesuaikan dengan tujuan tertentu dan korelasinya dengan situasi sosial yang ada. Menggunakan satu alat ukur saja akan menjadikan bias dalam memotret kemiskinan. Danziger and Haveman (2001: 31 – 34) mengatakan:

> *Poverty is a multidimensional concept and should reflect several aspects of personal well-being. Forms of deprivation other than economic hardship are certainly relevant to policy-making. Even restricting consideration to economic poverty, measures other than annual income might be used to estimate household resources. In this section, we examine five alternative conceptions of poverty or deprivation: wealth-based poverty measures; consumption-based measures (including specific types of consumption such as housing and health care); measures of earnings capacity; social indicators of deprivation or affluence; and long-run poverty measures* (Kemiskinan adalah sebuah konsep yang multidimensi dan mencerminkan sejumlah aspek kesejahteraan orang. Miskin dalam wujud kekurangan selain aspek ekonomi tentu sangat cocok dengan pembuatan kebijakan. Bahkan membatasi pertimbangan kemiskinan ekonomi, langkah-langkah lain selain pendapatan tahunan dapat digunakan untuk memperkirakan sumber daya rumah tangga. Pada bagian ini, kita akan mengkaji lima konsepsi alternatif untuk mengukur kemiskinan: ukuran kemiskinan berbasis kekayaan; langkah-langkah berbasis konsumsi; ukuran besaran penghasilan; indikator sosial tentang kekurangan atau kemakmuran; dan rentang waktu lama dalam mengukur kemiskinan).

a. *Wealth-based proverty measures*

Ukuran kemiskinan berdasarkan kesejahteraan. Zilliak (1999) dalam Danziger and Haveman (2001: 31 – 34) menyatakan bahwa mayoritas orang miskin, tapi tidak seluruhnya, orang miskin dengan pendapatan yang minim memiliki sedikit kesejahteraan. Komponen *wealth-based* untuk kemiskinan termasuk di dalamnya adalah keuntungan/laba saat ini, sewa, deviden, kerugian dagang.

b. *Consumption-based measures*

Ukuran kemiskinan berdasarkan konsumsi, termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis konsumsi seperti perumahan dan layanan kesehatan. Danziger and Haveman (2001: 32) menyatakan rumah tangga dengan pendapatan yang tidak menentu atau tidak tetap (fluctuating income), maka pendapatan tahunan yang demikian bisa menjadi sebab kemiskinan yang permanen. Namun, cara ini juga mendapat kritikan. Hal ini karena biaya untuk rumah dan perawatannya adalah hal yang sangat sulit untuk diukur.

Layanan kesehatan adalah salah satu jenis konsumsi. Layanan kesehatan dalam beragam kelas, biaya, dan levelnya bisa menjadi implikasi bagi ukuran kesejahteraan manusia. Hal ini karena kebutuhan akan layanan kesehatan adalah sangat alami. Maka, layanan kesehatan dasar (health care neccessities) atau standar dengan layanan kesehatan kelas mewah (health care luxuries) yang diterima oleh orang bisa menunjukkan tingkatan kesejahteraan manusia.

Danziger dan Haveman (2001: 33) menyatakan bahwa sejumlah peneliti awal memasukkan nilai subsidi jaminan kesehatan ke dalam komponen pendapatan tunai/cash atau non-tunai untuk memperkirakan total sumber pendapatan keluarga (Smeeding 1977, 1982; U.S. Bureau of Census 1996). Prosedur ini tujuan besarnya adalah untuk mengurangi populasi penduduk miskin, semisal lansia yang memiliki dua jenis jaminan kesehatan (subsidi dan non-subsidi pemerintah). Artinya, jika satu rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan, maka ketika ada anggotanya yang sakit, biaya yang seharusnya dapat ditabung atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, akhirnya digunakan untuk biasa kesehatannya. Hal inilah yang menjadi garis merah penyebutan kemiskinannya (Smeeding 1977, 1982).

c. *Measures of earnings capacity*

Ukuran kemiskinan berdasarkan besaran penghasilan. Seseorang yang membiayai dirinya sendiri atau menanggung beberapa orang, bisa menjadi alat ukur kemiskinan. Model pengukuran ini adalah bahwa memiliki kemampuan untuk menjaga pendapatan yang cukup adalah ukuran yang sebenarnya tentang adanya partisipasi dalam masyarakat. Ukuran ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang menanggung biaya sejumlah orang atau

sejumlah keluarga, karena masyarakatnya menganut *extended family*, menjadi indikator tentang level kesejahteraan atau kemiskinannya.

d. *Social indicators of deprivation or affluence*

Indikator sosial tentang kemakmuran. Indikator ini merupakan indikator pelengkap bukan sebagai pengganti indikator yang lain. Gambarannya adalah bahwa ada orang-orang yang lebih mendahulukan membeli seperangkat tv, kulkas, mobil, dll daripada membeli rumah atau kontrak rumah dengan harga mahal. Ada juga orang-orang yang tidak bisa membayar sewa rumah atau kamar bukan karena tidak punya uang, namun karena uangnya habis untuk gaya hidupnya yang tinggi. Di sisi lain, ada orang-orang yang meski dengan kekayaan melimpah, namun sengaja memiliki rumah yang jelek atau menyewa rumah sederhana. Orang-orang model demikian akan masuk dalam golongan garis kemiskinan, apabila menggunakan standar konvensional tentang kemiskinan. Namun, bila ditilik menurut indikator sosial, mereka tidak bisa digolongkan ke dalam garis kemiskinan.

e. *Long-run poverty measures*

Ukuran kemiskinan menggunakan rentang waktu yang panjang. Mengukur gejala kemiskinan bisa dalam ukuran bulanan, setahun, ataupun beberapa tahun. Memahami pendapatan keluarga dalam ukuran waktu yang pendek, sebulan misalnya, akan memberi gambaran bahwa kemiskinan cenderung tinggi. Namun, apabila menggunakan rentang waktu satu tahun atau lima tahun, maka kemiskinan bisa dinilai secara lebih komprehensif dari beragam faktor penyebabnya, sehingga cenderung menghasilkan angka kemiskinan itu menurun atau kecil.

Sementara itu, Houghton dan Kandker (2009: 22 - 35) menyatakan bahwa mengukur kemiskinan artinya mengukur kesejahteraan. Seberapa sejahteranya manusia itu identik dengan miskin atau tidaknya manusia. Kesejahteraan bisa diukur dengan dua hal, yaitu (i) income, dan (ii) konsumsi.

a. *Income*

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga adalah dengan mengukur *income*-nya. *Income* adalah rumusnya besaran pengeluaran ditambah kekayaan bersih. Contoh: Sebuah keluarga

memiliki tabungan di awal tahun sebesar $ 10.000, konsumsi selama satu tahun sebesar $ 3.000, dan di akhir tahun tabungan menjadi $ 11.000. Artinya income keluarga tersebut adalah $ 4.000, sebab konsumsi $ 3.000, dan kekayaan bersih setahun $ 1.000.

Model pengukuran kesejahteraan dengan income sangat sulit pengukurannya. Hal ini karena: (i) konsumsi setiap keluarga berbeda dan cenderung meningkat setiap saat, (ii) model ini hanya bisa diterapkan pada keluarga yang kekayaannya murni dari gaji. Model ini akan sulit digunakan pada keluarga yang penghasilannya dari pertanian atau pemilik kontrakan rumah, dll.

b. Konsumsi

Model kedua untuk mengukur kesejahteraan adalah dengan konsumsi. Konsumsi meliputi barang dan jasa atau layanan publik dasar yang dibutuhkan, semisal sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

c. Model Pengukuran Lain

Sesempurna apapun pengukuran kesejahteraan dengan model *income* atau konsumsi, namun ada model lain yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia. Model lain itu adalah:

1) Kalori per orang per hari

   Batasan minimal untuk orang hidup dengan sejahtera adalah konsumsi kalori sebanyak 2.100 per orang per hari. Jumlah kalori ini adalah rata-rata untuk seluruh usia dan berbagai aktivitas. Artinya apabila seseorang dalam sehari-harinya mengkonsumsi makanan dan minuman 2.100 kalori, maka ia dikatakan sejahtera. Sebaliknya, jika kurang dari itu, maka dikatakan belum sejahtera atau miskin.

2) Persentase pengeluaran makanan

   Maksud dari pengukuran ini adalah seberapa besar persentase penghasilan yang digunakan untuk konsumsi, menunjukkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Batasan minimalnya adalah apabila sampai 60% pemanfaatan penghasilan untuk kebutuhan makanan, maka keluarga tersebut dikatakan miskin.

3) Mengukur *outcome* dibandingkan *input*

Apa yang kita konsumsi, itu adalah input, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh adalah *output*, maka seseorang bisa diukur miskin tidaknya pada malnutrisinya. Malnutrisi atau tidak, itu adalah *outcome*. Jika seseorang mengalami malnutrisi, maka bisa disebut miskin. Sebaliknya, jika tidak mengalami, maka tidak disebut miskin.

4) Pengamatan dari observer

Model ini adalah dengan cara pengamat atau observer mengamati dan melakukan survey kepada masyarakat. Jawaban dan apa yang ditangkap dari masyarakat tentang kemiskinan atau tidak, disimpulkan oleh pengamat menjadi miskin atau tidak. Pengamatan akan mudah apabila di masyarakat tersebut banyak anggota masyarakat yang menerima beragam program anti kemiskinan dari pemerintah, semisal jaminan kesehatan, bantuan perumahan, bantuan logistik, dll. Namun, model ini memiliki kelemahan. Kelemahan terbesarnya adalah kesimpulan ditetapkan oleh observer dengan mengandalkan informasi yang tidak lengkap saat survey.

Berdasarkan banyak model pengukuran kemiskinan yang sudah kami paparkan di atas, kami melihat semua model tidak ada yang sempurna, semua model juga memiliki kelemahan. Seorang peneliti bisa memilih salah satu atau beberapa model untuk mengukur kemiskinan. Hal ini sangat tergantung pada kebutuhan situasi yang dihadapinya. Danziger dan Haveman (2001: 36) mengatakan, "Semua ukuran kemiskinan memiliki kelebihan, keterbatasan, dan penggunaannya sangat tergantung pada perbedaan kebijakan yang akan digunakan".

8. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau *poverty line* adalah standar untuk menentukan kemiskinan. Orang miskin adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Houghton dan Kandker (2009: 41) mengatakan:

> *The poverty line may be thought of as the minimum expenditure required by an individual to fulfill his or her basic food and nonfood needs* (Garis

kemiskinan bisa dijelaskan sebagai pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan asasi, baik pangan atau non-pangan).

Apabila ada individu atau keluarga yang pengeluaran kebutuhan asasinya, baik untuk pangan maupun non-pangan, berada di bawah garis kemiskinan, maka ia dikategorikan miskin.

a. Garis Kemiskinan Dunia

   Sebagaimana dikutip oleh Houghton dan Kandker (2009: 44 – 45), Bank Dunia membuat standar internasional untuk hal ini, yaitu dengan standar garis kemiskinan absolut (absolute poverty line). Absolute Poverty Line digunakan oleh Bank Dunia untuk melakukan komparasi kemiskinan antar negara di dunia. Pada tahun 2005, Bank Dunia menetapkan US$ 1 – 2 dollar per orang per hari. Apabila US$ 1,25 maka ada 1,39 milliar penduduk dunia yang miskin, sedangkan apabila menggunakan patokan US$ 2, maka ada 2,09 milliar penduduk dunia yang miskin. Indonesia, masih pada tahun 2005, penduduk miskin yang hidup di bawah US$ 1 per orang per hari, ada 24% penduduk desa dan 19% penduduk kota (Houghton and Kandker, 2009: 46).

b. Garis Kemiskinan BPS

   Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

   Garis kemiskinan Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel:Garis Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)	Jumlah Orang Miskin	%
Sept' 2011	217.400	5.317.390	16,20
Sept' 2012	233.769	4.952.060	14,98
Sept' 2013	261.881	4.811.340	14,44
Sept' 2014	281.570	4.561.830	13,58
Sept' 2015	309.314	4.505.780	13,32
Maret 2016	317.348	4.506.890	13,27

Sumber: http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1369; diunduh pada 16/9/2016.

9. Sebab-sebab Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan perkotaan adalah permasalahan tersendiri yang dialami oleh kota-kota dimanapun berada. Kota dengan industri dan layanan jasanya disamping menggerakkan ekonomi secara besar, juga melahirkan dampak buruk, yaitu kemiskinan. Orang miskin kota menjadi miskin di tengah-tengah gemerlapnya kota. Kemiskinan perkotaan muncul sebagai efek dari pembangunan. Pembangunan disamping menghasilkan kemajuan peradaban dan kesejahteraan, juga memunculkan efek kemiskinan. Agus Sjafari (2014:18) mengatakan:

"Masalah kemiskinan kota disebabkan kedudukan kota-kota dalam masyarakat. Negara tersusun dalam jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan atau pendominasian bagi pengaturan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat negara. Sistem pendominasian yang berpusat di kota-kota, bukan hanya melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, komunikasi dan kebudayaan, namun dalam kenyataan sosial, yang ada dalam masyarakat maupun di dunia. Manusia cenderung untuk berorientasi ke kota atau dengan kata lain, bahwa orang desa yang berorientasi ke kota dan bukan orang kota yang berorientasi ke desa".

Hal senada dikemukakan oleh Ya Ping Wang (2004: 86), "*Rural to urban migration has been a major feature of urbanisation in most developing countries since World War II* (Migrasi dari desa ke kota telah menjadi

mayoritas pemandangan urbanisasi di mayoritas negara-negara berkembang pasca perang dunia II)". Lebih lanjut, Wang mengatakan bahwa dengan keterbatasan lapangan kerja di kota namun serbuan urbanisasi yang tidak terkendali, memunculkan orang-orang yang tidak terserap oleh pasar kerja. Hal ini akhirnya melahirkan kemiskinan di tengah kota.

Berdasarkan penjelasan Agus Sjafari dan Ya Ping Wang di atas dapat difahami bahwa tabiat manusia yang berorientasi ke kota menyebabkan kota menjadi pusat perhatian. Hal ini dalam berbagai SDM yang berbeda melahirkan disamping kemajuan pada satu aspek juga memunculkan kemiskinan bagi mereka yang SDM-nya rendah dan tidak terserap oleh bursa kerja.

Selain urbanisasi, penyebab kemiskinan adalah globalisasil Carold Rakodi (2002:24) menyatakan:

> *Globalization, however, is bringing not only economic growth and reduced poverty, but also economic decline, increased inequality and impoverishment* (Globalisasi bagaimanapun juga tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, namun ternyata penurunan ekonomi, meningkatnya ketimpangan dan pemiskinan).

Rakodi lebih lanjut menjelaskan bahwa urbanisasi di berbagai kota di dunia disamping mendorong pertumbuhan ekonomi juga mencetuskan kemiskinan baru yang dialami para pendatang di kota.

Bank Dunia (1999:9) dalam Rakodi (2002: 29) menyatakan:

> *The urban poor were faced with a price-income squeeze, as the effects of unemployment and downward pressure on wages were compounded by the marketisation of public goods* (Orang miskin kota dihadapkan pada tidak seimbangnya harga dengan pendapatan, sebagai efek dari pengangguran, ancaman penurunan upah yang diperparah oleh komersialisasi seluruh barang-barang publik).

Berdasarkan penjelasan Bank Dunia di atas, dapat kami simpulkan bahwa munculnya kemiskinan perkotaan karena daya beli yang rendah. Daya beli rendah disebabkan semua kebutuhan dikomersialisasikan dan dengan harga yang tidak mampu dikejar oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Wajah kemiskinan perkotaan lebih kompleks daripada kemiskinan perdesaan. Secara kasat mata, kemiskinan perkotaan itu tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya mata pencaharian, tidak punya aset, pendidikan rendah, ketrampilan rendah, dan terputus dari berbagai program pembangunan. Enzo Mingione (1996: 14) menyatakan:

> "*the current narratives on urban poverty as forms of social exclusion are based on plausible reasoning and on many different indicators, which, however, rarely match as they regard different population groups and different time-scales or only a section of the poor* (Konteks kekinian tentang kemiskinan perkotaan adalah keterkucilan sosial yang didasarkan pada alasan yang logis dan beragam indikator, tidak selalu cocok dengan keberagaman kelompok manusia serta perbedaan skala-waktu ataupun hanya merupakan satu bentuk kemiskinan)."

Lebih lanjut, Enzo Mingione menjelaskan bahwa ada dua narasi yang bisa menjelaskan kemiskinan perkotaan: (i) Secara makro, fokus pada semua resiko indikator kemiskinan, termasuk garis kemiskinan, interkoneksi antar faktor seperti pengangguran, orang tua tunggal, lansia, penyakit mental, keanggotaan pada kelompok yang kurang beruntung atau terpisah tinggal di lingkungan yang membusuk atau di daerah kurang berkembang, (ii) Secara mikro, fokus pada sejarah kehidupan dan proses sosial yang melebur dalam perilaku, rantai peristiwa individu dan keluarga.

Berdasarkan penjelasan Mingione, kemiskinan perkotaan sangat kompleks penyebabnya, selain faktor makro kemiskinan sebagaimana yang kita kenal yang berbasis pada sosial, ekonomi, politik, bahkan masuk pada aspek mikro yang terkait dengan perilaku individu dan keluarga, budaya yang berjalan setiap hari.

John Pierson (2002: 7) menjelaskan definisi kemiskinan perkotaan sebagai keterkucilan sosial:

> "*Social exclusion is a process that deprives individuals and families, groups and neighbourhoods of the resources required for participation in the social, economic and political activity of society as a whole. This process is primarily a consequence of poverty and low income, but other factors such as discrimination, low educational attainment and depleted living environments also underpin it. Through this process people are cut*

off for a significant period in their lives from institutions and services, social networks and developmental opportunities that the great majority of a society enjoys (keterkucilan sosial adalah satu proses yang menghalangi individu, keluarga, kelompok dan ketetanggaan dari sumber-sumber yang diperlukan untuk berpartisipasi di dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat secara keseluruhan. Sebab primernya adalah kemiskinan dan pendampatan rendah; sebab lainnya adalah diskriminasi, pendidikan rendah, lingkungan buruk. Akibatnya, masyarakat terputus dari kehidupan dunia luar, lembaga dan layanannya, jejaring sosial dan mengembangkan peluang bagi masyarakat luas)."

Secara singkat, kemiskinan perkotaan adalah efek dari *industrialization and de-ruralization* (proses industrialisasi dan penghilangan desa). Yaitu, orang-orang dengan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yang tidak terserap di pasar kerja, atau korban dari kaum pendatang yang mengambil manfaat dengan mengesampingkan kearifan lokal.

Keterkucilan sosial atau social exclusion terjadi tidak dengan sendirinya, namun ada sejumlah sebab. John Pierson (2002: 8) menjelaskan ada 5 hal yang memunculkan keterkucilan sosial, yaitu: (i) Kemiskinan dan pendapatan rendah; (ii) Sulit mengakses bursa kerja; (iii) Lemahnya dukungan sosial dan jejaring; (iv) Efek dari daerah lokal dan ketetanggaan, dan; (v) Terkucil dari segala layanan/jasa.

Ketika menjelaskan kemiskinan di Jakarta pada awal 1970, Sajogyo dan Pudjiwati (1992: 62 – 63) menjelaskan kampung miskin dengan mengatakan: "Dalam pembicaraan kita, yang dimaksud dengan kampung miskin adalah bagian dari daerah kelurahan dengan kondisi lingkungan yang serba kekurangan: keadaan prasarana, kesehatan dan kebersihan sanitasi yang buruk dengan sampah yang menumpuk dan membusuk: saluran pembuangan air yang jelek dengan selokan yang tersumbat dan becek; perumahan yang sempit, padat, dan berdesak-desakan dengan para penghuni yang hidup miskin atau melarat. Acapkali, bangunan dan pemungkiman ini berlokasi di daerah-daerah "terlarang" karena gangguan keamanan, keselamatan seperti di sepanjang jalan kereta api, kali, atau jembatan. Kombinasi

keadaan keadaan yang serba kurang menjadikan daerah ini sebagai perkampungan liar, miskin, dan lingkungan yang buruk.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, kemiskinan perkotaan adalah permasalahan di semua kota, penyebabnya utamanya adalah urbanisasi yang tidak terkendali, SDM rendah, jumlah penduduk lebih besar dari kemampuan serapan kerja baik di sektor industri, perdagangan, jasa, maupun informal; mengakibatkan munculnya kampung-kampung miskin di tengah gemerlapnya kota. Wajah kemiskinan perkotaan menjadi semakin buruk ketika masyarakat miskin tidak mampu mengakses beragam program pembangunan pemerintah maupun non-pemerintah.

9. Masyarakat Perkotaan

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 56), masyarakat perkotaan adalah: "Masyarakat yang hidup di tengah kota, yang siap untuk bersaing dan merasakan kondisi sosial kota yang sebenarnya; Persaingan yang semakin ketat akan menimbulkan keresahan bagi mereka yang tertinggal, kegagalan untuk bersaing, karena kurangnya keterampilan dan kesempatan untuk maju; Masyarakat perkotaan, cenderung konsumtif, dengan tidak memperhatikan kebutuhan yang mendesak, sehingga kebutuhan yang diharapkan tidak dapat teratasi dan mengakibatkan meningkatnya kemiskinan yang tidak dapat dikendalikan lagi; Meningkatnya urbanisasi masyarakat perkotaan, dari desa ke kota menjadi tantangan masyarakat, untuk bisa bertahan hidup, dengan kondisi yang modern. Perkotaan sudah menjadi pusat-pusat perubahan dan kemajuan.

Masyarakat kota memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan masyarakat desa. Berikut ini kami nukilkan pandangan Sosiolog Soerjono Soekanto tentang ciri-ciri masyarakat perkotaan (urban community) (2012:57):

a. Kehidupan beragama kurang, bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Hal ini disebabkan, adanya cara berfikir yang mengagungkan rasional yang didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita msyarakat.
b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau individualistik.

c. Pembagian kerja diantara warga-warganya lebih tegas, dan mempunyai batas-batas yang nyata. Di kota, tinggal orang-orang dengan aneka latar belakang sosial yang unik, dan pendidikan yang menyebabkan individu memperdalam suatu bidang kehidupan, khusus yang menyebabkan sesuatu gejala, bahwa warga kota tak mungkin hidup sendirian, pasti akan menghadapi persoalan-persoalan hidup, yang diluar jangkauan kemampuannya. Gejala demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok kecil, yang didasarkan pada pelajaran yang sama, keahlian yang sama, kedudukan sosial yang sama. Semuanya dalam batas-batas tertentu yang membentuk pergaulan hidup.
d. Kemungkinan-kemungkinan dalam mendapatkan pekerjaan terbatas, yang diperoleh warga kota, karena sistem pembagian kerja yang tegas.
e. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat kota, menyebabkan, terjadi interaksi-interaksi yang lebih didasarkan pada faktor kepentingan dari pada faktor pribadi.
f. Jalan kehidupan yang cepat di kota, menyebabkan pentingnya faktor waktu atau harganya waktu (time is money), sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting.
g. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota, karena biasanya terbuka dalam menerima pengaruhpengaruh dari luar. Hal ini, sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda.

B. STRUKTURAL FUNGSIONAL

Perspektif fungsionalisme (Zastrow, 2007: 441, 442) dikemukakan oleh Emile Durkheim dan dikembangkan secara lebih detail oleh Talcott Parsons, Robert. K. Merton (murid Talcott Parsons), dll. Madzhab Fungsionalisme memandang bahwa masyarakat yang baik adalah satu kesatuan yang terorganisir, memiliki aturan bersama yang ditaati dan diikuti, saling berinteraksi secara positif demi kesatuan masyarakat tersebut. Masyarakat dalam madzhab ini dipandang sebagai interdepedensi dan interrelasi. Maka, menurut madzhab ini, masyarakat adalah laksana satu tubuh yang terdiri atas ribuan organ dan sel yang saling terkait dan saling pengaruh, bekerja bersama secara

seimbang sehingga tercipta keselarasan hidup. Maka, apabila ada satu organ mengalami masalah akan berpengaruh kepada organ yang lain. Hal ini disebut sebagai *social disorganization* (disorganisasi social) atau *social dysfunctional* (disfungsi sosial). Madzhab ini memandang bahwa ada banyak potensi munculnya disorganisasi social dalam masyarakat, misalnya keluarga, system pendidikan, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Sejumlah fungsi atau disfungsi sosial ada yang *manifest* (nampak) dan ada yang *latent/hidden* (tersebunyi).

Durkheim (1982: 58) menyatakan bahwa *social facts* tidak sama dengan *physiological facts; social facts ada di dalam lingkungan fisik;* ia adalah laksana morfologi organisma makhluk hidup, seluruh bagian sel dari tubuh itu saling terkait, saling menguatkan untuk satu tujuan, yaitu hidup yang sehat. Maka, *social facts* itu terkait dengan *social substratum* (sub-bagian sosial), dan akan menjadi baik jika satu orang individu *aware* bahwa dirinya adalah memiliki fungsi dan tugas yang sama dengan orang lain di masyarakat.

Terkait dengan hal itu, Durkheim (1957: 14) menyatakan:

> "*There is no form of social activity which can do without the appropriate moral discipline. In fact, every social group, whether to be limited or of some size, is a whole made up of its parts: the primary element, whose repetition forms the whole, being the individual. Now, in order that such a group may persist, each part must operate, not as if it stood alone, that is, as if it were itself the whole; on the contrary, each part must behave in a way that enables the whole to survive".*

Pandangan Madzhab Fungsionalis ini sepertinya selaras dengan penjelasan Rasulullah ﷺ dalam sebuah haditsnya:

((مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمّى)) متّفق عليه

Artinya: Permisalahan sesama mukminin di dalam saling sayang dan saling cinta adalah laksana satu tubuh, apabila salah satu organ tubuh mengalami sakit, maka mengeluh seluruh anggota badannya dengan panas dan meriang. HR. Muttafaq 'alaih.

Di dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa masyarakat muslim itu adalah laksana satu tubuh, saling menguatkan, saling

bergantung dan saling berrelasi; apabila salah satu terganggu maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya. Maka, masyarakat yang sehat itu ada interrelasi dan interdepedensi untuk selalu menjaga keseimbangan dan kemajuan serta kekuatan bersama. Kemiskinan dalam madzhab fungsionalisme merupakan wujud gagalnya fungsi (disfungsi) struktur yang ada di dalam masyarakat.

Talcott Parsons sebagai pengikut pandangan fungsionalisme Durkheim, menyebutkan ada empat sub-sistem dalam sistem sosial yang harus tetap berjalan secara baik agar masyarakat bisa berjalan dengan baik dalam seluruh aspek kehidupannya, yaitu Goal-attainment, Adaptation, Integration, and Latency (GAIL system). Parsons (1982: 160) mengatakan tentang *goal-attainment* atau *goal-orientation* sebagai berikut:

> *The Function of Goal-Attainment. A goal is therefore defined in terms of equilibrium. It is a directional change that tends to reduce the discrepancy between the needs of the system, with respect to input-output interchange, and the conditions in the environing systems that bear upon the "fulfilment" of such needs.(Fungsi pencapaian tujuan umum. Sebuah tujuan umum didefinisikan dalam istilah yang bermakna keseimbangan. Tujuan umum adalah sebuah perintah untuk mengubah dan mengurangi disparitas antara kebutuhan dari sistem dengan respek untuk proses pertukaran input-output, dan kondisi-kondisi di dalam lingkungan sistem untuk memenuhi kebutuhan).*

Tentang *adaptation*, Parsons (1982: 161 - 162) mengatakan:

> *The Function of Adaptation. The second consequence of plurality of goals, however, concerns the difference between the functions of goal-attainment and adaptation. ... The adaptive function is defined as the provision of such facilities. ... Within the complex type of social system, this disposability of facilities crystallizes about the institutionalization of money and markets. More generally, at the macroscopic social-system level, the function of goal-attainment is the focus of the political organization of societies, while that of adaptation is the focus of economic organization (Fungsi adaptasi. Konsekuensi ke dua dari banyaknya tujuan umum adalah concern pada perbedaan antara fungsi dari pencapaian tujuan umum dan adaptasi. ... Fungsi adaptif adalah didefinisikan sebagai penyediaan beragam fasilitas untuk mencapai tujuan umum. ... Di*

dalam sistem sosial yang sangat kompleks, adaptasi berarti menyediakan anggaran dan pasar. Lebih umum lagi, pada sistem sosial yang lebih makroskopik, fungsi pencapaian tujuan umum itu fokus pada aspek politik, sedangkan adaptasi fokus pada organisasi ekonomi).

Tentang *integration*, Parsons (1982: 162 – 163) mengatakan:

The Function of Integration. In the control hierarchy, this stands between the functions of pattern-maintenance and goal-attainment. Our recognition of the significance of integration implies that all systems, except for a limiting case ... The functional problem of integration concerns the mutual adjustments of these "units" or subsystems from the point of view of their "contributions" to the effective functioning of the system as a whole. This, in turn, concerns their relation to the pattern-maintenance problem, as well as to the external situation through processes of goal-attainment and adaptation (Fungsi integrasi. Di dalam hirarkhi kontrol, fungsi integrasi berdiri di antara fungsi pattern-maintenance dan fungsi goal-attainment. Kita akui bahwa pentingnya integrasi terimplikasi dalam semua sistem, kecuali untuk kasus tertentu yang terbatas.... Masalah fungsi integrasi concern pada sumbangsih unit-unit dalam sistem yang mempengaruhi efektivitas fungsi secara keseluruhan. Ini kembalinya pada hubungan mereka pada masalah pattern-maintenance dan situasi eksternal melalui proses goal-attainment dan adaptation).

Tentang latency, Parsons (1982: 159) mengatakan:

The Function of Pattern-Maintenance. The function of pattern-maintenance refers to the imperative of maintaining the stability of the patterns of institutionalized culture defining the structure of the system. There are two distinct aspects of this functional imperative. The first concerns the character of the normative pattern itself; the second concerns its state of "institutionalization." From the point of view of the individual participant in a social system, this may be called his motivational commitment to act in accordance with certain normative patterns; this, as we shall see, involves their "internalization" in the structure of his personality. ... The second aspect of this control function concerns the motivational commitment of the individual—elsewhere called "tension-management." A very central problem is that of the mechanisms of socialization of the individual, i.e., of the processes by which the values of the society are internalized in his personality. (Fungsi

Pola pemeliharaan. Fungsi pola pemeliharaan berkaitan dengan perintah untuk memelihara stabilitas aturan atau kultur yang sudah melembaga di dalam sistem. Ada dua aspek berbeda dari fungsi imperatif: pertama concern pada karakter pola normatif, ke dua concern pada makna "institusionalisasi". Dalam pandangan individu sebagai anggota sistem sosial, hal ini disebut komitmen motif untuk berbuat sesuai norma yang ada, ini yang melebur dalam makna "internalisasi. ... Aspek ke dua dari fungsi kontrol ini adalah concern pada komitmen motivasi individu yang disebut "manajemen tekanan". Satu masalah pokok adalah mekanisme sosialisasi individu, semisal proses nilai-nilai menjadi terinternalisasi dalam kepribadian)."

Secara ringkas, Bryan S. Turner (1951: xviii) mengatakan tentang pandangan Parsons tentang teori struktural fungsional sebagai berikut:

Parsons came to develop a four sub-system model of the social system around four "tasks" facing a social system in relation to its environment. These four subsystems (the GAIL system) were goal-attainment (the polity), adaptation (the economy), integration (cultural system of general values which is concerned with law and social control), and latency (the normative problem of motivation to fulfil positions in the social system) (Parsons datang untuk mengembangkan 4 sub-sistem model sistem sosial yang berputar pada 4 tugas untuk menghadapi sistem sosial dalam berhubungan dengan lingkungannya. Keempat sub-sistem (Sistem GAIL) dimana goal-attainment (politik), adaptation (ekonomi), integration (sistem budaya tentang nilai-nilai umum yang terkait dengan hukum dan kontrol sosial), dan latency (masalah normatif terkait motivasi untuk mengisi posisi-posisi di dalam sistem sosial)

Berdasarkan teori Parsons di atas, kami mengunakan perspektif tersebut di atas untuk melihat sistem sosial di Kp. Sri Rahayu, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, maka keempat sub-sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Goal-attainment*, adalah para perencana pembangunan di tingkat Kabupaten (SKPD terkait), Kecamatan, hingga Kelurahan;
2) *Adaptation,* adalah kemampuan menyesuaikan kebutuhan akibat gesekan dengan eksternal. Di sini disebut *adaptation* (adaptasi) bukan *adoptation* (mengadopsi), yang menunjukkan

ada proses aktif-kreatif melindungi kebaikan masyarakat dari bahaya yang merusak dan menerima hal-hal yang positif dari eksternal demi langgengnya kehidupan. Maka, fungsi *adaptation* dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan.

3) *Integration*, adalah fungsi menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda untuk sinergi secara harmoni untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan seluruh kebutuhan anggotanya. Fungsi *integration* dilaksanakan oleh peran tokoh formal dan informal melalui forum-forum musyawarah, dan;

4) *Latency atau Latent pattern maintenance of relationship,* adalah fungsi memelihara pola-pola hubungan antar anggota masyarakat. Di sini ada peran pranata sosial, sopan santun, budaya, agama, dan *character building*. Fungsi ini diperankan oleh masyarakat.

Kemiskinan menurut perspektif fungsionalisme adalah salah satu bentuk disorganisasi sosial atau kepincangan sosial. Solusinya adalah dengan memecahkan penyebab distribusi yang tidak lancar, mengembangkan interrelasi dan interdepedensi secara lebih erat, serta jaminan sosial kemasyarakatan; masing-masing anggota masyarakat mengambil peran secara positif untuk menyelesaikannya. Intinya mengembangkan *social capital* di masyarakat.

Bambang Rustanto (2014: 31 dan 32) menyebutkan bahwa perspektif kemiskinan menurut teori struktural fungsional ada tiga perspektif, yaitu:

a. Perspektif patologi sosial (Durkheim). Kemiskinan dipandang sebagai penyakit sosial, dimana orang gagal dalam berfungsi sosial dalam peran yang diharapkan struktur sosial yang terus berubah sehingga tertekan oleh struktur yang lain. Orang-orang menjadi miskin karena gagal mengikuti atau gagal beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah tersebut, sehingga mengganggu keberfungsiannya, seperti akses akan informasi terbatas, tidak mampu mengikuti pendidikan, hubungan sosialnya terbatas. Hal inilah yang membuat orang tetap menjadi miskin karena kalah bersaing (disfungsi).

b. Perspektif disorganisasi sosial/disintegrasi sosial (Parsons). Kemiskinan disebabkan kesalahan dalam aturan, salah mengorganisir, serta salah kebijakan yang tidak memihak pada orang miskin akibat dari penyelewengan institusi karena kurangnya kontrol sosial. Disorganisasi terjadi ketika masyarakat, seluruh atau sebagiannya mengalami ketidaksempurnaan dalam mengorganisasi atau mengintegrasikan tujuan, harapan, dan aturan, serta tidak menjaga stabilitas atau keseimbangan. Hal ini mungkin terjadi karena perubahan begitu cepat dan orang tidak mampu mengikutinya, sehingga kemungkinan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat dan orang-orang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya.
c. Perspektif penyimpangan perilaku. Perspektif ini menyatakan bahwa orang berontak dan melakukan penyimpangan sebagai wujud perlawanan dan mencari perhatian untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan harapan-harapan yang dimiliki oleh seseorang dengan nilai atau harapan kelompok/masyarakat tempat ia tinggal sehingga ia berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang tersebut yang menyebabkan ia tidak memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan yang terdapat pada masyarakat tempat ia berada, sehingga ia miskin.

Kemiskinan yang merupakan wujud disorganisasi sosial di dalam masyarakat juga merupakan "hasil" dari jebakan bagi masyarakat. Jebakan ini yang dimaksud istilah *poverty trap* atau jebakan kemiskinan. Costas Azariadis (2005) mendefinisikan jebakan kemiskinan: "*A poverty trap is "any self-reinforcing mechanism which causes poverty to persist."* Dan apabila kemiskinan itu telah masuk ke dalam masyarakat secara turun-temurun, maka akan sangat sulit untuk diurai dan diputus mata rantainya.

Jefferey D. Sach (2005: 19) mengatakan: "*They are trapped by disease, physical isolation, climate stress, environmental degradation, and by extreme poverty itself* (orang-orang miskin itu terjebak menjadi miskin karena penyakit, terisolir secara fisik, tekanan iklim, penurunan kualitas lingkungan, dan ekstremnya kemiskinan itu sendiri)".

Bonds, Keenan, Rohani, and Jefferey D. Sach (2010) menyatakan tentang jebakan kemiskinan:

> *"In the developing world, many factors can contribute to a poverty trap, including: limited access to credit and capital markets, extreme environmental degradation (which depletes agricultural production potential), corrupt governance, capital flight, poor education systems, disease ecology, lack of public health care, war and poor infrastructure (Pada negara berkembang, banyak faktor bisa berkontribusi munculnya jebakan kemiskinan, terbatasnya akses kredit dan pasar modal, penurunan kualitas lingkungan yang sangat drastis, tata-kelola yang koruptif, larinya modal ke luar negeri, sistem pendidikan orang miskin, ekologi penyakit, tidak adanya jaminan kesehatan, perang, dan infrastruktur yang tidak layak)."*

Berdasarkan dua penjelasan tentang jebakan kemiskinan di atas, kami membenarkan teori fungsional yang menyatakan bahwa masalah di dalam masyarakat terjadi karena disorganisasi atau disfungsi sosial pada salah satu atau beberapa fungsi-fungsi morfologis masyarakat, apabila meminjam istilah yang digunakan oleh Emile Durkheim (1982). Ketiadaan atau kegagalan fungsi salah satu atau beberapa "morfologi organisma" masyarakat itulah yang disebut kemiskinan struktural fungsional.

Santosh Mehrotra dan Enrique Delamonica (2007: 107) menyatakan bahwa orang-orang miskin yang biasanya sangat sulit mendapatkan beragam layanan dan program pembangunan dari pemerintah, mereka akan semakin sulit dalam mempertahankan hidup, gizi buruk, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, dan beragam kebutuhan hidup dasar yang sulit terpenuhi. Hal ini yang menjadikan mereka masuk dalam apa yang disebut jebakan kemiskinan.

C. MODAL SOSIAL

1. Pandangan Fukuyama tentang Modal Sosial

Francis Fukuyama (1995)menjelaskan modal sosial sebagai berikut:

«رأس المال الاجتماعي، هو قدرة الأفراد علي العمل سويا لتحقيق

هدف مشترك داخل مجموعات أو منظمات. لقد شاع استخدام مفهوم رأس المال الإنساني بين الاقتصاديين اليوم، فرأس المال الآن لا يتمثل في الأرض، والآلات، والمصانع، ولكن في الإنسان بما يملكه من معارف ومهارات. ورأس المال الاجتماعي أو القدرة علي العمل في فرق والترابط مع الآخرين هو أهم هذه المهارات.... فلن تنجح هذه السياسات في مجتمعات تغيب فيها الثقة ولا تتوافر لها مبادئ الشرف والأمانة.

(Modal sosial adalah kemampuan para individu dalam ber-aktivitas secara tepat untuk mencapai tujuan bersama di dalam komunitas atau organisasi. Kata modal manusia ban-yak digunakan di kalangan ekonom zaman sekarang; modal tidak selalu identik hanya dengan tanah, peralatan, mesin, akan tetapi manusia karena memiliki pengetahuan dan ke-trampilan adalah termasuk di dalamnya; maka modal social ataupun kemampuan untuk beraktivitas dalam bagian yang saling terkait dengan orang lain adalah ketrampilan ter-penting manusia … maka, tidak akan berhasil pemberdayaan masyarakat jika tidak ada kepercayaan, tidak ada peng-hargaan dan amanah/kejujuran)."

Pada kesempatan lain, Fukuyama (2000: 3) mengatakan:

While social capital has been given a number of different definitions, most of them refer to manisfestations of social capital rather than to social capital itself. The definition I use in this paper is social capital is an instantiated informal norm that promotes cooperation between two or more individuals. The norm that constitute social capital can range from a norm of reciprocity between two friends, all the way to complex and elaboretely articulated doctrines like Chris-tianity of Confusianism. Theses norms most be instantiated in an actual human relationship: the norm of reciprocity exist in potentia in my dealing with all people, but is actualized in my dealing with my friends, at all epiphenomenal, arising because of social capital but not constituting social capital itself. (Ketika modal sosial telah didefinisikan dalam beragam definisi, mayoritas definisi tersebut hanya mengupas mani-festasi/perwujudannya

dan bukan pada kata modal sosial itu sendiri. Definisi yang saya pakai pada makalah ini adalah modal sosial sebagai norma informal yang mendorong terja-dinya kerjasama diantara dua orang atau lebih. Norma yang mengatur modal sosial bisa berasal dari norma resiprositas (hubungan timbal-balik) diantara dua teman, yang berasal dari ajaran agama, misalnya Kristen dan Konghucu. Norma-norma yang demikian harus diwujudkan dalam hubungan antar manusia secara nyata: norma hubungan timbal-balik selalu ada dan potensial untuk bisa diwujudkan dalam hu-bungan dengan semua orang, tetapi itu saya wujudkan dalam hubunganku dengan temanku saja. Fakta sosial ini selalu ada dan terus meningkat karena adanya modal sosial dan bukan karena aturan/konstitusi modal sosial itu sendiri).

Kata kunci dari definisi modal sosial menurut Fukuyama adalah norma informal dan bukan aturan konstitusi formal, ada aktivitas relasi antar dua orang atau lebih, ada resiprositas (hubungan timbal-balik), diwujudkan hanya dalam hubungan yang sangat erat (pertemanan) bukan hubungan formal, dan untuk pencapaian tujuan. Fukuyama membandingkan karakteristik masyarakat Asia Tenggara yang tingkat hubungan sosialnya tinggi dengan masyarakat Eropa dan Amerika yang cenderung individualistik. Jika diringkas akan terlihat sebagai berikut:
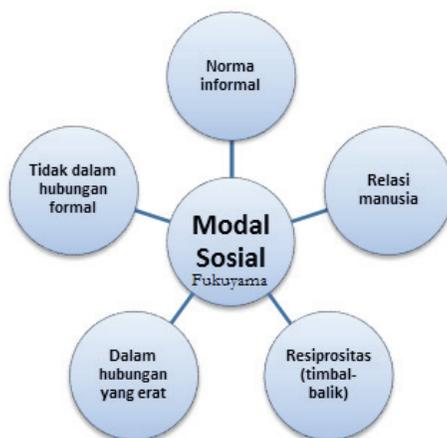
Diagram 2.1.: ModelModal Sosial Menurut Francis Fukuyama

2. Pandangan Putnam tentang Modal Sosial

Robert D. Putnam(1993a: 169) dalam John Field (2008: 4) mendefinisikan modal sosial sebagai: *features of social organisation, such as trust, norms, and networks, than can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions* (Sesuatu karakteristik yang ada di dalam organisasi sosial, semisal kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa me-ningkatkan efisiensi masyarakat melalui memfasilitasi aksi-aksi yang terkoordinasikan).

Definisi pertama Putnam ini disampaikan pada saat Putnam melakukan riset tentang tradisi politik di Italia. Artinya, partai politik akan menjadi partai yang besar, kuat, dan terus berjaya, apabila bisa mem-bangun tiga hal, yaitu (i) kepercayaan,(ii) norma yang berlaku dan ditaa-ti bersama, dan (iii) jejaring yang kuat. Dan pada tahun 1996, Putnam (John Field, 2008: 35) sedikit merevisi definisinya sebagai berikut: *by 'social capital' I mean features of social life – networks, norms and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue sha-red objectives* (dengan "modal sosial", aku memaksudkannya adalah fitur-fitur kehidupan sosial, semisal jejaring, norma, dan kepercayaan, yang kesemuanya bisa digunakan oleh partisipan untuk berbuat bersa-ma secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama).

Namun, pada tahun 2002, Putnam melakukan riset tentang *social connection* (keterhubungan sosial) di masyarakat Amerika dan kemudian mendefinisikan modal sosial sebagai berikut:

> *The idea at the core of the theory of social capital is extremely simple: Social networks matter. Networks have value,...We describe social networks and the associated norms of reciprocity as social capital, because like physical and human capital (tools and training), social networks create value, both individual and collective, and because we can "invest" in networking. Social networks are, however, not merely investment goods, for they often provide direct consumption value* (Ide utama dari teori modal sosial adalah sangat sederhana: tentang jejaring sosial. Jejaring memiliki nilai ... dst. Kami jelaskan bahwa jejaring sosial dan norma-norma yang terkait resiprositas (saling memberi, saling merespon) sebagai modal sosial, karena seperti modal fisik dan modal manusia (peralatan dan trainning), jejaring sosial menciptakan nilai bagi dua pihak, individu dan kelompok, dan karena kita bisa melakukan investasi dalam jejaring. Jejaring

sosial adalah tidak hanya investasi barang semata, bagi mereka seringkali memberikan nilai konsumsi langsung).

Berdasarkan beberapa definisi modal sosial dari Putnam, dapat kami ringkaskan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.:Ringkasan Definisi Putnam Mengenai Modal Sosial Menurut Perbedaan Sumber Riset

Sasaran/Objek	Kandungan Social Capital			Riset Tahun
Tradisi politik di Italia	*Trust* (Kepercayaan)	*Norms* (Norma/ Aturan)	*Networks* (Jejaring)	*1993*
Keterhubungan sosial di masyarakat Amerika	-	*Reciprocity* (hubungan timbal-balik)	*Social Network* (Jejaring Sosial)	2000

2. Pandangan Piere Bourdieu tentang Modal Sosial

Piere Bourdieu, seorang sosiolog asal Perancis, memiliki dua warna definisi modal sosial. Definisi pertama (era 70-an dan 80-an) hanya melihat pada segmen individu (individual's social capital), dan definisi kedua (era 90-an) sudah melihat dua segmen sekaligus, yaitu *individual's social capital* dan *community social capital*.

Pada tahun 1973, Bourdieu (John Field, 2008: 17) menyatakan tentang modal sosial sebagai:

> *Social capital is* a *capital of social relationships which will provide, if necessary, useful 'supports': a capital of honourability and respectability which is often indispensable if one desires to attract clients in socially important positions, and which may serve as currency, for instance in a political career* (Modal sosial ada modal hubungan sosial yang akan menyediakan hal-hal yang mampu mendukung saat dibutuhkan: sebuah modal yang mampu menghargai dan mampu diharapkan, dimana ia sering sangat dibutuhkan jika seseorang ingin menarik klien di dalam posisi penting secara sosial dan yang bisa melayani secara langsung dalam karir politik).

Piere Bourdieu (1986) dalam Phillips (2009: 50) mengatakan:

> *Social capital is an attribute of an individual in a social con-text. One can acquire social capital through purposeful ac-tions and can transform that capital into conventional econo-mic gains. The ability to do so, however, depends on the na-ture of the social obligations, connections, and networks available to you* (Modal sosial adalah atribut individu dalam konteks sosial. Seseorang bisa mendapatkan modal sosial melalui aksi-aksi yang berguna dan dapat mentransformasi-kannya ke dalam segmen ekonomi konvensional. Kemampuan tersebut, bagaimanapun juga, tergantung pada sifat dari kewajiban sosial, hubungan, dan jejaring yang kau bisa lakukan).

Dua definisi Bourdieu pada tahun 70-an dan 80-an ini menekankan *modal sosial* pada *peran individu*, yaitu bahwa modal sosial itu adanya di dalam diri individu, di dalam kontrol masing-masing orang per orang (individual social capital). Definisi tersebut belum atau tidak menyentuh elemen komunitas. Padahal pada kenyataannya, ada modal so-sial yang memang benar-benar dalam bingkai kebersamaan (community social capital). Untuk bisa memahami definisi Bourdieu tahun 70-an dan 80-an ini, kita harus faham bahwa ia sedang meneliti kondisi di Jerman dan ketidak-adilan sosial yang ada di sana. Dan Bourdieu adalah Sosiolog yang ter-pengaruh dengan Marxist. Dia menyatakan bahwa *economic capital* ada dan menjadi dasar dari setiap hal yang disebut *capital*/modal. (Bourdieu, 1986: 252).

Bourdieu (1992) dalam John Field (2008: 17) dan di dalam Häuberer (2011: 38) kemudian memberikan definisi yang lebih komprehensif,sebagai berikut:

> "*Social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of pos-sessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquain-tance and recognition* (Modal sosial adalah jumlah keseluruhan sumber, aktual atau nyata, yang semakin bertambah kepada individu atau kelompok karena bertambahnya jejaring, sedikit atau banyaknya hubungan yang di-lembagakan dari perkenalan yang baik dan perhargaan)."

Pada definisi Bourdieu tahun 90-an ini, ia melakukan penyempurnaan definisi, mengakui ada *individual's social capital* dan ada

community's social capital. Ikhtisar penjelasan Bourdieu yang berbeda-beda pada setiap dekade itu apabila ditabelkan, akan tampak sebagai berikut:

Tabel 2.3.: Pergeseran Definisi Modal Sosial Piere Bourdieu

Era	*Sifat*	Tujuan	Kontrol	*Segmentasi*
Era 70-an dan 80-an	*Relationship* (hubungan baik dengan pihak lain)	Pencapaian tujuan individu	Dalam kontrol individu	*Individual social capital*
Era 90-an	▪ *Relationship* ▪ Ada *networks* ▪ *Institutionalized*	Pencapaian tujuan bersama	▪ Peran individu ▪ Peran kelompok	▪ *Individual social capital* ▪ *and community social capital*

3. Pandangan Nan Lin

PandanganNan Lin (2001: 3) tentang modal sosial dapat kami sebutkan sebagai berikut:

> *What is capital? I define it as investment of resources with expected returns in the marketplace. Capital is resources when these resources are invested and mobilized in pursuit of a profit – as a goal in action. Thus, capital is resources twice processed. In the first process, resources are being produced or altered as investment; in the second, the produced or altered resources are being offered in the market-place for a profit...This theory, and its research enterprise, argue that social capital is best understood by examining the mechanisms and processes by which embedded resources in social networks are captured as investment. It is these mechanisms and processes that help bridge the conceptual gap in the understanding of the macro–micro linkage bet-ween structure and individuals*. (Apa itu modal? Saya definisikan modal adalah aktivitas menginvestasikan sum-ber-sumber pada lahan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan dari pasar. Modal adalah sesuatu yang diinvestasikan dan dimobilisasi untuk menggapai keun-tungan sebagai tujuan akhirnya. Maka, dalam modal ada dua proses, pertama sumber-sumber dibuat/diubah untuk diinvestasikan, kedua: modal digunakan untuk mendapatkan keuntungan.... Maka, modal sosial intinya pada bagaimana beragam potensi

dan struktur mampu dibangkitkan untuk memanfaatkan peluang, memahami struktur yang hirarkhis, jejaring sosial, dan pelaku, serta jembatan penghubung)".

Lebih lanjut di dalam *Handbook of Social Capital* (2008: 51 – 52), Nan Lin menjelaskan modal sosial sebagai berikut:

Social capital is defined as resources embedded in one's social networks, resources that can be accessed or mobilized through ties in the networks...I have identified three principal sources (exogenous variables) for social capital: (1) structural positions (an actor's position in the hierarchical structure of social stratification—the strength-of position proposition), (2) network locations—(an actor's location in the networks that exhibit certain features, such as closure or openness, or bridging, as illustrated in the strength-of-tie propositions), and (3) purposes of action (instrumental—e.g. for gaining wealth, power, or reputation, or expressive— e.g. for maintaining cohesion, solidarity, or well-being). (Modal sosial didefinisikan sebagai beragam sumber yang otomatis menempel/ lekat di dalam satu jejaring sosial, bisa diakses atau dipindahkan melalui ikatan-ikatan tertentu di dalam jejaring tersebut... Saya telah mengidentifi-kasikan ada 3 sumber prinsip (variabel eksogen) untuk mo-dal sosial, yaitu: (i) Posisi struktur/aktor di dalam struktur hi-rarkhi, (ii) lokasi jejaring yang sifatnya erat atau terbuka, ataupun *bridging* yang diilustrasikan sebagai proposisi jaringan yang kuat, dan (iii) fungsi dari aksi untuk memeli-hara kebersamaan dan kelekatan, solidaritas, kesejahteraan sosial bersama, dll.).

Dua penjelasan Nan Lin di atas, apabila kita transformasikan ke dalam tabel, maka akan tampak sebagai berikut:

Tabel 2.4.: Ringkasan Teori Nan Lin tentang Modal dan Modal Sosial

	Proses I Investasi		Proses II Mendapatkan keuntungan	
Modal	Segala hal	Diinvestasikan	Peluang	Tujuan akhir pemilik modal
Modal sosial	*Social Networks*		Peluang bersama	Tujuan akhir bersama

4. Pandangan Partha Dasgupta dan Ismail Sirajuddin

Partha Dasgupta dan Ismail Sirajuddin dalam Ostrom dan T.K. Ahn (2003) menjelaskan modal sosial sebagai berikut:

> *I argue that social capital is most usefully viewed as a system of interpersonal networks. There is no single object called social capital, there is a multitude of bits that together can be called social capital. Each bit reflects a set of interpersonal connections. Just as the productivity of manufactured or natural capital goods depends upon the use to which they are put, the worth of social capital depends upon the kinds of activities in which members of networks are engaged. This is why writings on social capital so frequently have been studies of institutions* (Saya berargumen bahwa modal social adalah pandangan yang paling banyak digunakan sebagai satu system jejaring antar personal. Tidak ada sesuatu yang tunggal yang disebut modal social, ada banyak hal yang secara bersama-sama dapat disebut modal social, setiap bagiannya merefleksikan seperangkat hubungan antar personal; hanya melalui produktivitas yang terbangun atau melalui modal yang alamiah tergantung pada penggunaannya melalui jejaring antar anggota).

Dalam kesempatan lain, Partha Dasgupta dan Ismail Sirajudin (1999) menjelaskan modal sosial sebagai:

> *A glue that holds societies together is generally recognized as necessary to a functional social order, along with a certain degree of common cultural identifications, a sense of belonging and shared behavioral norms. This intenal coherens helps to define social capital. Without it, society at large would collapse, and there could be no talk of economic growth, environmental sustainibility or human well-being.* (Modal sosial adalah laksana lem yang merekatkan sebuah masyarakat untuk selalu bersama, itu bisa diartikan sebagai keberfungsian aturan sosial, selaras dengan identifikasi fungsi budaya, perasaan saling memiliki dan sepenanggungan, serta norma perilaku yang sama-sama dimiliki dan dilaksanakan. Tanpa adanya ini semua, maka masyarakat dalam ukuran yang lebih besar akan goncang dan berikut-nya tidak akan mampu berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan lingkungan atau bagaimana menggapai kesejahteraan sosial bersama).

Apabila divisualisasikan dalam diagram, akan tampak sebagai berikut:
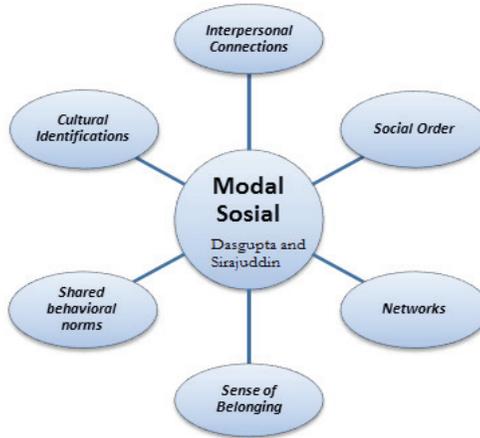
Diagram 2.2.: Modal Sosial Menurut Dasgupta dan Sirajudin

Berdasarkan definisi Dasgupta bersama Sirajudin di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah *interpersonal connection* (hubungan antar personal), melalui wadah networks (jejaring), ada norma peri-laku bersama yang berfungsi sebagai *social order* (aturan sosial) bersama, ada budaya bersama, perasaan saling memiliki dan sepenanggungan, sehingga terjaga kesatuan dan kebersamaan, untuk mencapai tujuan bersa-ma yang berupa kesejahteraan sosial bersama. Intinya, modal sosial ada-lah "lem perekat" bagi kebersamaan masyarakat.

Setelah melihat penjelasan modal sosial dari para para pakar, kami menyimpulkan ada lima hal yang ada di dalamnya, yaitu: (i) *Trust* (saling percaya), (ii) *Norms* (norma), (iii) *Network* (jejaring), (iv) *Reciprocity* (hubungan timbal-balik), (v) تحقيق هدف المسترك (Mencapai tujuan bersama).

a. *Trust* (saling percaya). *Trust* atau saling percaya merupakan komponen penting dari adanya masayrakat. Masyarakat yang pada angggotanya tidak saling percaya, maka akan hancur. Saling percaya muncul tidak dengan tiba-tiba. Saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur. Jadi sub-komponen dari *trust* adalah menghargai dan saling jujur. Maka, dari hal ini, ada larangan berbohong, larangan

menghina, merendahkan orang lain, mencaci, memaki. Apabila para anggota masyarakat atau organisasi social sudah saling menghargai dan saling jujur, maka pasti akan muncul *trust*.

b. *Norm* (tatanan/pranata sosial yang berlaku). Kelembagaan sosial pada dasarnya menyangkut seperangkat nor-ma atau tata nilai dalam bertindak. Maka, dalam fungsi ini, bagi masyarakat, norma memberikan:
   1) Pedoman berperilaku bagi antar individu dan apa yang mesti mereka lakukan;
   2) Alat penjaga keutuhan eksistensi masyarakat. Suatu masyarakat akan disebut eksistensinya jika mereka memiliki norma yang berlaku dan disepakati bersama, apabila tidak ada maka tidak ada masya-rakat melainkan hanya sekumpulan benda.
   3) Alat control sosial bagi sesama anggota.

c. *Networks* (jejaring antar anggota). *Networks* atau jejaring adalah model hubungan diantara para anggota masyarakat atau organisasi sosial. Manusia memang kalau hanya untuk sekedar tidak mati, bisa melakukan berbagai hal secara sendiri. Namun, ia akan mengalami kepayahan yang amat sangat. Bayangkan saja, satu orang jika ingin makan, maka ia harus mencari bahan baku sendiri di hutan lalu menemukan tanaman yang bisa dimakan, untuk memiliki pakaian ia harus membuat pakaian sendiri, dari mulai menanam kapas, memintal, menenun, dan menjahit. Untuk memiliki rumah, ia harus mencari kayu sendiri, menebang pohon sendiri, memikul kayu sendiri, membelah, dan menyerut kayu serta membentuknya menjadi ru-mah. Betapa payahnya manusia jika demikian. Maka, manusia memer-lukan bantuan orang lain.

   Dalam konteks masyarakat, ada banyak tujuan dari berdirinya masyarakat. Maka, jejaring atau *networks* adalah demikian penting bagi mereka. Dengan *network*s, manusia bisa memperoleh keinginan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sangat mudah, nyaman, dan efektif serta optimal. Misalnya: Untuk mengetahui apakah rumah sakit di kota sudah buka dan memberikan layanan, kita tidak harus datang langsung dan melihat atau bertanya di rumah sakit, namun cukup dengan SMS ke orang yang kita percaya (*we trust to him/ her*) dan bertanya.

Demikan juga jika kita ingin mengetahui apakah perguruan tinggi "A" itu baik ataukah jelek, atau tentang kebutuhan lainnya.

d. *Reciprocity* (tindakan saling memberi respon). *Reciprocity* merupakan tindakan bersama yang ditunjukkan dengan saling memberi respon. Dalam bahasa lain hubungan timbal-balik. Namun, dalam *resiprocity* tidak mesti dimaknai jika Si A berkata kepada Si B maka Si B menjawab kepada si A. Bisa saja *resiprocity* itu Si A ke Si B, si B ke Si C, si C ke Si D, dan Si D ke Si A. Jadi *reciprocity* ada dua jenis, yaitu:
   1) *Direct reciprocity* (timbal-balik langsung) dan
   2) *Continuum reciprocity* (timbal-balik beralur).

e. تحقيقهدفالمشترك (pencapaian tujuan bersama). *Output* dari semua piranti modal sosial adalah untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, kelompok maupun organisasi sosial. Manusia adalah makhluk yang bertujuan, semua tindakannya, baik pribadi maupun kolektif adalah untuk alasan tertentu. Maka, dalam konteks kemasyarakatan, pasti ada tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh mereka. Seperangkat tujuan bersama itulah yang merupakan sebab kenapa masyarakat mesti saling percaya (*building trust*), meski membuat aturan yang disepakati bersama (*norms*), dan membuat skema jejaring social (*social network*) yang biasanya berwujud informal, serta *reciprocity* (ada hubungan timbal-balik).

5. Kategorisasi Modal Sosial

Dalam konteks keeratan-keberagaman, modal sosial terklasifikasi dalam tiga jenis, yaitu: *(i) Bonding, (ii) Bridging,* dan *(iii) Linking.* Woolcock (2001) dalam John Field (2008: 46) memberikan penjelasan tentang ketiganya, sebagai berikut:

   a. *Bonding social capital, which denotes ties between like people in similar situations, such as immediate family, close friends and neighbours* (Bonding adalah ikatan perasaan diantara orang-orang yang ada dalam situasi yang sama, semisal ikatan keluarga, kawan karib, dan ketetanggaan).

   b. *Bridging social capital, which encompasses more distant ties of like persons, such as loose friendships and workmates;* (Bridging adalah ikatan modal sosial yang lebih luas dan lebih longgar,

seperti pertemanan dan rekan kerja).

c. *Linking social capital, which reaches out to unlike people in dissimilar situations, such as those who are entirely outside the community, thus enabling members to leverage a far wider range of resources than are available within the community* (linking adalah ikatan modal sosial yang angggotanya dari beragam latar belakang, semisal satu komunitas dengan pihak luar, dan ikatan yang demikian akan memungkinkan kita bisa mengakses beragam sumber untuk kepentingan komunitas).

6. Kebaikan dan Keburukan Modal Sosial

Modal sosial bisa berimplikasi buruk dan bisa sebaliknya berimplikasi baik, tergantung maksud dan tujuan yang ingin dikerjakan. Misalnya, dalam komunitas pertanian yang sudah tertata rapi, kemudian muncul sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan sepihak berupa ingin agar tanah pertanian jatuh ke tangan para cukong atau rentenir dan memiskinkan warga. Maka, sekelompok orang itu bersepakat, membuat norma, membuat jejaring untuk mengelabuhi masyarakat, menciptakan *distrust* (ketidak saling percayaan), mengiming-imingi sebagian warga agar menjual atau meminjam uang ke rentenir, dan ujungnya adalah tanah pertanian jatuh ke rentenir. Setelah sebagian warga terpengaruh, maka pasti para warga yang lainnya juga akan terjerat "jebakan-jebakan ekonomi" yang diciptakan oleh sekelompok orang tersebut. Dan tidak lama lagi, pasti kita akan menyaksikan warga di situ jatuh posisinya dari petani, menjadi penggarap/buruh, dan kemudian jika cukong atau rentenir itu menyulap lahan pertanian jadi gedung perumahan, maka bisa dipastikan para warga akan terusir dari tanah-tanah yang dahulunya adalah milik mereka itu.

D. JARINGAN SOSIAL

Salah satu ciri masyarakat adalah ada hubungan antar sesama. Hubungan ini muncul secara naluriah karena manusia memiliki beragam kebutuhan yang tidak mungkin bisa dipenuhi sendiri. Masyarakat yang kuat, makanya, adalah yang *social connection* sangat erat dan kuat. Semua saling bekerja sama menguatkan, kekurangan pada salah satunya akan ditopang oleh yang lainnya. Semakin kuat

dan terjaganya hubungan, maka akan semakin langgeng eksistensi masyarakat tersebut. Emile Durkheim (1957: 14) mengatakan:

> *"There is no form of social activity which can do without the appropriate moral discipline. In fact, every social group, whether to be limited or of some size, is a whole made up of its parts: the primary element, whose repetition forms the whole, being the individual. Now, in order that such a group may persist, each part must operate, not as if it stood alone, that is, as if it were itself the whole; on the contrary, each part must behave in a way that enables the whole to survive* (Tak satupun aktivitas sosial yang bisa dijalankan tanpa ada etika yang mendukungnya. Fakta menyatakan bahwa setiap kelompok sosial, sekecil apapun dia, adalah dibangun dari etika bersama; kelompok inti yang juga dibangun dari sejumlah individu, pun demikian. Agar kelompok dapat bertahan langgeng, maka setiap bagiannya harus berperan bersama, bukan jalan sendiri-sendiri)".

Berdasarkan penjelasan Durkheim di atas, kita mengetahui pentingnya fungsi setiap anggota masyarakat, pentingnya fungsi sistem jaringan sosial, dan fungsi etika bersama yang disepakati, yaitu menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Ada masyarakat maka ada semua *point-point* tersebut.

Semua kebaikan yang ada di dalam masyarakat disebut modal sosial. Namun, tidak semua hal yang bermakna sosial adalah modal sosial. Tepat sekali perkataan Lin, Fu, Sung (2001: 57) dalam Julia Häuberer(2011: 34): "*Without a clear conceptualization, social capital may soon become a catch-all term broadly used in reference to anything that is "social".* (Tanpa adanya sebuah konseptualisasi yang jelas, maka modal sosial akan cepat menjadi istilah yang disematkan pada segala hal yang ada istilah "sosial"-nya)".

John Field (2008: 1 - 2) menyatakan: "Inti dari kapital sosial adalah saling percaya (*trust)* norma/tatanan/pranata sosial *(norms),* dan jaringan *(network).* Kita tidak bisa hidup hanya dengan prosedur baku, aturan formal, birokrasi yang ketat dan *jlimet*, karena semua itu membuat kita terte-kan, susah, dan lambat mencapai sesuatu secara lebih optimal".

Berkaitan dengan fokus penanggulangan kemiskinan sesuai kegiatan asseessment psikososial ini, maka urgensi jaringan sosial

adalah untuk menjaga eksistensi masyarakat. Agar masyarakat tidak punah, kemiskinan yang menderanya harus dihilangkan dengan penguatan pada jaringan sosialnya. Masyarakat pada level keluarga mampu beraktivitas ekonomi, namun hanya bisa menyelesaikan hal-hal kecil dari kendala kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan jaringan sosial untuk bisa membesarkan kekuatan level keluarga menjadi kekuatan level masyarakat sehingga kemiskinan bisa diminimalisasi atau dihilangkan.

E. PEKERJAAN SOSIAL DAN KEMISKINAN

Pekerjaan Sosial adalah profesi pertolongan. Profesi ini ada karena fakta menyatakan bahwa ada kelompok manusia yang sangat membutuhkan pertolongan akibat penindasan, ketidakadilan, dan keterpurukan, serta keterbatasan lainnya. Zastrow (2010: 5) menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang menolong orang untuk secara tepat dan maksimal berfungsi sosial.

Pincus and Minahan (1978: 3) dalam Kisrt-Ashman dan Hull Jr. (2009: 5) menyatakan bahwa fungsi pekerjaan sosial itu adalah:

> "*to enhance the problem solving and coping capacities of people, link people with systems that provide them with resources, services, and opportunities, promote the effective and humane operation of these systems, and contribute to the development and improvement of social policy* (Meningkatkan penyelesaian masalah dan penguatan kapasitas manusia , menghubungkan manusia dengan beragam sistem penyedia sumber solusi, pelayanan, kesempatan, mempromosikan sistem layanan yang efektif, manusiawi, dan berkontribusi terhadap pemberdayaan dan perbaikan kebijakan sosial)".

Berdasarkan penjelasan Pincus dan Minahan di atas, fungsi peksos itu ada 4, yaitu:

1. Meningkatkan penyelesaian masalah dan penguatan kapasitas manusia
2. Menghubungkan manusia dengan beragam sistem sumber, pelayanan, dan kesempatan;
3. Mempromosikan pelayanan yang efektif dan manusiawi dari sistem-sistem sumber tsb;

4. Ikut andil dalam pemberdayaan dan perbaikan kebijakan sosial.

Pekerja sosial adalah profesi yang selalu berpihak kepada kelompok rentan atau kelompok yang kurang beruntung. Hal ini karena profesi pekerja sosial tidak pernah terlepas dari sejarah kemunculannya, saat revolusi industri di Eropa hingga meluas ke Amerika, perang dunia pertama dan perang dunia kedua, banyaknya korban perang, dan penindasan antar sesama manusia. Kemiskinan adalah salah satu bentuk kekurangberuntungan. Karen K. Kirst-Ashman (2009: 307) menyatakan:

> *"Social workers are often more aware of community problems than other professionals. After all, they work in the community, and are often in contact with the most oppressed populations. They make home visits to the poorest neighborhoods and confront myriad social problems daily. Social workers often witness the impact of unemployment, rime, drug use, health problems, gang violence, and educational troubles. Along with police officers, social workers are perhaps more likely than any other professionals to confront these social ills* (Pekerja sosial adalah profesi yang paling mengerti permasalahan masyarakat daripada profesi lainnya; Mereka bekerja di dalam masyarakat dan seringkali berhubungan dengan banyak orang yang tertindas; Mereka melakukan kunjungan ke rumah-rumah orang termiskin dan menjumpai segudang masalah setiap hari; Pekerja sosial seringkali menyaksikan dampak dari pengangguran, gang-gang kekerasan, dan permasalahan pendidikan; Mereka juga bersama dengan pelaku kebijakan, maka pekerja sosial adalah profesi yang paling mungkin mengembannya daripada profesi lain untuk menghadapi beragam penyakit sosial yang ada)."

Tidak berlebihan apabila profesi pekerjaan sosial adalah profesi yang paling mungkin menangani kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Hal ini karena pekerja sosial bisa masuk pada semua segmen, baik orang maupun lingkungan sosial. KK. Kirst-Ashman (2009: 307) menyatakan: *"Social workers have a unique opportunity to influence their communities, because social work is the only profession that mandates working with both people and their environments. Consequently, social workers are often active at the community level.* (Pekerja sosial mememiliki satu kelebihan yang unik untuk bisa mempengaruhi beragam masyarakat, karena

pekerja sosial adalah satu-satunya profesi yang memiliki mandat bekerja dengan keduanya, manusia dan lingkungannya. Konsekuensinya adalah pekerja sosial seringkali aktif pada level komunitasmereka).”

Jim Ife (2008: 167) menyatakan bahwa pada struktur kekuasaan yang merugikan masyarakat, maka pekerja sosial harus fokus pada perjuangan hak asasi manusia (HAM), khususnya kenapa banyak orang yang masih miskin, mengapa perempuan mengalami diskriminasi pada segmen publik dan privat, mengapa perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, mengapa orang pribumi mengalami “peminggiran” dan diskriminasi, kenapa ada pihak yang semakin kaya dan pihak lain semakin miskin.

Memperjuangkan kemiskinan dengan pendekatan *community development*, cara yang terbaik adalah dengan *change from below perspective* bu-kandengan *top-down perspective*. Jim Ife (2009) mengatakan bahwa perspektif “perubahan dari bawah” adalah cara yang terbaik, dengan memak-simalkan partisipasi hingga pada *high levelparticipation*, maka hasilnya ada-lah hasil terbaik, seberapapun partisipasinya dan seberapapun perubahan yang capainya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pekerja sosial sangat berkepentingan dengan permasalahan kemiskinan; bagaimana memotretnya, meng-*angage*, meng-*assess*, membuat *plan of intervention*, implementasi, dan mengevaluasinya. Hal ini semakin kuat dengan adanya UU RI No. 13 tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan; disebutkan pada pasal 1 ayat 2, “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendam-pingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

F. PENDEKATAN PENGENTASAN KEMISKINAN KOTA BERBASIS BUDAYA

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dan klasik dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Bahkan, jika kita melihat sejarah, kemiskinan selalu bersentuhan dengan masyarakat Indonesia, baik itu ketika zaman kerajaan, penjajahan, sampai dengan zaman kemerdekaan dewasa ini. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, sejatinya tidak berdian diri. Beberapa kebijakan dan program

digulirkan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, menurut Pramudyasmono dkk, kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan di Indonesia pada umumnya bersifat top-down (dirancang dari pusat secara nasional) sehingga dalam aplikasinya di lapangan tidak langgeng, berlangsung secara insidental (sesaat), dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Padahal upaya pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran apabila sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat miskin, dan program-program pengentasan kemiskinan juga akan mendapat dukungan masyarakat apabila sejalan dengan nilai sosial budaya setempat (Hajar: 2010).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Lasmawan dam Suryadi (2012), bahwa pelibatan masyarakat dan dukungan aspek modalitas sosial-budaya masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah setempat tidak pernah tersentuh dalam program atau kebijakan pengentasan kemiskinan. Selama ini, berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, lebih terfokus pada program yang langsung mengarah pada sasaran (masyarakat miskin), namun mengabaikan potensi dan modalitas sosial masyarakat sekitar, sehingga program tersebut lebih sering gagal dan tidak bertahan lama (berkelanjutan). Secara teoritis, menurut Simanjuntak dkk. dan Todaro, bahwa kegagalan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor termasuk kebijakan yang bersifat top down (dari pusat), rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak optimalnya fungsi lembaga-lembaga terkait, kebijakan dan perencanaan yang tidak berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, dan ketidak-setaraan atau ketidak-adilan jender. Sebagai misal, kebijakan pengentasan kemiskinan yang dinilai banyak pihak kurang efektif adalah bantuan langsung tunai (BLT). Program ini dinilai kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial. Mengapa? Untuk menjawab hal tersebut setidaknya ada empat hal pertanyaan: (1) apakah kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya; (2) mengapa mereka miskin?; (3) apakah ada alternatif kebijakan menanggulangi kemiskinan?; dan (4) sejauh mana kearifan lokal memberi kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan?.

Di tahun 1990-an, program-program pengentasan kemiskinan

yang dirancang secara nasional oleh Pemerintah Pusat pun bernasib tidak jauh beda, meskipun dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, namun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Pelaksanaan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan Takukesra (Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga) misalnya, membuktikan bahwa kegiatan ekonomi produktif dari kelompok masyarakat/ keluarga miskin yang telah dirintis segera lenyap begitu saja seiring dengan berakhirnya program.

Berbicara kemisikinan, sejatinya tidak hanya menyoal sisi ekonomi saja. Chambers menjelaskan bahwa, kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumberdaya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi. Sedangkan menurut Harris-White kemiskinan itu mempunyai banyak sisi, yaitu: ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi penduduk miskin tidak memiliki apa-apa (having nothing), secara sosial mereka tidak menjadi siapa-siapa (being nothing), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (having no rights and being wrong). Selain faktor-faktor tersebut, dalam penelitiannya Kananlua dkk, menjelaskan bahwa kemiskinan dari dimensi budaya antara lain disebabkan oleh adanya warisan nilai-nilai tradisi yang tidak menunjang produktifitas, seperti rendahnya etos kerja, orientasi pada keuntungan jangka pendek, dan sikap fatalistik (pasrah kepada nasib). Sementara itu, Sarmiati menjelaskan penyebab kemiskinan menyangkut dimensi sosial, ekonomi dan budaya, di antaranya kemiskinan alami merupakan kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan World Bank (2003) seperti yang dikutip Pramudyasmono, dkk, bahwa pengertian kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Maka konsep kemiskinan dapat dipahami dari berbagai dimensi: politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Karena bersifat multidimensi tersebut, maka kemiskinan diibaratkan dengan kecantikan seorang gadis yang tentunya didefinisikan berbeda oleh orang yang melihatnya. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah kemiskinan (program pengentasan kemiskinan), seperti yang dijelaskan Sumodiningrat, maka harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang

meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

Definisi pemberdayaan itu sendiri menurut Winarni adalah pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Dengan demikian hakekat pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) yang didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan mengantar pada proses kemandirian.

Adapun strategi dalam pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam tiga bentuk (Isnan: 2014), yaitu:

1. Pemberdayaan : peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, Organisasi Sosial, LSM, dunia usaha dan penyandang masalah sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya serta merealisasikan aspirasi dan harapan mereka dalam mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
2. Kemitraan: kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifat terpadu;
3. Partisipasi: prakarsa, peranan dan keterlibatan semua pihak pelaku pembangunan dan penerima pelayanan, lingkungan sosial dan penyedia pelayanan dalam pengambilan

keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Kerangka pikir dalam proses pemberdayaan masyarakat, menurut Usman setidaknya mengandung tiga tujuan penting yaitu: (1) menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan (misalnya melalui melalui peningkatan taraf pendidikan); (3) upaya melindungi (mencegah) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.Sementara itu, menurut Soegijoko dkk, menjelaskan setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian. Kananlua dan kolega membagi upaya pengentasan kemiskinan ke dalam lima program utama, yakni program penyelamatan (rescue), program penciptaan lapangan kerja, program pemberdayaan (empowerment), program pemenuhan hak dasar, dan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Berkaca dari penjelasan di atas, maka model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment). Model ini lebih memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Oleh karenanya, kajian strategis pemberdayaan masyarakat, sebagai pisau analisis untuk faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik dalam sisi ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input atau bahan untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk

membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Agar pelaksanaan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan lebih berhasil secara efektif, maka terlebih dahulu perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat ekonomi lemah tetap berada dalam keadaan miskin. Hal ini dinilai sangat urgen, mengingat bervariasinya penyebab kemiskinan pada masing-masing komunitas (masyarakat) di setiap daerah. Dengan demikian, kebiijakan atau program pengentasan kemiskinan di satu daerah dengan daerahnya bisa saja mempunyai perbedaan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor penyebab kemiskinan itu sendiri dan faktor-faktor lain yang menyelimuti masyarakat tersebut seperti faktor sosial dan budaya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Tatag Wiranto (2013), bahwa pendekatan dalam program pengentasan kemiskinan hendaknya berdasarkan profil kemiskinan dan people driven di mana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis.

Oleh karena itu, adanya pengembangan sebuah model pengentasan kemiskinan yang mengedepankan pada integrasi dan akomodasi modalitas sosial dan budaya masyarakat harus menjadi perhatian oleh pembuat kebijakan pengentasan kemiskinan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang selama ini terlupakan. Dengan menggali dan mengembangkan kearifan lokal, kemiskinan tidak hanya dapat dikurangi (relieving) tetapi juga dapat dihindari (preventing) karena lestarinya sumber daya bagi generasi berikutnya. Kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anti kemiskinan. Pentingya kajian dimensi sosial dan budaya dalam strategi pengentasan kemiskinan juga dikemukakan oleh United Nations Economic and Social Comission for Asia Pacific (Unescap), yang menjelskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari penanggulangan kemiskinan uang; kemiskinan akses ekonomi, sosial dan budaya; dan penanggulangan kemiskinan terhadap akses kekuasaan dan informasi.

Pengertian kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (lokal). Lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilainilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal menurut Pattinama, meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu dan berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang.

Di berbagai tempat manapun, masyarakat pasti mempunyai semacam nilai-nilai, norma-norma, atau kearifan kolektif yang tertanam dalam sistem pengetahuan kolektif. Itulah yang sering disebut sebagai local-wisdom. Kearifan lokal merupakan suatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal merupakan cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun temurun. Nilai-nilai dalam kearifan lokal terpatri dalam sanubari, dan digunakan sebagai aturan atau pedoman dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Kearifan lokal berasal dari dalam masyarakat sendiri, disebarluaskan secara non-formal, dimiliki secara kolektif oleh masyarakat bersangkutan, dikembangkan selama beberapa generasi dan mudah diadaptasi, dan tertanam di dalam cara hidup masyarakat sebagai sarana untuk bertahan hidup. Kearifan lokal dapat menjadi kekuatan ketika pengetahuan dan praktik-praktiknya digunakan secara selaras dengan usaha pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada proses pembangunan itu sendiri, tetapi juga pada keberlanjutan proses dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan manifestasi dari kebudayaan masyarakat setempat, artinya terkait dengan tiga wujud dan tujuh unsur kebudayaan suatu masyarakat.

Sebagai contoh, menurut Magnis-Suseno dan Setyodarmodjo dkk, filsafat budaya Jawa secara umum mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian. semua unsur sehingga dapat harmonis,

saling berdampingan, saling cocok, saling menghormati dan rukun damai, artinya tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya. Penduduk Jawa sebagian besar hidup tergantung dari pertanian dan tinggal di daerah pedesaan. Kebiasaan tolong-menolong dan gotong royong antar warga didasarkan atas hubungan tetangga, hubungan kekerabatan atau hubungan berdasarkan efisiensi dan sifat praktis. Tatanan sosial tradisional berdasarkan sistem gotong royong yang dipandang sebagai perluasan hubungan kekerabatan atau hubungan interpersonal yang kompleks. Potensi lokal tersebut yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan program pengentasan kemiskinan.

Anharudin menjelaskan adat istiadat masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, ciri dari adat istiadat meliputi: Keharmonisan; yang menjunjung tinggi tata kehidupan tanpa gangguan; 2)Kebersamaan; yang menempatkan perseorangan sebagai makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, yang berarti bahwa hak dan kewajiban perseorangan harus diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat; 3) Kekonkretan; cara pandang yang menempatkan segala sesuatu (yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau dikerjakan) dalam wujud benda, yang mungkin hanya berfungsi sebagai lambang saja; 4)Kekasatan; yang memandang bahwa suatu tindakan dianggap selesai dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolik, atau ucapan. Segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah tindakan itu tidak memiliki sangkut paut dan hubungan sebab akibat. Di daerah lain, misalnya di Bali terdapat konsep nyamabraya yang menjadi simpul dasar pertalian antar anggota desa adat di daerah tersebut. Anderson (2006) seperti yang dikutip Lasmawan dan Suryadi menekankan pada domain tanggungjawab sosial dari ajaran nyamabraya, yaitu munculnya hegemoni komunalitas setiap komponen masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan atau konflik yang disandarkan pada kepentingan masyarakat secara bersama, yaitu hidup yang mapan secara social dan ekonomi. Konsep nyamabraya pada tataran kehidupan masyarakat modern lebih dimaknai sebagai sebuah pola berkehidupan yang bersinergi melalui integrasi potensi antar anggota masyarakat untuk keluar dari sebuah persoalan, termasuk mengenai kemiskinan yang bersifat regional. Pada kasus local, konsep nyamabraya ini selalu menjadi inti dari setiap gerakan masyarakat desa adat untuk menjaga dan mempertahankan integritas dan keagungan desa adat sebagai simbolisme masyarakat Hindu Bali. Berkaitan dengan generalisasi ini,

maka apabila konsep nyamabraya ini diletakkan dan dilekatkan pada program pengentasan masyarakat miskin, maka akan menjadi motor dan sekaligus inti dari program tersebut, sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dan keberhasilan program itu sendiri.

Selain itu, penelitian Lasmawan (2010) tentang peranan desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Bali, bisa menjadi rujukan kita bersama. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: (1) kegagalan program pengentasan kemiskinan di beberapa daerah di provinsi bali disebabkan karena minimnya pelibatan desa adat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam struktur masyarakat bali, (2) program yang dilaksanakan oleh dinas dan kantor di beberapa kabupaten baru sebatas pemenuhan kebutuhan hidup sesaat masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat kecil bahkan tidak ada, dan (3) terhambatnya pola dan akses komunikasi antara kelompok masyarakat miskin dengan masyarakat daerah setempat, untuk mensinergikan potensi yang dimilikinya, sehingga yang miskin semakin miskin dan masyarakat setempat (masyarakat local adat) "cuek" dan tidak peduli.

Dengan mengintegrasikan dan mengelaborasi modal sosial-budaya masyarakat setempat, hal ini akan mampu meningkatkan dan menguatkan kepemilikan dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk secara bersama-sama dan terlibat secara langsung dalam upaya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, sehingga program tersebut lebih produktif dan berhasil secara optimal. Dengan perkataan lain, bahwa di luar pendekatan yang bercorak strukturalis –yang selama ini menjadi pendekatan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan-, sesungguhnya kita dapat menggali mozaik kehidupan masyarakat setempat yang bernama kearifan kolektif atau kearifan budaya. Dengan mempertimbangkan potret keadaan perspektif rakyat miskin dan juga potret kondisi nyata kendala sosial ekonomi dan budaya masyarakat, maka program pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif. Hal ini seperti dijelaskan oleh Hagedorn, yang dikutip Pramudyasmono, dkk, bahwa "values" (baca: nilai sosial-budaya) lebih luas cakupannya daripada norma (norms) dan kepercayaan normatif (beliefs), yakni meliputi ukuran-ukuran (standards) yang digunakan orang untuk mengevaluasi tujuan-tujuan (goals) dan perilaku-perilaku (actions) dalam bermasyarakat.Oleh karena itu, menurut Kusnadi, paradigma program pemberdayaan masyarakat dalam rangka

mengentaskan kemiskinan haruslah didasari oleh unsur-unsur yang relevan denga karakteristik budaya dan kebutuhan sosial–ekonomi masyarakat, yaitu adanya sikap simpati-empati yang kuat; bersifat terfokus pada kelompok sosial yang paling rentan secara ekonomis (keluarga miskin dan buruh); berorientasi partisipatif (masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evalusi program); mempertimbangkan aspek kontekstual (kebutuhan konkret dan prioritas); berwawasan sistemik.

***

BAB III

GAMBARAN LOKASI KAMPUNG SRI RAHAYU

A. SEJARAH SINGKAT KAMPUNG SRI RAHAYU

Periode tahun 1970 – 1980, Kampung Dayak masih terdapat banyak persawahan. Hanya terdapat lima rumah di daerah tersebut, dengan kondisi rumah masih *gubug*. Kondisi jalan setapak masih berupa tanah dan batu krikil sehingga apabila hujan keadaan jalan menjadi becek.

Gambar 3.1.: Kantor Kelurahan Karang Klesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

Periode 1980 – 1990, berdiri sebuah pasar buah kemudian beralih menjadi pasar kambing. Pada masa itu di bangun terminal lama, terminal tersebut merupakan pindahan dari terminal kebon dalem. Persawahan masih mendominasi di wilayah tersebut. Jumlah rumah mulai bertambah namun masih dalam ketegori sedikit, dengan kondisi rumah berbahan bilik. Penduduk yang bekerja disekitar terminal lama mulai mengontrak di daerah tersebut. Pada masa ini listrik belum masuk ke perkampungan, sehingga untuk penerangan masyarakat menggunakan lampu teplok atau senter. Kondisi jalan mulai agak lebar dan berbahan batu padas.

Periode 1990 – 2000, mulai berdiri Perum Damri, areal persawahan mulai berkurang. Kampung Dayak pada masa ini seperti perkampungan liar, mulai berdiri rumah-rumah *bedeng*, penduduk yang bekerja di areal terminal lama mulai memadati perkampungan tersebut. MCK umum pada masa ini belum ada, warga pun memanfaatkan sungai dan air sumur sebagai sumber kebutuhan sehari-hari. Kondisi jalan sudah mulai lebar dengan berbahan paving blok sehingga pada saat hujan tidak terlalu becek. Pada tahun 1995 listrik sudah mulai masuk ke perkampungan tersebut, sedangkan PAM belum ada pada saat itu.

Gambar 3.2.: Kp. Sri Rahayu yang berada di tengah kota Purwokerto dengan rumah hampir seluruhnya terbuat dari bilik bambu dan tanah sewa.

Secara geografis Kampung Dayak belum memiliki wilayah, maka masyarakat berinisiatif untuk membuat perkumpulan berupa Pokja RT dengan ikut bergabung dengan RT 02. Secara geografis RT 02 wilayahnya sangat luas, sehingga dilakukan pemekaran. Kampung dayak memisahkan diri menjadi RT 06. Dua tahun setelah pemekaran

yaitu tahun 1997, Kampung Dayak (RT 06) pecah menjadi RT 04 dan RT 05 dan berubah menjadi Kampung Sri Rahayu.

Kondisi terminal lama yang semakin ramai serta di ikuti dengan berdirinya perkampungan liar di sekitar terminal lama berdampak pada munculnya berbagai macam permasalahan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, pemulung, waria, pekerja seks komersial, dan pengamen. Untuk mengatasi hal tersebut ada sekelompok masyarakat yang peduli dengan mendirikan Yayasan "Biung Emban". Yayasan tersebut menjadi rumah singgah bagi para pengamen, mereka juga mendidik warga dengan memberikan serangkaian pelatihan dan keterampilan. Tahun 1998 mulai berdiri PAUD di wilayah Kampung Sri Rahayu.

Periode 2000 – 2010, Kampung Sri Rahayu mulai dilengkapi fasilitas umum seperti jalan mulai di aspal, dibangunnya *ponggok*/ mushola, dibangunnya pos siskamling, dibangunnya *drainase*, dibangunnya MCK umum, dan ada lapangan volly. Pada masa ini terminal lama mulai di bongkar, di bangunnya garasi bus mulyo di belakang Perum Damri. Kondisi perkampungan mulai padat seiring dengan berkembangnya kota Purwokerto menjadi tujuan utama bagi para pencari kerja di wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Permasalahan sosial pun makin berkembang dengan adanya tempat lokalisasi didaerah tersebut.

Gambar 3.3.: Kp. Sri Rahayu memiliki Pos Kamling sederhana dan Musholla.

Periode 2010 – hingga sekarang, terminal lama sudah pindah ke daerah teluk. Taman Andhang Pangrenan mulai berdiri, taman tersebut menjadi fasilitas umum bagi masyarakat Purwokerto untuk

kegiatan sehari-hari seperti bersantai, olahraga, dan berkumpulnya para komunitas. Areal persawahan sudah berkurang karena di dominasi dengan munculnya rumah-rumah permanen dan semi permanen. Penduduk mulai memadati rumah-rumah kosan dan kontrakan. Fasilitas umum mulai dibangun lebih baik seperti adanya PAM, MCK umum, Musholah, PAUD, dan tempat billiard. Pada tahun 2010 berdirilah Yayasan Sri Rahayu "Tombo Ati" yang di pimpin oleh Bapak Musafa. Walaupun ada yayasan tersebut ditengah kehidupan masyarakat, namun masyarakat tidak merasakan manfaat yang begitu besar. Pada akhirnya yayasan tersebut tidak berlangsung lama, karena tersangkut masalah hutang piutang.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, sangat konsern dalam penanganan masalah sosial yang ada di Kampung Sri Rahayu. Bentuk program yang telah diberikan antara lain pemberian bantuan sosial, pelatihan dan keterampilan, bantuan permodaln melalui UEP.

B. KONDISI GEOGRAFIS KAMPUNG SRI RAHAYU

Gambar 3.4.: Tokoh Kp. Sri Rahayu sedang membuat ecomap kampung

Gambar 3.5.: Ecomap Kp. Sri Rahayu yang dibuat berdasarkan aktivitas social mapping.

Kampung Sri Rahayu terletak tepat tengah kota Purwokerto, di belakang Taman Andhang Pangrenan yang dahulunya merupakan Terminal Bus Antar Kota, Kota Purwokerto. Secara singkat batasan geografis Kp. Sri Rahayu adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Pasar Sri Rahayu dan Taman Andhang Pangrenan

Sebelah Timur : Jalan Wachid Hasyim
Sebelah Selatan : Kompkek Perumahan Puri Indah
Sebelah Barat : Pool Damri dan Kelurahan Karang Pucung

Kampung tersebut merupakan kampung yang secara administratif adalah legal namun secara geografis bisa disebut tidak legal. Legal administratif karena terbukti memiliki kepengurusan RT dan RW. Kp. Sri Rahayu merupakan RT 04 dan RT 05 dari RW 10. Tidak legal secara geografis karena kampung dengan 2 RT tersebut Berdasarkan letak geografis, Kp. Sri Rahayu merupakan kampung yang penduduknya tidak memiliki tanah sendiri. Dengan jumlah warga 524 jiwa lebih yang tergabung di dalam 189 KK, hanya ada 20KK yang memiliki tanah dan bangunan sendiri, selebihnya sewa tanah per dua tahun untuk bisa kemudian mendirikan bangunan/rumah tidak permanen. Informan Rs mengatakan: "*Wargane ning kene sing nduwe omah dhewek nduwe lemah dhewek mung 20, liyane ngontrak lemah kabeh"*. Hal ini juga diperkuat oleh Informan CFC, "*Wargane kene ana 400-an jiwa, sing nduwe lemah dhewek karo umah dhewek, mung siji loro, tuan tanah ning kene, liyane nyewa kabeh*".

B. KONDISI DEMOGRAFIS KAMPUNG SRI RAHAYU

Kampung Sri Rahayu hanya terdiri dari 189 KK, dengan pendapatan rata-rata di bawah Upah Minimum Rakyat (UMR) merupakan sebuah potret kehidupan bahwa kemiskinan tidak hanya melanda kota-kota besar saja. Keberadaan Kampung yang relatif dekat dengan pusat kota membuat jumlah penduduk semakin bertambah pesat. Berikut ini gambaran kondisi demografi kondisi Kampung Rahayu, antara lain :

Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin. Jumlah penduduk Kampung Sri Rahayu (RT 04 dan RT 05) berjumlah 524 jiwa yang terdiri dari 273 orang laki-laki dan 251 orang perempuan. Jika di lihat berdasarkan golongan umur, maka usia antara 11 – 20 tahun menduduki urutan pertama sebesar 21,75 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kampung Sri Rahayu sebagian besar pada usia sekolah dan produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini :

Tabel 3.1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Kategori Umur	Jenis Kelamin		Frekuensi	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 10 tahun	59	30	89	16,98
2	11 – 20 tahun	65	49	114	21,75
3	21 – 30 tahun	31	32	63	12,04
4	31 – 40 tahun	39	43	82	15,64
5	41 – 50 tahun	24	46	70	13,35
6	51 – 60 tahun	32	42	74	14,12
7	>61 tahun	23	9	32	6,12
	Jumlah	273	251	524	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan. Pendidikan merupakan bagian indikator yang tidak terpisahkan ketika mengkaji tentang kemiskinan. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor seseorang apakah dapat terserap di pasaran kerja atau tidak. Kampung Sri Rahayu yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang migran, datang ke kota dengan tidak di ikuti oleh bekal ilmu maupun keterampilan yang mumpuni untuk dapat menjalani kehidupan di kota.

Hal ini dapat di lihat dari latar belakang pendidikan penduduk Kampung Sri Rahayu yang sebagian besar berlatar pendidikan yang rendah. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.2. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	175	49,45
2	SLTP	93	26,27
3	SLTA	75	21,18
4	Diploma III	1	0,28
5	Sarjana (S1/DIV)	10	2,82
	Jumlah	354	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Tabel 3.2. menunjukan bahwa tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk Kampung Sri Rahayu sebagian besar adalah tamatan SD, yaitu sebanyak 175 orang atau 49,45%. Selanjutnya di urutan kedua yaitu SLTP sebanyak 93 orang atau 26,27%, dan urutan ketiga yaitu SLTA sebanyak 75 orang atau 21,18%. Sedangkan yang menamatkan ke perguruan tinggi hanya 10 orang atau 2,82%. Adapun penduduk yang belum masuk masa sekolah sebanyak 72 orang. Sebanyak 29 orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan, dan 69 orang lainnya tidak tamat Sekolah Dasar.

Apabila ditinjau secara keseluruhan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan orangtua untuk membiayai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak lebih memilih untuk mengamen dan mengemis di bandingkan harus pergi ke sekolah. Hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mengais rejeki demi bertahan hidup. Pemerintah melalui Program Bantuan Siswa Miskin dan Kartu Indonesia Pintar berupaya untuk menekan angka putus sekolah, namun hal tersebut kurang memberikan efek yang besar terhadap jumlah anak putus sekolah di Kampung Sri Rahayu.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan. Kemunculan Kampung Sri Rahayu tidak terlepas dari keberadaan terminal lama. Keberadaan terminal lama yang kini sudah berganti menjadi Taman Kota Andhang Pangrenan tetap menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat Kampung Sri Rahayu. Mereka yang memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang minim, tidak mampu bersaing di pasaran kerja. Sebagian besar penduduk Kampung Sri Rahayu menggangtungkan hidupnya pada aktivitas kehidupan jalanan. Lain halnya dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan, mereka lebih memilih bekerja di sektor formal maupun informal. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	2	0,38
2	TNI	1	0,19

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
3	Guru	2	0,38
4	Wiraswasta	14	2,67
5	Karyawan Swasta	25	4,77
6	Wartawan	1	0,19
7	Aktivis LSM	1	0,19
8	Pedagang	60	11,45
9	Nelayan	1	0,19
10	Petani	1	0,19
11	Buruh	69	13,19
12	Buruh Harian Lepas (BHL)	29	5,56
13	Penyedia Jasa Uang	8	1,52
14	Pemulung	14	2,67
15	Pengemis	42	8,01
16	Pengamen	36	6,87
17	Pekerja Seks Komersial (PSK)	19	3,62
18	Tidak Bekerja (Nganggur)	37	7,06
19	Belum Bekerja	162	30,9
	Jumlah	524	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk (13,19%) bekerja sebagai buruh. Di urutan kedua ialah pedagang, penduduk yang berdagang kebanyakan berasal dari warga RT 04. Urutan selanjutnya ialah pengemis (8,01%), pengamen (6,87%), dan pengangguran (7,06%). Warga yang bekerja sebagai pengemis dan pengamen kebanyakan berasal dari RT 05. Mereka setiap harinya menjadi pengemis dan pengamen di pasar, perempatan lampu merah, terminal, bahkan sampai ke luar kota seperti Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap. Menjadi Pengamen dan pengemis merupakan alternatif pekerjaan yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menjadi pengemis dan pengamen dapat diibaratkan seperti penyakit yang menular dan turun temurun di setiap generasinya. Karena untuk menjadi pengemis dan pengamen tidak membutuhkan skill yang tinggi, pekerjaan yang sangat mudah dilakukan oleh siapa saja tanpa membutuhkan modal.

Gambar 3.6.: Salah satu pekerjaan warga sebagai pemulung saat berbincang-bincang dengan Tim Assessment.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No.16 Tahun 2015 tentang Larangan Memberikan Uang kepada Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan di Tempat Umum. Dengan adanya Perda tersebut sempat menimbulkan kerusuhan, sehingga warga berdemo di depan Kantor Kabupaten Banyumas. Hal itu terjadi karena ada oknum yang memprovokasi massa tentang Perda tersebut; Mereka berdalih bahwa hak-hak mereka terampas untuk mencari nafkah di jalanan.

Efektivitas Perda tersebut masih minim, nyatanya masih banyak orang yang memberikan uang kepada para pengemis, pengamen, gelandangan, dan anak jalanan. Mereka berdalih memberikan uang itu bentuk dari sedekah dan itu merupakan bagian dari ibadah. Apabila Pemda Kabupaten Banyumas benar-benar konsisten dengan peraturan tersebut maka harus membentuk satgas pengawasan di setiap jalan agar peraturan tersebut berjalan, dan permasalahan pengemis, pengamen, gelandangan, dan orang terlantar dapat tertangani.

Jumlah Tanggungan Keluarga. Secara keseluruhan jumlah Kepala Keluarga di Kampung Sri Rahayu sebanyak 189 KK yang terdiri dari RT 04 sebanyak 52 KK dan RT 05 sebanyak 127 KK, sisanya terdapat 10 KK yang terdata di kedua RT tersebut. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Memiliki Tanggungan	47 KK	24,87
2	1 – 2	85 KK	44,98
3	3 – 4	36 KK	19,04
4	>5	21 KK	11,11
	Jumlah	189 KK	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Tabel 3.5. menunjukan bahwa jumlah sebagian besar penduduk memiliki jumlah tanggungan keluarga dengan interval 1-2 sebanyak 85 KK atau 44,98%. Sebanyak 47 KK atau 24,87 % tidak memiliki tanggungan berada di urutan kedua. Mereka yang tidak memiliki tanggungan rata-rata merupakan penduduk pendatang yang bekerja di sekitar Purwokerto, mereka ngekos di daerah Kampung Sri Rahayu. Sebanyak 21 KK yang memiliki tanggungan lebih dari 5 orang, mereka terdiri dari beberapa keluarga dan tinggal dalam satu atap.

Status Rumah. Status kepemilikan rumah menjadi sangat penting apabila mengkaji tentang kemiskinan di sebuah daerah. Kampung Sri Rahayu yang identik dengan perkampungan yang kumuh menjadi sebuah gambaran bahwa suasana di daerah tersebut jauh dari kata nyaman. Kita dapat menemukan pemukiman yang padat dengan bangunan-bangunan semi permanen yang tidak beraturan. Untuk lebih mengetahui secara rinci komposisi penduduk berdasarkan status kepemilikan rumah dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Status Rumah

No	Status Rumah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Milik Sendiri	42 KK	22,24
2	Kontrak	96 KK	50,79
3	Kost	34 KK	17,98
4	Menumpang	17 KK	8,99
Jumlah		189 KK	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Tabel 3.6. menunjukkan bahwa, sebagian besar penduduk Kampung Sri Rahayu tinggal dengan status mengontrak sebanyak 96 KK (50,79%). Ada yang mengontrak tanah dan bangunan, dan ada juga yang mengontrak tanah saja dan membangun rumah sendiri. Status kepemilikan rumah milik sendiri berada di urutan kedua yaitu sebanyak 42 KK atau 22,24%. Mereka yang memiliki rumah maupun tanah sendiri merupakan warga yang memiliki pekerjaan tetap, dan merupakan tuan tanah. Sebanyak 34 KK atau 17,98 % memilih untuk kos, biasanya jumlah tanggungan keluarga relatif sedikit dan kebanyakan para pendatang yang mengadu nasib bekerja di Purwokerto. Sebanyak 17 KK atau 8,99% dengan status menumpang. Biasanya ini dialami oleh keluarga muda yang masih ikut menumpang dengan orangtua, atau ada juga famili lain yang ikut menmpang namun dengan KK terpisah.

C. KONDISI SOSIAL EKONOMI KAMPUNG SRI RAHAYU

1. Karakteristik Ekonomi Secara Umum

Kampung Sri Rahayu memang identik dengan wilayah kemiskinan perkotaan. Sebagian besar warga adalah tunawisma dengan penghasilan yang diperoleh dari jalanan. Mereka kebanyakan tinggal di *gubuk reyot* dengan cara mengontrak dari pemiliknya. Pekerjaan utama yang pada umumnya di geluti oleh warga Kampung Sri Rahayu ialah pengemis, pencopet, waria, pekerja seks komersial, pengamen, pemulung, dan berbagai profesi yang identik dengan kehidupan jalanan. Namun tidak semua warga bekerja seperti itu, ada juga warga yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, buruh, dan karyawan swasta, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Penghasilan mereka pun beragam mulai dari Rp 100.000/bulan hingga lebih dari Rp 1.000.000/bulan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim mengenai gambaran aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga Kampung Sri Rahayu, pada pagi hari warga yang berasal dari kalangan pencopet, pengamen, pemulung, dan pengemis mulai berangkat kerja dan menyebar ke pusat keramaian seperti terminal, pasar, perempatan lampu merah, dan lain-lain. Namun, pada saat menjelang petang seusai Maghrib, giliran para waria dan PSK yang mengais rezeki di tempat-tempat pangkalan. Pelanggannya kebanyakan juga berasal dari kalangan masyarakat bawah, seperti tukang becak dan tukang ojek.

2. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Kemunculan Kampung Sri Rahayu tidak terlepas dari keberadaan terminal lama. Kota Purwokerto pada saat itu berkembang menjadi kota transit di Jawa Tengah. Aksesibilitas Kota Purwokerto menjadi daya tarik bagi para pelaku urbanisasi. Sebagian besar para migran berasal dari luar daerah berbondong-bondong datang melalui terminal. Sayangnya para pendatang yang tiba di terminal didominasi oleh mereka yang tidak memiliki bekal yang mumpuni untuk hidup di kota.

Dengan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, pada akhirnya mereka membuat hunian dan tinggal berkelompok di kawasan terminal. Seiring berjalannya waktu, jumlah migran semakin bertambah, sehingga membentuk sebuah pemukiman yang berkerakter kampung di tengah kota.

Keberadaan terminal lama menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat Kampung Sri Rahayu. Mereka yang memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang minim tidak mampu bersaing di pasaran kerja. Masyarakat menggangtungkan hidupnya pada aktivitas terminal lama, sebagian besar bekerja sebagai pengemis, pengamen, waria, dan pekerja seks komersial.

Kota Purwokerto terus mengalami perkembangan, hal ini berimbas pada tuntutan peningkatan terminal guna memberikan pelayanan transportasi yang prima. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memindahkan terminal ke lokasi yang baru dan lebih luas. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat Kampung Sri Rahayu yang menggantungkan pekerjaannya dengan memanfaatkan keberadaan terminal.

Seiring dengan pertumbuhan Kota Purwokerto yang pesat, kondisi di kawasan Kampung Sri Rahayu telah berkembang menjadi kawasan pemukiman modern. Perumahan yang mulai bermunculan Perumahan Wartawan Suara Merdeka (1989), Perumahan Puri Hijau (1995), Perumahan Damri (1997), dan Perumahan Puri Indah (2000). Kawasan terminal lama yang sempat terbengkalai kini sudah berubah menjadi ruang publik bagi masyarakat Kota Purwokerto dengan dibangunnya taman kota dan rekreasi “Andhang Pangrenan”. Meskipun telah terjadi perkembangan kawasan yang cukup pesat di sekitarnya, tidak mempengaruhi keberadaan Kampung Sri Rahayu. Kampung Sri Rahayu tetap menjadi permukiman kumuh di tengah

kota. Hingga saat ini masyarakat Kampung Sri Rahayu tetap menjadi hunian bagi para migran yang mengadu nasib di kota.

3. Pola Perumahan

Secara umum konsep pemukiman di Kampung Sri Rahayu cenderung tidak beraturan. Kondisi yang tidak teratur dan tidak terurus, jalanan yang sempit dan tidak memiliki halaman. Dihuni oleh banyak penduduk karena adanya urbanisasi yang tak terkendali. Sebagian besar rumah-rumah yang ada di daerah tersebut merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas yang tidak layak, ada yang terbuat dari papan dan bilik beratap seng atau asbes. Sebagian rumah juga sudah ada yang permanen, tembok, beralaskan keramik, dan beratap genting.

Gambar 3.6.: Kondisi perumahan, sanitasi, dan drainase Kp. Sri Rahayu

Kondisi sanitasi yang rendah, hal ini ditandai dengan lingkungan fisik yang jorok, saluran air yang tidak lancar. Kelangkaan air bersih, walaupun PAM sudah masuk ke kampung tersebut, namun hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.

4. Interaksi Sosial Secara Umum

Problematika sosial yang kompleks membuat Kampung Sri Rahayu ini menjadi unik. Bagaimana tidak, dengan mayoritas penduduk yang berasal dari luar daerah Kabupaten Banyumas serta mata pencaharian seperti pengemis, pengamen, pekerja seks, bahkan mafia dari kelas *'kroco'* hingga kelas *'kakap'* pun dapat ditemukan di

kampung ini. Masyarakat pada umumnya lebih mengenal kampung ini dengan Kampung Dayak. Penamaan Kampung Dayak sendiri tidak ada hubungannya dengan suku Dayak yang berasal dari Kalimantan. Melainkan karena stigma masyarakat yang berasumsi bahwa pola hidup 'ndayak' adalah pola hidup yang tidak sistemik, tidak teratur, atau bisa dikatakan kacau, dan seenaknya sendiri.

Kehidupan di kampung ini pun bisa dikatakan tidak teratur, mengingat wilayah berada di pemukiman padat dan kumuh mewarnai lokasi Kampung Sri Rahayu. Tidak hanya itu saja, terjerat hutang rentenir menjadi hal yang biasa.

D. GAMBARAN INFORMAN

Assessment yang sekarang kami lakukan adalah assessment tahun ke dua. Adapun tahun pertama yaitu pada tahun 2015 sudah dilakukan terhadap 100 warga. Sama, tahun 2016 ini kami mengambil informan sebanyak 100 orang.

1. Karakteristik Informan

*Usia.*Informan yang mengikuti kegiatan assessment psikososial ini berjumlah 100 orang yang telah memenuhi kriteria sebagai objek assessment, yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik laki-laki atau perempuan berusia antara 10 – 80 tahun, dan merupakan warga Kampung Sri Rahayu (RT 04 dan RT 05). Karakteristik Informan berdasarkan usia dan jenis kelamin ditunjukkan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 3.6.: Karakteristik Informan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Kategori Umur	Jenis Kelamin		Frekuensi	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	10 – 20 tahun	20	6	26	26
2	21 – 30 tahun	10	7	17	17
3	31 – 40 tahun	9	9	18	18
4	41 – 50 tahun	6	5	11	11
5	51 – 60 tahun	15	7	22	22
6	>61 tahun	4	2	6	6
	Jumlah	64	36	100	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Tabel 1. menunjukkan sebagian besar Informan (68%) berusia antara 21 – 60 tahun adalah usia produktif. Hal tersebut dapat beresiko menjadi PMKS jika keberfungsian sosial pada usia tersebut mengalami kendala.

Selain usia, jenis kelamin juga berpengaruh terhadap ketidakberfungsian sosial. Berdasarkan Tabel 1. sebagian besar Informan (64%) berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan (36%). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki beresiko menjadi PMKS. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil pengamatan, bahwa warga Kampung Sri Rahayu yang berjenis kelamin laki-laki dalam kesehariannya hanya menghabiskan waktu dengan merokok, nongkrong di warung, berupaya mendapatkan uang dengan cara yang instan (berjudi, mengemis, dan mengamen), berdiam diri di rumah, dan tidak bekerja.

Pendidikan. Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Informan laki-laki dengan rentang usia masih produktif beresiko menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibandingkan dengan perempuan. Selain usia dan jenis kelamin, pendidikan juga berpengaruh terhadap ketidakberfungsian sosial. Karakteristik Informan berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan dalam Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 3.7.: Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	35	35
2	SD	43	43
3	SLTP	10	10
4	SLTA	12	12
Jumlah		100	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagain besar Informan (43%) memiliki tingkat pendidikan SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Informan rendah. Walaupun pendidikan mereka rendah tetapi mereka memiliki

potensi yang dapat dikembangkan. Pernyataan ini di dukung dari hasil wawancara, bahwa warga Kampung Sri Rahayu memiliki keterampilan seperti berdagang, perbengkelan, menjahit, kesenian, dan lain-lain. Apabila potensi tersebut tidak dapat dikembangkan dan disalurkan maka mereka beresiko menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pekerjaan. Selain pendidikan, pekerjaan juga memiliki pengaruh terhadap ketidakberfungsian sosial. Karakteristik Informan berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan dalam Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3.8.: Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Belum Bekerja	7	7
2	Tidak Bekerja (Nganggur)	10	10
3	Buruh Harian Lepas (BHL)	15	15
4	Buruh	23	23
5	Pengamen	19	19
6	Pengemis	10	10
7	Pekerja Seks Komersial (PSK)	8	8
8	Pemulung	5	5
9	Pemberi Jasa Uang	3	3
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar Informan (23%) bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak dapat terserap ke dalam pasar kerja. Pada akhirnya mereka pun bekerja serabutan seperti pengamen (19%), pengemis (10%), pemulung (5%), dan pekerja seks komersial (8%), hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Informan yang tidak bekerja (10%) di dominasi oleh remaja putus sekolah. Sedangkan Informan yang belum bekerja (7%) di dominasi oleh anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin.

Kehidupan yang serba sulit membuat keadaan ini dijadikan kesempatan oleh beberapa pihak (3%) dengan memberikan jasa pinjaman uang. *Iming-iming* proses yang mudah dengan bunga yang terjangkau, membuat warga memanfaatkan kesempatan ini tanpa berfikir panjang. Akhirnya mereka pun terjebak dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan. Kondisi ini dirasakan sebagian besar warga Kp. Sri Rahayu yang reratanya terjebak pada hutang dimana para jasa peminjam uang memberikan pinjaman dengan sistem pinjaman pokok dan bunga yang dalam istilah mereka samakan dengan *rentenir*. Terdapat pula beberapa warga yang meminjam uang untuk membeli kebutuhan sekunder seperti TV atau lainnya dengan sistem pinjaman pokok, bunga dan uang sewa terhadap barang yang mereka beli. Keinginan memiliki benda/barang yang diluar kemampuan mereka pun dapat menjadi sarana bagi rentenir untuk lebih leluasa memerankan sebagai pengendali perekonomian dan semakin menjerat masyarakat pada ketergantungan ekonomi. Lilitan hutang ini menjadikan masyarakat Kp.Sri Rahayu berada dalam konsisi miskin dan tidak dapat berkembang.

Penghasilan. Pekerjaan yang tidak tetap (serabutan) mempengaruhi penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Karakteristik Informan berdasarkan penghasilan per bulan ditunjukan dalam Tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 3.9.: Karakteristik Informan Berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan Per Bulan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Memiliki Penghasilan	17	17
2	Penghasilan Tidak Tetap/Pasti	15	15
3	Rp 100.000 – Rp 500.000	44	44
4	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	13	13
5	>Rp 1.000.000	11	11
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar

Informan (44%) berpengahasilan setiap bulannya antara Rp 100.000 – Rp 500.000. Mereka sebagian besar bekerja sebagai buruh, pemulung, pengamen, dan pengemis. Informan yang penghasilan setiap bulannya antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik, penjaga toko, dan pedagang. Sedangkan Informan yang penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp 1.000.000 bekerja sebagai penyedia jasa uang dan pekerja seks komersial.

Jumlah Tanggungan Keluarga. Informan yang menjadi sasaran kami terdiri atas kepala keluarga, ibu, remaja, dan anak-anak usia pelajar. Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga ditunjukkan dalam Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 3.10.: Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Memiliki Tanggungan	37	37
2	1 – 2	20	20
3	3 – 4	27	27
4	>5	16	16
	Jumlah	100	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar Informan (37%) tidak memiliki tanggungan. Informan yang tidak memiliki tanggungan dikarenakan dalam keluarga mereka berstatus sebagai anak. Hasil pengamatan dilapangan, walaupun mereka berstatus sebagai anak, mereka bekerja sebagai pengemis atau pengamen untuk membantu perekonomian keluarga.

Informan yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tiap bulannya antara Rp 100.000 – Rp 500.000 sebagian besar memiliki tanggungan antara 3 – 4 orang. Apabila di asumsikan setiap harinya keluarga harus mengeluarkan uang untuk keperluan makan sebesar Rp 20.000 (untuk 3-4 orang), maka ia harus mengeluarkan uang Rp 600.000 setiap bulannya. Dengan penghasilan tersebut tentu saja tidak dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Maka tak heran jika Informan memilih untuk meminjam kepada penyedia jasa keuangan sebagai solusi tercepat bagi masyarakat Kp.Sri Rahayu dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

Status Kepemilikan Rumah. Karakteristik Informan berdasarkan status kepemilikan rumah ditunjukkan dalam Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 3.11.: Karakteristik Informan Berdasarkan Status Rumah

No	Status Rumah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Milik Sendiri	14	14
2	Kontrak	46	46
3	Kost	27	27
4	Menumpang	13	13
Jumlah		100	100

Sumber : Data Hasil Assessment Psikososial Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar Informan (46%) mengontrak rumah. Informan yang mengontrak rumah biasanya memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 3 – 5 orang. Mereka mengontrak tanah dan bangunan, dengan membayar iuran antara Rp 150.000 – Rp 300.000 setiap bulannya. Sedangkan Informan yang ngekos (27%) memiliki jumlah tanggungan keluarga relatif sedikit antara 1 – 2 bahkan hidup sendiri, iuran yang di bayar setiap bulannya sebesar Rp 100.000 – 250.000. Informan yang memiliki rumah sendiri (14%), mereka memiliki bangunan sendiri namun mereka menyewa tanah yang dibayar Rp 1.400.000 per dua tahun.

***

BAB IV

HASIL ASSESSMENT PSIKO SOSIAL KAMPUNG SRI RAHAYU

A. MODEL DAN TEKNIK *ASSESSMENT* YANG DIPILIH

Assessment merupakan satu tahapan dalam proses pemecahan masalah. Secara umum dapat diartikansebagai memutuskan atau menilai sesuatu hal. Hal ini menandakan bahwa di dalam proses asesmen terdapat aktivitas yang didasarkan pada keterampilan tertentu yang berkompeten untuk memutuskan hal-hal menurut nilai-nilai dan standart tertentu untuk melakukan penilaian. Dengan kata lain *assessment* berarti memahami. Ian O'Connor dkk (2006: 81) menyatakan:

> *"Assessment is the process of coming to understand the nature of interactions between people and social arrangements in order to understand the areas and sources of tension between people and social arrangements. Assessment is undertaken to facilitate purposeful intervention, that is, to aid in the development of strategies and tasks which assist people to develop power and control over their own lives and to form equitable relationships* (*Assessment* adalah proses untuk memahami interaksi di antara orang dan tatanan sosial dalam rangka memahami arena dan sumber-sumber tekanan antara keduanya. *Assessment* itu dilakukan untuk memfasilitasi intervensi agar berhasil maksimal,

dengan cara membantu pengembangan strategi dan agenda yang bisa membantu orang untuk mengembangkan kekuatan dan kontrol terhadap kehidupannya sendiri dan untuk mencipta hubungan yang berkeadilan).”

Secara teoritis, ada dua model *assessment*, yaitu *assessment* partisipatif dan non-partisipatif. *Assessment* partisipatif terbedakan dari non-partisipatif pada semua tahapannya. Assessment partisipatif melibatkan peran aktif warga pada semua tahapannya secara hakiki, bukan meniadakannya apalagi partisipasi semu. Sebaliknya, *assessment* non-partisipatif tidak melibatkan masyarakat sebagai partisipan, hanya sebagai objek kegiatan, dan keputusan hasil *assessment*-nya juga dilakukan oleh *outsider*.

1. Model

Kami melakukan *assessment* dengan menggunakan model yang mengikutsertakan masyarakat, yaitu *Methodology for Participatory Assessment* (MPA). MPA adalah sebuah metodologi untuk melakukan *assessment* secara partisipatif. Metodologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat yang mengalami masalah adalah lebih tahu tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, dan kemampuan apa yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini disebut juga bisa disebut dengan istilah *bottom-up process* atau *change from below* apabila kita meminjam istilah oleh Jim Ife (2002: 119; dan 2009).

Terkait dengan *assessment* kami yang waktunya terbatas, maka kami mengambil pilihan *rapidassessment* dimana tools yang kami gunakan di dalam MPA adalah cara cepat dalam memahami masyarakat Kampung Sri Rahayu. Mukherjee dkk (2000: 13) menyebutkan bahwa MPA minimal ada empat maksud, yaitu:

a. Aktivitas partisipasi adalah proses belajar bagi masyarakat beserta kelompok-kelompok yang ada di dalamnya;
b. Diskusi terbuka pada forum FGD menyediakan beragam informasi yang kredibel dan relevan;
c. Metode partisipatif mampu mendapatkan informasi yang cukup dalam waktu yang singkat, dan;

d. Proses yang partisipatif itu melibatkan masyarakat itu sendiri untuk menemukan potensi dan masalahnya serta menancapkan komitmen untuk bertindak keluar dari masalah mereka.

Di dalam metode MPA, menurut Dr. Linda Mayoux, ada sejumlah teknik atau *tools* yang bisa dikelompokkan menurut dua ketegori:

a. MPA untuk visualisasi:
   1) Diagram*: diagram flow/casual, diagram venn/institusional, diagram sistem, kartu bulatan (pie chart), histogram.*
   2) Ranking*: Preference rangking and scoring, pairwise ranking, direct matrix ranking, ranking by voting, dan wealth ranking.*
   3) Analisis tren waktu*: Historical and future (visioning) mapping, time tren chart, oral histories.*
   4) Teknik pemetaan*: mobility mapping, social mapping, transect walk.*
   5) Kalender*: Seasonal calender, historical seasonal calender.*
   6) *Ethno-clasification: Proverb, stories, indigenous categories and terms, taxonomies.*
b. MPA untuk kelompok/tim:
   1) *Focussed group discussion (FGD)*
   2) *Role-play*
   3) *Participatory workshop*

Berdasarkan penjelasan di atas, kami memutuskan untuk menggunakan model partisipatif dalam melakukan *assessment*, yaitu MPA.

2. Teknik

Teknik-teknik yang kami gunakan untuk melakukan *assessment* adalah sebagai berikut:

a. *Community Involvement* atau Berbaur dengan Masyarakat

   Kami berusaha berbaur untuk bisa diterima di semua level masyarakat, dari para tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hal ini kami lakukan dengan cara berkunjung ke lokasi, yaitu di rumah Pak Rujito (Ketua RW 10), Pak Chen

Fat Cam (ketua RT 05), Pak Rasmin (Ketua RT 04), Pak Rasmin (Mantan Ketua RT 04). Kunjungan ini kami lakukan berkali-kali sehingga hubungan yang "cair" dapat terwujud.

Gambar 4.1: Tim assessment bermain bersama anak-anak Kp. Sri Rahayu

Gambar 4.2 : Tim assessment berkunjung ke rumah warga.

Kami juga banyak berkomunikasi dengan masyarakat dengan menyambangi berbagai level masyarakat, ngobrol dengan warga seperti Ibu Daryono (penjual lotek) dan para warga yang kebetulan ada di warungnya; berkunjung ke rumah Syarikun (tukang pijat refleksi) yang termasuk sesepuh warga karena sudah tinggal di Kp. Sri Rahayu sejak tahun 1968; dan dengan warga-warga lainnya dalam kesempatan berbeda.

b. *Studi* dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum profil Kp. Sri Rahayu, kondisi geografis, demografis, permasalahan sosial ekomoni, dan kemiskinan secara kuantitatif. Studi dokumentasi, kami lakukan terhadap dokumen resmi yang ada di pengurus RT.

c. *Observasi*

Observasi digunakan untuk mengetahui tentang kondisi geografis dan demografis serta sosio-kultural masyarakat Kp. Sri Rahayu. Observasi yang kami lakukan adalah proses yang simultan dan terus berjalan selama kegiatan assessment berlangsung (*on going process). *Observasi juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan kelurahan setempat, selain kami

sebagai observer secara langsung kami juga melibatkan masyarakat, baik tokoh-tokoh Kp. Sri Rahayu.

d. *Wealth Clasification atau Wealth Ranking*

Wealth Clasification (klasifikasi kesejahteraan) dilakukan untuk melakukan *assessment* tentang tingkat kesejahteraan warga, kebutuhan, masalah, dan potensi Kp. Sri Rahayu. Hal ini mengacu kepada definisi kebutuhan yang dikemukakan oleh Bradshaw (1972) yang meliputi *Normative Need, Perceived Need, Expressed Need, dan Relative Need* (Peter M. Kettner, 2008). Klasifikasi kesejahteraan adalah teknik mendefinisikan kesejahteraan menurut persepsi masyarakat itu sendiri (*perceived needs*).

Gambar 4.3 : Warga Kp. Sri Rahayu sedang mendefinisikan kaya/ miskin berdasarkanaspek pendidikan, rumah, kepemilikan, dan penghasilan.

e. *Indepth Interview* atau Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau *Indepth Interview* merupakan suatu bentuk teknik wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur, sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Untuk hal ini, kami melakukan kegiatan wawancara terhadap masyarakat dan pihak terkait. Dari hal ini terketahui berbagai sistem, baik *inisiator system, change agent system, client system, target system, support system, controlling system, host and implementing system, dan action system*.

f. *Diskusi* Kelompok Terfokus atau *Focussed Group Discussion*

Diskusi kelompok terfokus atau Focussed Group Discussion (FGD) adalah salah satu *tool* untuk *rapid assessment* atau assessment cepat (Kumar, 1987). yang kami gunakan dalam mengungkap dan memahami potensi dan permasalahan masyarakat Kp. Sri Rahayu, khususnya terkait pemetaan PMKS dan PSKS. Kami melakukan FGD beberapa kali untuk membahas topik berbeda. FGD pertama dengan Ketua RT 05, Bapak Chen Fat Cam dan ke dua dengan Bapak Rasmin (Mantan Ketua RT 04).

g. *Community Meeting* atau Rembug Warga

Community meeting (CM) atau *public meeting* (PM) atau rembug warga merupakan salah satu *tool* dalam melakukan generalisasi terhadap data kualitatif. CM juga merupakan *tool of rapid assessment*. CM/PM dapat digunakan untuk mendapatkan informasi seputar perilaku, pengalaman, opini/pendapat, dan *assessment* dari masyarakat (Kumar, 1987).

Kami menggunakan CM beberapa kali. CM pertama membahas topik w*ealth ranking* atau *wealth classification* atau klasifikasi kesejahteraan, historical mapping (memetakan sejarah kampung), dan Logical Framework Analisis (LFA). Hasil dari CM ini kami pertajam melalui berbagai pertemuan informal dengan tokoh masyarakat dan warga dalam *indepth interview.*

B. PROSES ASSESSMENT

Proses *assessment* yang kami lakukan adalah dengan mengikuti pentahapan profesional pekerjaan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Sosial

Persiapan sosial, secara teoritik sebenarnya bukan bagian dari tahapan *assessment*. Persiapan sosial atau *social preparation* ataupun *social initiation* adalah murni aktivitas kognitif tim yang dimulai dengan menentukan fokus topik, penentuan lokasi, mereview literatur yang terkait. Namun karena untuk melakukan kegiatan assessment ini diperlukan izin administratif dari pemerintah setempat, maka proses perizinan masuk di dalam tahap persiapan

sosial. Hal-hal yang kami dalam persiapan sosial adalah sebagai berikut:

a. Diskusi internal.

   Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang sama dalam memenej waktu tiga bulan kegiatan assessment dengan mendapatkan hasil maksimal dalam semua tahapan pekerjaan sosial. Diskusi internal juga dimaksudkan agar tim bisa mereview beragam landasan ilmiah yang sesuai terkait dengan lokasi yang kami sedang garap, yaitu Kp. Sri Rahayu. Kegiatan pembekalan dilakukan di kampus IAIN, Purwokerto, di Ruman Ketua Tim, dan di kafe Warung Inyong.

b. Mereview literatur terkait

   Dalam kegiatan ini kami membuat kajian ilmiah dengan mencocokkan lokasi yang menjadi fokusassessment psikososial kami, yaitu Kp. Sri Rahayu. Review literatur ini kami susun bersamaan dengan kegiatan assessment di lapangan. Tujuannya agar kami bisa me-*refreshment* setiap temuan lapangan dengan landasan ilmiah dalam berpraktik secara profesional. Hasilnya dari review literatur tersebut didiskusikan di dalam tim agar diperoleh hasil yang paling tepat dan lengkap. Diskusi ini diikuti oleh Ketua Tim, yaitu Kholil Lur Rohman, M.S.I, Heru Sunoto, MPS.Sp., Izzah Purwaningsih, S.Sos., Taufi Akbar, S.ST., dan Mahbub Nasir, S.Si.

c. Mengurus perizinan

   Kami mengurus perizinan pada awal bulan Agustus 2016. Hal ini diawali dengan kami menghubungi Lurah Karang Klesem, Beberapa tokoh Kp. Sri Rahayu, Koramil Purwokerto Selatan, Camat Purwokerto Selatan, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

2. *Assessment* Awal

   Assessment awal dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal kondisi Kp. Sri Rahayu secara keseluruhan, baik aspek geografis, demografis, sosial budaya, potensi, dan kebutuhannya. Tahapan assessment awal, kami laksanakan pada bulan Agustus 2016. Kegiatannya berupa:

a. Pertemuan dengan Lurah, Camat, dan Koramil. Caranya adalah kami mendatangi rumah Lurah dan berdiskusi tentang kemasyarakatan Kp. Sri Rahayu; mendatangi markas Koramil Purwokerto Selatan dan mendiskusikan secara umum keadaan Kp. Sri Rahayu. Demikian juga dengan Camat Purwokerto Selatan.
b. Diskusi bersama Tokoh Kampung. mengawali assessment, kami melakukan menemui para tokoh kampung untuk mendapatkan gambaran umum dan agak mendetail tentang potret masyarakat Kp. Sri Rahayu. Tokoh-tokoh tersebut adalah Pak Rujito (Ketua RW 10), Pak Chen Fat Cam (Ketua RT 05), dan Pak Rasmin (EksKetua RT 04).

Gambar 4.4 : Assessment awal dengan berkunjungan ke para tokoh.

c. Melakukan penelusuran wilayah sekilas atau *Snapshoot*. Kegiatan ini kami laksanakan di sudut-sudut Kp. Sri Rahayu. Kami masuk lebih dekat dengan setiap tokoh kampung. Kegiatan ini dilakukan selama dua pekan, yaitu pekan ke dua hingga ke empat di bulan Agustus 2016.

Gambar 4.5 : Penelusuran wilayah dan berkomunikasi dengan Ketua RW 10 dan mantan Ketua RT 04.

d. *Home visiting* ke beberapa tokoh untuk melengkapi potret Kp. Sri Rahayu. Para tokoh tersebut adalah Warsono (Lurah), Pak Rujito (Ketua RW 10), Pak Chen Fat Cam (Ketua RT 05), dan Pak Rasmin (Mantan Ketua RT 04).Kegiatan dilakukan selama bulan Agustus 2016.

Gambar 4.6 : Assessment awal dengan konjungan rumah ke tokoh dan ngobrol di salah satu warung lotek warga.

3. *Assessment* Lanjutan

   a. Wawancana mendalam dengan tokoh RT 04 dan tokoh RT 05. *Assessment* lanjutan kami lakukan di Kp. Sri Rahayu yaitu di RT yaitu RT 04 dan RT 05, meskipun lebih banyak menyorot RT 04 karena jumlah penduduknya yang lebih banyak (150 KK) dan dalam konsisi miskin. Hal ini tergambarkan dari hasil *assessment* awal, kami menyimpulkan bahwa kondisi masyarakat yang tingkat ekonominya paling rendah untuk kajian kemiskinan adalah di RT 04, sedangkan RT 05 merupakan pemekaran dari RT 02 yang mayoritas warganya (50 KK) adalah dari etnis tionghoa yang tinggal diperumahan yang secara sosial ekonomi lebih mapan. Tahapan *assessment* lanjutan ini kami mendatangi Ketua RW 10, Bapak Rujito, Bapak Rasmin (mantan ketua RT 04) dan Bapak Chen Fat Cam (Ketua RT 05). dan sampling secara acak kepada warga yang kami datangi ke rumahnya.

Gambar 4.7 : Tim Assessment bersama tokoh kampung dan TKSK sedang diskusi tentang permasalahan kampung.

Gambar 4.8 : Kunjungan Tim Assessment ke rumah-rumah warga dan berdiskusi dengan visi hidup ke depan yang lebih baik.

b. *Community Meeting* atau Rembug Warga. Kami juga melakukan "Rembug Warga" dengan 100 orang warga Kp. Sri Rahayu, yaitu 50 orang dari RT 04 dan 50 orang dari RT 05. Acara dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 dan dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan, para Pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyumas.

Gambar 4.9 : Rembug warga di balai Kelurahan Karang Klesem di hadiri 100 orang dari Kp. Sri Rahayu

c. *Focussed Group Discussion*. Aktivitas berikutnya yang kami lakukan bersama warga Kp. Sri Rahayu adalah *Focussed Group Discussion* (FGD). Diskusi ini membahas tentang *history of community* (sejarah kampung), *wealth clasification* (klasifikasi kesejahteraan), *logical framework analysis*/LFA (cara berfikir logis untuk menyelesaikan permasalahan warga.

Gambar4.10 : Suasana FGD bersama warga dan hasilnya yang disampaikan oleh warga di kertas plano.

d. Melakukan *transect walk* atau penelusuran wilayah atau survey kampung sendiri (SKS). Kegiatan ini kami laksanakan di kedua RT tersebut. Kami bersama tokoh kampung masuk lebih dekat ke setiap gang dan saat berjumpa dengan warga langsung mendiskusikan apa yang penting di setiap sudut kampung tersebut.

Gambar 4.11 : Tim bersama tokoh kampung melakukan *transect walk*

Gambar4.12 : Hasil ecomap buatan asli warga sendiri.

C. HASIL ASSESSMENT

1. Hasil *Assessment* Awal

   Assessment awal, sebagaimana yang kami jelaskan pada "proses assessment" adalah dilaksanakan dengan menggali informasi dari berbagai tokoh warga, sesepuh kampung, dan aparat, baik sipil maupun TNI. Kami bersama para tokoh masyarakat

setempat melakukan *assessment* partisipatif. Teknik *assessment* yang digunakan adalah: (i) Interview tak terstruktur, (ii) Rembug warga pertama atau c*ommunity meeting*, (iii) *snapshoot*, (iv) *Home visit* ke sejumlah tokoh.

Gambar 4.13: Assessment awal dengan *Transect walk* dan home visit di Kp. Sri Rahayu.

Berdasarkan empat langkah dalam mendapatkan data dan dilakukan *assessment* partisipatif, kesimpulan kondisi sosial-ekonomi warga Kp. Sri Rahayu adalah pada strata sosial-ekonominya mayoritasnya ekonomi miskin (76%), yang menurut warga miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp.500.000,.per bulan. Pendidikan mereka rendah, ada yang tidak lulus SD, ada yang lulus SMP, dan SMA. Warga yang sosial-ekonominya baik itu rata-rata tinggal diperumahan, yaitu di RT 5 yang mayoritasnya adalah dari etnis Tionghoa. Adapun yang sosial-ekonominya lebih rendah, rata-rata tinggal di kampung, yaitu RT 04 (150 KK). Namun, seluruh orang-orang yang kami temui dalam langkah *assessment*di RT 04, sepakat menyatakan bahwa daerah yang paling rendah tingkat sosial-ekonominya adalah RT 04. Hal itu dikuatkan dengan penyampaian Lurah Karang Klesem, mantan Ketua RT 04, dan ibu-ibu kampung tersebut. Mereka menyatakan bahwa di Kp. Sri Rahayu, warga yang jumlah miskinnya paling banyak, penerima Raskin dan penerima kartu BPJS adalah warga RT 04.

2. Hasil *Assessment* Lanjutan

   Hasil *assessment* lanjutan yang kami lakukan bersama masyarakat Kp. Sri Rahayu melalui dua kali rembug warga, *home visit*,

interview tidak terstruktur dengan para tokoh Kp. Sri Rahayu, dan *social mapping* (*transect walk* dan *ecomap*).

Tabel 1: Hasil *Wealth clasification* atau *wealth ranking*

No	Kategori	Kaya	Miskin
1	Pendidikan	▪ SMP ▪ SMA ▪ Sarjana	▪ Tidak sekolah ▪ SD ▪ SLTP
2	Rumah	▪ Permanen/Gedong ▪ Rumah kayu bagus	▪ Kayu, jelek ▪ Gedhek, reyot ▪ Numpang sama orang tua/keluarga
3	Kepemilikan	▪ Tanah banyak ▪ Punya mobil, motor	▪ Tidak punya kendaraan ▪ Tidak punya rumah ▪ Tidak punya apa-apa ▪ Tidak punya tanah
4	Penghasilan	▪ Tidak pernah kekurangan ▪ > Rp. 3 juta per bulan ▪ Penghasilan dari kebun Rp. 4.5 juta per bulan	▪ < Rp. 500 ribu per bulan ▪ Kerja serabutan ▪ Tidak kerja tetap ▪ Tidak punya modal usaha
5	Pemenuhan pangan	▪ Makan 3 kali sehari ▪ Bisa makan daging lebih dari 1 kali dalam seminggu	▪ Makan sehari 1 kali ▪ Tidak pernah/jarang makan daging ▪ Tidak tau besok bisa makan atau enggak

Berdasarkan tabel di atas, kondisi orang miskin dan orang kaya menurut warga Kp. Sri Rahayu adalah sangat jelas. Persentase warga miskin dibandingkan orang kaya adalah 89% berbanding 11 %. Ini artinya Kp. Sri Rahayu dengan permasalahan sosial ekonomi yang kompleks, mencerminkan sebagai potret kemiskinan kota. Hal ini karena kampung ini terbentuk sejak Tahun 1970-an dimana didaerah itu didirikannya terminal Purwokerto yang

sekarang lokasinnya tepat di tengah kota Purwokero. Namun, dengan dipindahkannya terminal ke lokasi lain, tidak serta merta kampung Sri Rahayu dan berbagai persoalannya hilang atau ikut berpindah, dikarenakan keterkaitan dengan kegiatan ekonomi yang sudah mereka jalani selama ini.

a. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat

1) Kemiskinan di Kp. Sri Rahayu, oleh masyarakat, didefinisikan dengan menyebutkan ciri-cirinya, yaitu (i) Penghasilan di bawah Rp. 500.000,- per bulan, (ii) Pekerjaan serabutan, mengemis, BHL, pengamen dan mengojek, (iii) rumahnya dari papan, dinding, dan atap sudah rapuh, (iv) Tidak bisa menabung, (v) Pendidikan rendah, yaitu SD dan SLTP, (vi) Menerima beras Raskin dan Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS Kesehatan).
2) Penghasilan mayoritas warga (76%) per bulan kurang dari Rp. 500.000,-
3) Mayoritas pekerjaan warga adalah serabutan, mengemis, BHL, pengamen danmengojek;
4) Pendidikan warganya adalah mayoritas (78%) sampai dengan jenjang SD dengan perincian 35% tidak tamat SD dan 43% tamat SD, beberapa lulusan SLTP, sedikit SLTA.
5) Mayoritas rumah warga (86%) adalah dengan rumah reyot, tembok menggunakan bilik/papan dan tanah bukan milik sendiri, tapi menyewa. Dari semua itu, ada 86% rumahnya tergolong tidak layak huni. Hal ini bisa karena lantainya dari tanah, bilik yang sudah rusak disana-sini, bangunan miring dan atap dari seng; kondisi rumah lembab, dan jika hujan air masuk ke dalam rumah.
6) Tidak semua keluarga memiliki rumah sendiri. Rata-rata dalam satu rumah ditempati dua atau tiga keluarga. Hal ini disebabkan anak-anak mereka setelah berkeluarga belum mapan sehingga masih *nempel* kepada orang tuanya yang dalam hal ini bukan hanya tempat tinngalnya saja yang bergantung pada orang tua namun untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan lainnya

keluarga pioner ini juga masih menggantungkan pemenuhan kebutuhannya pada orangtua, sehingga beban tanggunga norang tua secara ekonomi bertambah. Bahkan mayoritas tanah adalah tanah sewa yang dibayar setiap 2 tahun sekali seharga Rp. 1.400.000,-, sedangkan kos-kosan satu kamar rerata Rp.150.000,-.

7) Tidak ada kelompok UEP yang bisa mengelola dan mengakomodir beragam usaha warga.
8) Kebutuhan akan rumah singgah (26%) menjadi harapan dari remaja dan anak anak yang sebagian besar bekerja sebagai pengamen, asongan dan pengangguran. Keberadaan rumah singgah biyung emban di tahun 1990-an pernah menjadi ruang bersama untuk bertemu bersama-sama menuangkan harapan akan adanya perubahan dan menjadi tempat bernaung bagi mereka yang banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Rumah singgah juga dapat menjadi wahana pendidikan non-formal dan unit hynian sehingga tercipta hubungan yang positif antara penghunu dan lingkungan
9) Sebagian besar warga Kp. Sri Rahayu (25%) memerlukan pelatihan ketrampilan untuk dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga tidak lagi mengahabiskan waktu di jalanan atau menganggur.
10) Untuk dapat menyalurkan kemampuannya dan (38%) warga memerlukan modal usaha, stimulan modal untuk bersaha dengan berdagang, membuka bengkel dan menambah modal diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan, meningkatkan penghasilan, Namun pemberian modal bagi warga Kp.Sri Rahayu harus kembali dilakukan dengan pendampingan mengingat sebagian besar warga terjerat hutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tanpa pendampingan tidak mustahil modal yang diberikan akan habis untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan atau untuk membayar hutang dan pemenuhan kebutuhan sekunder.
11) Pendampingan dan penguatan mental menjadi kebutuhan bagi (11%) warga. Karena 32% masyarakat

di KP.Sri Rahayu berpenghasilan tidak tetap dan tidak berpenghasilan merupakan buruh lepas dan pengemis yanga setiap hari Jum'at memanfaatkan domain *Jum'at berkah* di Kota Purwokerto. Penghasilan dari mengemis setiap Jumat inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama satu minggu dan selebihnya mereka berhutang pada rentenir. Kemudahan mendapatkan penghasilan dengan cara cepat tanpa harus lelah membuat warga menjadikan mengemis merupakan pekerjaan yang dianggap "biasa" tanpa harus malu dalam menjalankannya. Pendampingan dan penguatan mental diharapkan mampu merubah pola pikir dari mengemis dan malas sehingga mereka tertarik untuk mencari pekerjaan yang halal.

b. Analisis Kebutuhan

Setelah dilakukan assessment terhadap 100 informan, diperoleh data kebutuhan informan sebagai berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Informan

No.	**Kebutuhan**	**Jumlah**	**Ket**
1	Rumah dan tanah	100	seluruh informan
2	Modal usaha (UEP)	38	
3	Rumah singgah	26	
4	Pelatihan keterampilan	25	
5	Pendampingan untuk penguatan mental spiritual	11	

Sumber: Data assessment, 2016.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh informan (100%) membutuhkan tempat tinggal yang layak, baik itu berupa tanah dan bangunan. Selanjutnya sebanyak 38 orang membutuhkan modal usaha. Mereka yang membutuhkan modal usaha sebelumnya memang sudah memiliki keterampilan seperti berdagang, salon, perbengkelan, dan lain-lain. Bentuk modal usaha yang diberikan bisa berupa UEP. Sebanyak 26 orang membutuhkan

rumah singgah. Mereka menginginkan adanya rumah singgah sebagai sarana untuk menyalurkan hobi, bakat, dan potensi. Selain itu juga rumah singgah dapat dijadikan sarana kegiatan pembelajaran berbasis masyarakat. Informan yang membutuhkan rumah singgah antara lain pengamen, anak jalanan, dan anak putus sekolah. Sebanyak 25 orang yang membutuhkan pelatihan keterampilan dan juga strategi pemasaran produk. Sebanyak 11 orang yang membutuhkan pendampingan mental dan spiritual, pendampingan ini sangat penting untuk pembentukan karakter manusia yang beradab dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Analisis potensi dan sumber

Analisis potensi dan sumber adalah sangat penting. Dalam hal ini kami menggunakan pendekatan *locality development*. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan *strenght perspective* yang memandang bahwa sistem target memiliki kekuatan dan potensi yang bisa digali dan digunakan dengan optimal maka akan bisa menyelesai masalahnya sendiri.

Jim Ife (2002) menjelaskan terdapat lima prinsip yang harus dihargai oleh pekerja sosial ketika akan memberdayakan masyarakat, yaitu *valuing the local principles, yaitu: (i) local knowledge, (ii) Local culture, (iii) Local resources, (iv) Local skills, and (v) Local process.*Terkait dengan analisis potensi dan sumber, terdapat beberapa pendapat tentang potensi dan sumber. Ada banyak aset di dalam masyarakat, sebagian ahli menyebut tiga jenis aset, sebagian menyebut empat, sebagian lain menyebut lima aset, dan sebagian lagi menyebutnya tujuh jenis aset. Kesemuanya adalah benar dilihat dari perspektifnya masing-masing.

Anna Haines menyebut aset komunitas berupa individu, asosiasi, institusi lokal, dan organisasi. Ferguson dan Dicken (1999) menyebut ada lima, yaitu: Fisik, manusia, sosial, politik, dan finansial. Green dan Haines (2007) menyebut ada tujuh aset, yaitu: Fisik, manusia, sosial, politik, finansial, environmental, dan budaya. Reiny, Robinson, Allen, dan Kristy (2003) menyebut ada tiga aset, yaitu manusia, publik/

fisik, dan sosial. Aset manusia terdiri atas tiga: Ketrampilan/*skill*, kemampuan/*talents*, dan pengetahuan/*knowledge*; Aset publik/fisik meliputi seluruh sarana infrastruktur fisik, termasuk bangunan sekolah dan pabrik, serta sarana lainnya; aset sosial meliputi: kepercayaan/*trust*, norma/*norm*, dan jejaring sosial/*social networks*. Semua aset di masyarakat ini apabila diarahkan secara tepat, diberdayakan dan digunakan, maka pada gilirannya akan dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka (*problems and needs*). Kami mencoba untuk menggunakan pendapat dari Reiny, Robinson, Allen, dan Kristy yang kami anggap lebih detail. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

No	Capital/Modal	*Details*/Perincian Modal
1	*Human capital* Modal Manusia	Ketrampilan/*skill*, Kemampuan/*talents*, Pengetahuan/*knowledge*
2	*Public/physical capital* Modal Publik/fisik	Seluruh sarana infra-struktur fisik, termasuk bangunan sekolah dan pabrik, serta sarana lainnya
3	*Social Capital* Modal Sosial	Kepercayaan/*trust*, Norma/*norm*, dan Jejaring sosial/*social network*.

Keterangan: Diadaptasi dari: Reiny, Robinson, Allen, dan Kristy (2003).

1) *Human capital* atau Modal Sumber Daya Manusia

   Modal manusia maksudnya adalah sumber daya manusia yang bermakna pengetahuan dan ketrampilan serta tenaga.

   a) Dari 150 KK di RT 04 dan 50 KK di RT 05, jumlah warga Kp. Sri Rahayu seluruh ibu-ibu berperan sebagai ibu rumah tangga. Ini adalah potensi yang besar untuk menjadi faktor penentu kesejahteraan keluarga; mampu menambah pendapatan keluarga, disamping suaminya yang menjadi tukang ojeg, pemulung, BHL dan serabutan;

b) Usia produktif warga Kp. Sri Rahayu sebanyak 45 %. Jumlah ini sangat potensial untuk pengembangan UEP untuk beragam usaha dengan bahan baku dan akses yang mudah diperoleh, karena Kp. Sri Rahayu lokasinya tepat di tengah kota;

c) Warga Kp. Sri Rahayu, sekalipun menjadi serabutan, pengemis, pemulung, dan ojeg, namun ada beberapa ketrampilan warga yang sudah bergabung mewujudkan UEP meski masih dikerjakan sekedarnya. Ketrampilan itu adalah membuat criping (kripik pisang/tempe). Hal ini terkuat saat rembug warga dengan ibu-ibu dan pertemuan dengan Ketua RW.

Gambar 4.14 : Rembug warga bersama masyarakat Kp. Sri Rahayu

2) *Physical capital* atau Modal Fisik Infrastruktur

Yang dimaksud dengan *physical capital* adalah seluruh sarana infrastruktur fisik, termasuk bangunan sekolah dan sarana lainnya.

a) Jalan akses masuk ke Kp. Sri Rahayu sudah diaspal.

b) Ada satu mushalla yang ada di RT 04.

c) Listrik masuk sejak tahun 1995.

Gambar 4.15 : Infrastruktur jalan akses masuk di Kp. Sri Rahayu sudah diaspal

d) Terdapat beberapa warung kelontong yang menjual beragam kebutuhan warga sehari-hari, warung tuak yang diwarung tersebut juga menjual daging biawak, ular maupun B2 dan warung lotek di pojok gang.

e) Tidak ada fasum untuk pemuda/remaja melakukan olah raga di Kp.Sri Rahayu meskipun di Tahun 1990-an terdapat lapangan voley dan sering digunakan oleh remaja, saat ini di Kp.Sri Rahayu terdapat 1 bh meja billyard dan game on line yang menjadi pusat anak muda berkumpul di siang maupun malam hari.

3) *Social capital* atau modal sosial

a) Solidaritas antar warga sangat kuat. Hal ini terlihat pada beragam kegiatan yang melibatkan seluruh elemen warga, warga kompak mengiur, seperti dalam rangka *muharroman,* dengan antusias warga mengiur untuk *nanggap ebek,* yaitu pertunjukan tari dan kuda lumping khas Purwokerto. Warga sangat mudah meminjamkan sepeda motor kepada tetangganya. Hal ini terlihat saat kami berdialog dengan salah satu warga, warga lain hilir-mudik meminjam sepeda motor untuk keperluan pribadi.

b) Di Kp.Sri Rahayu warga masih menghargai peran tokoh seperti Ketua RW, ketua RT, mantan ketua RT, dan sesepuh kampung.

c. Analisis masalah dan sistem sumber

Dalam *strenght prespective*, istilah "masalah atau *problem*" tidak digunakan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun menggunakan istilah tantangan (*challenge)*. Hal ini karena *strenght perspective* melihat kepada potensi dan kebutuhan, bukan kepada "masalah" sebagai masalah, sehingga masalah merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Berdasarkan hasil dua kali rembug warga, interview tak terstruktur kepada para tokoh, Kasus, ketua RW, dan para ketua RT diperoleh informasi tentang tantangan yang ada di Kp. Sri Rahayu adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pendapatan warga;
2. Rendahnya tingkat pendidikan warga;
3. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan warga;
4. Rendahnya semangat kebersamaan/berkelompok;
5. Rendahnya peran serta dalam aktivitas sosial kemasyarakatan;
6. Sulitnya mengakses kebutuhan papan/rumah dan ekonomi.

Dari keenam point tantangan tersebut di atas, kami mengagas bersama warga dua agenda solusi, yaitu agenda utama dan agenda tambahan. Agenda jangka panjang adalah urgensi kebutuhan papan/perumahan yang layak, termasuk di dalamnya penyediaan tanah. Agenda jangka pendek adalah urgensi pendampingan sosial dengan membuka akses pemberdayaan sosial (permodalan UEP). Sistem sumber yang bisa digunakan untuk menyasar agenda utama dan agenda tambahan adalah sebagai berikut:

POTENTIAL ACTION SYSTEMS	**NAME**	***POTENTIAL SUPPORT***			
		SB	**AB**	**AJ**	**SJ**
Individu dalam organisasi	▪ Bupati Banyumas ▪ Para kepala SKPD terkait ▪ Camat ▪ Lurah	ya ya ya ya			

Kelompok dalam organisasi	▪ CSR ▪ BAZ/LAZ	ya ya			
Individu dalam masyarakat	▪ Rujito ▪ Chen Fat Cam ▪ Rasmin ▪ Syarikun ▪ Bu Ning	ya ya ya - ya	 ya 		
Kelompok dalam masyarakat	▪ Musholla ▪ Tim Kerja Masyarakat (TKM)	 ya	ya -		
Lain-lain	-	-	-	-	-

SB : Sangat Bagus

AB : Agak Bagus

AJ : Agak Jelek

SJ : Sangat Jelek

Diagram4.1 : Tahapan Bekerja Bersama Masyarakat Kp. Sri Rahayu Kel. Karang Klesem, Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, 2016
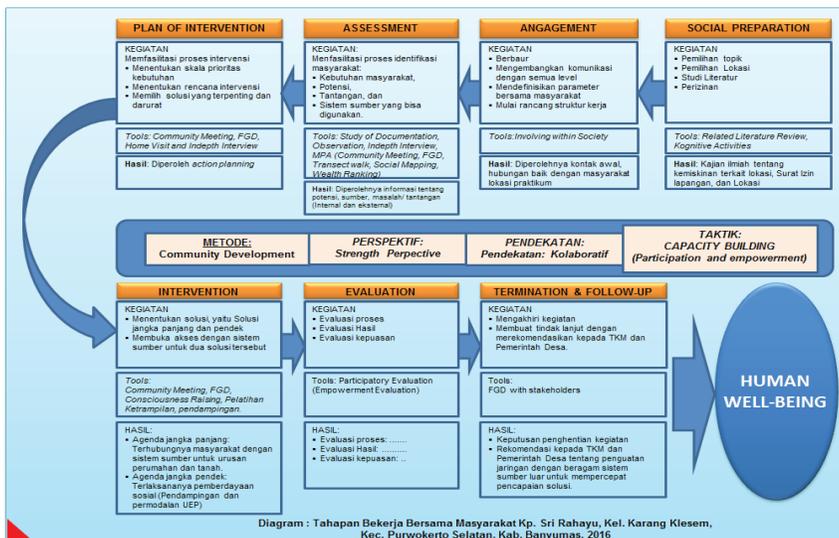
Diagram4.2 : Model Assessment Partisipatif di Kp. Sri Rahayu, Kel. Karang Klesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, 2016

D. REFLEKSI

1. Kesan dan perasaan Tim Assessment terhadap proses *assessment*

Tahapan *assessment* adalah tahapan yang paling krusial, paling sulit dalam seluruh tahapan pekerjaan sosial. Hal ini karena tahapan ini adalah proses memastikan potensi dan masalah, tantangan dan peluang bagi 100 warga Kp. Sri Rahayu dan meramunya dengan keinginan atau kebutuhan setiap orang tersebut. Kekeliruan pada hasil *assessment* akan berakibat pada kegagalan rencana intervensi dan intervensi yang berimbas pada rusaknya tatanan masyarakat dalam kondisi ekstremnya. Kami terinspirasi oleh ucapan Mary Richmond (1917:9) bahwa *social diagnosis* atau *social investigation* atau *thegathering of evidance* adalah upaya yang paling sulit dalam mempresentasikan bukti-bukti atau fakta sosial.

Mengandalkan satu teknik dalam menggali informasi untuk kemudian membuat *assessment* adalah kekeliruan. Ibaratnya untuk bisa melihat rumah, tidak boleh hanya dari sisi depan saja, namun harus dari depan, belakang, kanan, kiri, dan masuk ke dalam rumah, maka kita akan bisa menggambarkan dan menyimpulkannya. Oleh karena itu, kami menggunakan beragam teknik, tidak hanya rembug warga, tapi juga interview tidak terstruktur, wawancara mendalam dengan beragam tokoh dan anggota masyarakat. Apalagi, salah satu sifat orang Kp. Sri Rahayu, dan ini adalah sifat umum orang Indonesia,

adalah tidak banyak berbicara kalau ada dalam acara formal/dengan orang yang baru mereka kenal. Ketika pertama kali kami masuk di Kp. Sri Rahayu kami merasa ada protektif yang cukup tinggi terhadap lingkungan Kp.Sri Rahayu, dimana apapun gerak-gerik kami selalu menjadi bahan perhatian dan terdapat orang-orang yang secara spesifik memperhatikan dan berusah mendengar percakapan kami. Hal ini terlihati ketika kami melakukan observasi interaksi sosial dan keruangan di sore dan malam hari. Pengawasan terhadap tim seakan dilakukan secara bertahap dimana mereka melakukannya secara bergantian dengan cara yang cukup sistematis dengan bahasa kode yang agak sulit dipahami oleh orang awam. Namun demikian setelah kami malakukan kontak dengan tokoh dan aparat setempat, melakukan kontak dan *smalltalk* dengan beberapa warga kami tidak mengalami kesulitan dan mereka cukup *welcome* dengan kehadiran kami di Kp.Sri Rahayu.

Banyak ide dan *uneg-uneg* yang justru muncul ketika pembicaraan informal. Kami menggunakan rembug warga menjadi alat legitimasi atas apa yang sudah kami serap melalui *involving* dengan warga. ternyata, apa yang muncul pada acara rembug warga sama dengan apa yang kami serap, bahkan memperkuat kesimpulan kami. Setelah *community involving*, masyarakat kami rasakan ramah kepada kami. Kami tidak kesulitan untuk sekedar kenal dan melakukan*small talk.* Namun, ketika menyangkut masalah data kependudukan dalam rangka *gathering of information*, kami mengalami kesulitan. Kesulitan pertama karena urusan data adanya hanya di Ketua RT 05, sehingga Ketua RT tidak memberikan data kecuali jika ada perintah langsung dari Lurah. Kedua, data meskipun sudah terketik di komputer, namun masih mentah, Kami mendapatkan data dari format word, sehingga harus diubah ke dalam data yang bisa diakses lebih mudah, yaitu di aplikasi excel. oleh karena itu, menjadi tantangan sendiri bagi kami untuk memilah dan mengolah data, serta melakukan triangulasi data ke RT dan warga secara langsung.

2. Tantangan selama melaksanakan *assessment*

Assessment sosial merupakan rangkain kegiatan menggali dan memahami kondisi sosial suatu tempat. *Assement* sosial memiliki kesamaan dengan diagnosis dokter. Kesamaanya adalah sama-sama

untuk menyimpulkan penyebab dan jenis penyakit serta memberikan resepnya. Perbedaanya adalah *assessment* sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan adalah *assessment* partisipatif, sedangkan diagnosis dokter adalah *self-assessment* atau *assessment* mandiri. Maka, tantangan yang dihadapi *assessment* partisipatif lebih kompleks karena melibatkan masyarakatsecara aktif.

Tingkat pendidikan masyarakat Kp. Sri Rahayu mayoritasnya adalah SD, bahkan ada peserta yang tidak bisa menulis. Rendahnya tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan keterbatasan dalam memahami bahasa-bahasa pekerjan sosial. Oleh karena itu dalam kegiatan assessment ini, kami berusaha menggunakan bahas yang mudah dipahami oelh masyarakat. Kami berusaha menggunakan bahasa dan cara yang sangat sederhana sehingga masyarakat mampu menangkap hakikat persoalan yang sedang kita kupas bersama. Kami akhirnya menanyakan setiap kali dialog dengan warga untuk memastikan peserta benar-benar faham apa yang dimaksud sehingga dalam meng-*assess* masalah yang sedang dikupas. Ternyata berkomunikasi dengan masyarakat di *grasroot* itu tidak semudah yang dibayangkan, penggunaan bahasa yang mudah di fahami, *body language* yang kuat dan membaur dalam berpenampilan sehingga partisipasi masyarakat bisa terbangkitkan karena masyarakat tidak merasa berjarak dengan kami.

3. Peluang, kekuatan, dan solusi dalam proses *assessment*

Assessment secara kolektif melalui rembug warga, meski format acara dibuat sesantai mungkin dan serileks mungkin, namun peserta yang aktif berbicara selalu itu-itu saja. Mayoritasnya hanya *hear, see and agree* (mendengar, melihat, dan setuju). Sejumlah orang yang aktif itu adalah kami anggap sebagai *key persons* atau tokoh kunci di Kp. Sri Rahayu. Maka, setelah diadakan rembug warga, kami mengambil kesempatan untuk memastikan *assessment* dengan *home visit*. Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar pekerjaan sosial bahwa proses *assessment* adalah *on going process*. Oleh karena itu, selalu ada data baru dalam setiap sesi kegiatan.Tingkat kemudahan atau kesulitan *assessment* bergantung kepada seberapa kental *involving* kita. *Involving* atau berbaurnya tim *assessment* dengan masyarakat adalah penting,

sehingga kami benar-benar menyatu dengan masyarakat. Perasaan tidak ada jarak bagi masyarakat adalah modal bagi kami untuk bisa melaksanakan semua tahapan assessment. Tanpa *involving* yang memadai, maka kegiatan apapun yang akan dilaksanakan disana akan merusak tatanan masyarakat yang telah dsepakati disana.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang paling klasik muncul dan hingga kini masih *up to date* untuk selalu dikaji. Meski namanya kemiskinan, namun setiap zaman dan tempat ada karakteristik yang berbeda. Dan setiap zaman ada pula model dan pendekatan penanggulangannya yang berbeda pula. Hal ini karena permasalahan spesifik setiap masyarakat dan daerah itu berbeda.

Apabila kita menelisik pada kaca mata Sosiologi yaitu struktural-fungsional, kemiskinan muncul sebagai wujud disfungsi struktur. Permasalahan kemiskinan di Kp. Sri Rahayu, Kel. Karang Klesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh adanya disfungsi struktur di masyarakat. Struktur sosial yang ada, dari *Goal-attainment, Adaptation, Integration*, dan *Latency*, kesemuanya bekerja namun mengalami disfungsi sehingga memunculkan potret kemiskinan perkotaan seperti di Kp. Sri Rahayu ini.

Aspek *Goal-attainment* yang berperan meletakkan tujuan-tujuan mulia berdirinya masyarakat, dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kab. Banyumas, telah menjalankan fungsi secara benar, yaitu perencanaan pembangunan yang mengikuti RPJM dan RPJP.

Aspek Adaptation, dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Karang Klesem yang berperan mengadaptasikan tujuan-tujuan pembangunan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Kel. Karangklesem, khususnya Kp. Sri Rahayu belum mencerminkan fungsi yang optimal. Hal ini terbukti dengan adanya kampung yang berdiri lebih dari 40 tahun lengkap dengan organisasi RT dan RW namun berdiri di atas lahan perorangan. Dari hal ini memunculkan banyak masalah sosial. Aspek Integration yang diperankan oleh para tokoh kampung, dianggap belum melaksanakan fungsi yang optimal. Hal ini terbukti dari masing-masing tokoh merasa punya kepentingan sendiri-sendiri. Aspek Latency yang diperankan oleh masyarakat umum, yaitu peran menjaga keberlangsungan peradaban. Peran ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan setiap warga berusaha mempertahankan kehidupannya masing-masing dengan apa yang bisa mereka lakukan, tanpa menunggu adanya campur tangan kebijakan/pembangunan.

Melakukan assessment terhadap masyarakat yang "sakit" tidak mudah, apalagi masyarakat tidak menyadari dirinya sakit dan terkesan menikmatinya. Maka, proses assessment yang tepat, agar bisa secara benar memotret masalah dan kendala, tantangan dan peluang, masyarakat harus terlebih dahulu disadarkan. Aktivitas *consciousness raising* (menggugah kesadaran) inilah yang selalu kami lakukan sebelum akhirnya membuat assessment bersama warga Kp. Sri Rahayu.

Ada dua besaran kebutuhan warga (informan), yaitu jangka panjang dan jangka menengah. Kebutuhan jangka panjang adalah kebutuhan akan perumahan beserta tanah/lahan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan seluruh warga yang kami temui. Yang kedua adalah kebutuhan jangka menengah, seperti kebutuhan akan modal usaha, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, pendidikan bagi anak putus sekolah, dan kebutuhan pendampingan biopsikhososialspiritual. Hasil kegiatan assesment ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan pelayanan atau perencanaan intervensi terhadap masyarakat Kp.Sri Rahayu yang yang goalnya adalah implementasi kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan supervisi kegiatan.

B. REKOMENDASI

Ada sejumlah rekomendasi yang bisa kami kemukakan di sini, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kab. Banyumas untuk membuat program yang intergatif, melibatkan SKPD Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata ruang terkait untuk membuat kegiatan pengadaan rumah beserta tanah murah bagi warga Kp. Sri Rahayu.
2. Satpol PP Kab. Banyumas diharapkan mampu melakukan penertiban lingkungan kota dengan tidak memberi peluang munculnya kawasan liar sehingga tidak memunculkan masalah sosial yang lebih kompleks.
3. Dinsosnakertrans, Dinkop UMKM, Bapermas PKB, Peksos, Tokoh Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra, Tim TKPKD) untuk membuat program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, di dalamnya terdapat (UEP, Rumah Singgah, pelatihan keterampilan, pendampingan penguatan mental spiritual)
4. Dunia usaha diharapkan ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Kp. Sri Rahayu dengan mengalokasikan dana CSR ke dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Pihak Kelurahan Karang Klesem dan para tokoh masyarakat Kp. Sri Rahayu diharapkan menjadi garda terdepan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara lebih bermartabat melalui advokasi program peningkatan kesejahteraan sosial

***

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Sjafari, 2014. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Graha Ilmu

Al-Ghaziy, Syamsuddin. 2005. *Fath-hul Qarib*. Cetakan pertama. Beirut, Libanon: Daar Ibn Hazm.

Al-Hishniy, Taqiyuddin Abu Bakr Al-Hushainiy. 2001. *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar.* Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Al-Jarullah, Abdullah. 1992. *Masharif Al-Zakah fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cetakan pertama. Riyadh, KSA: Maktabah Al-Ma'arif.

Al-Sa'diy, Abdurrahman. 2002. *Al-Qawa'id Al-Hissan fii Tafsir Al-Qur'an*. Cetakan pertama. Cairo, Mesir: Maktabah Al-Sunnah.

Azariadis, Costas and John Stachurski. 2005. *Poverty Traps* in Handbook of Economic Growth.

Baldock, John, et.al. (editors). 2007. *Social Policy*. 3th ed. New York., USA: Oxford University Press.

Barret, Christopher B. 2005. *the Social Economics of Poverty: on Identities, Comunities, Groups, and Networks*. 1st Published. New York, USA: Roudledge.

Coombs, Philip H. and Manzoor Ahmed. 1980. *Attacking Rural Poverty: How nonformal Education Can Help*, a World Bank Research Publication, 3rd Printing. Baltimore, USA: the John Hopkins Univ. Press.

Coundouel, A. et.al. 2006. *Poverty and Social Impact Analysis of Reforms: Lessons and Examples from Implementation*. Washington DC., USA: World Bank.

Danziger, Sheldon H. and Robert H. Haveman (Ed.). 2001. *Understanding Poverty*. New York, USA: Russel Sage Foundation.

Dasgupta, P. and Ismail Sirajudin. 1999. *Social Capital: A Multifaceted Perpective*, 1st Ed., Washington DC., USA: the World Bank,

Dziedzic, Nancy. 2007. *World Poverty*. MI, USA: Thomson Gale.

Durkheim, Emile. 1957. *Professional Ethics and Civil Morals*. 1st published

in English version in 1957, and edited in 1992 and 2003. New York, USA: Routledge.

______________ 1982. *The Rules of Sociological Method.* 1st American Edition, translated by W.D. Halls. New York, USA: the Freepress.

Edi Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia.* Cet. I, Bandung: Alfabeta.

___________ 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan ke empat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Field, John. 2008.*Social Capital*, 2nd Ed., Canada, USA: Routledge.

Fukuyama, Francis. 1996. الثقة: دورالثقافةوالفضائلالاجتماعيةفيتحقيقالازدهارالاقتصادي (*Trust: the Social Vertues and the Creation of Prosperity*), Jurnal Ilmiah Dunia Arab, *Khulashat*, Cairo, Mesir, Ed. IV, Februari 1996, www.edara.com

Fukuyama,Francis. 2000. *Social Capital and Civil Society*, IMF Working Paper, WP/00/74, April 2000.

Handler, Joel F. and Yeheskel Hasenfeld. 2007. *Blame Welfare: Ignore Poverty and Inequality.* New York, USA: Cambridge University Press.

Häuberer,Julia. 2011. *Social Capital Theory: Towards a Metodological Foudation*, 1st Ed., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Germany.

Houghton, J. and Shahidur R. Kandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality.* Washington DC., USA: World Bank.

Hout, Wil. 2007. EU *Development Policy and Poverty Reduction: Enhancing Effectiveness*. Burlington, USA: Ashgate.

Ife, Jim. 2002.*Community Development: Community-based alternatives in an age of globalization*, 2nd Ed. NSW, Australia: Longman Pearson Education.

______.2008. *Human Right and Social Work: Toward Right-Based Practice*". New York, USA: Cambridge Univercity Press.

______ 2009. *Human Rights from Below: Achieving rights through community development.* 1st Ed. Melbourne, Australia: Cambridge Univ. Press.

Kirst-Ashman, K.K., and G.H. Hull Jr. 2009. *Generalist practice with Organizations and Communities.* 4th Ed. Belmont, CA., USA: Brook/Cole.

Kohl, Richard (Ed). 2003. *Globalisation, Poverty and Inequality*. Paris, France: OECD The Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Kumar,Krishna. 1987.*Conducting Group Interviews in Developing Countries*, Agency for International Development (AID), USA.

Landes, David S. 1998. the Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor. New York, USA: WW. Norton and Company.

Lewis, Oscar. 1966. *The Culture of Poverty*. Diunduh dari www. ignaciodarnaude.com/, 15 Januari 2015.

Lin, Nan. 2001. *a Theory of Social Structure and Action*, Melbourne, Australia: Cambridge University Press.

_______. 2008.*A Network theory of Social Capital*, dalam *Handbook of Social Capital*, Dario Castiglione et.al. (editors), 1st Published, New York, USA: Oxford University Press.

Mayoux, Dr. Linda, Participatory Methods; downloaded at Desember 1st 2014.

Mehrotra, Santosh and Enrique Delamonica. 2007. *Eliminating Human Poverty: Macro ekonomi dan social policies for Equitable Growth*, 1st Ed. New York, USA: CROP Int'l Studies in Poverty Research.

Mingione, Enzo. 1996. Urban Poverty and the Underclass. 1st published, Cambridge, Massachusetts, USA: Blackwell Publishers Inc.

Mukherjee, N., et.al. 2000. *Methodology for Participatory Assessments: with Communities, Institutions, and Policy Makers*, Metguide, IRC.

Narayan, D. and P. Patesch (Ed). 2007. *Moving out of Poverty: Cross-Diciplinary Perspectives on Mobility*. Washington DC., USA: Palgrave MacMillan and World Bank.

Netting, F. E., Kettner, P.M., McMurtry, S.L.2004.*Macro Practice Social Work*, 3rd Ed., USA: Pearson Education.

O'Connor, Ian, et.al. 2006.*Social Work and Social Care Practice*, Australia: Sage Publication.

Ostrom, E. and Ahn, T.K., (eds)., 2003. Critical Writings in Economic Institutions: Foundations of Social Capital (Cheltenham, UK: Edward Elgar).

Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New Ed. 1st Published 1991. London, England: Roudledge.

_____________. 1982. *Talcott Parsons on Institution and Social Evolution*. Chicago, USA: The University of Chicago Press.

Phillips, R. and Pittman, R.H.2009. *An Introduction to Community Development*, Roudledge, 1st Ed., Canada, USA: Routledge.

Putnam, Robert. 2002.*Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*, New York, USA: Oxford University Press.

Rakodi, Carole and Tony Lloyd-Jones (ed), 2002. Urban Livelihoods: A People-centred Approach to Reducing Poverty. USA: Earthscan Publications Ltd

Richmond, Mary. 1917. *Social Diagnosis.* Philadeplhia, USA: Russel Sage Foundation.

Rustanto, Bambang. 2014. *Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*. Cet. I. Bandung: STKS *Press.*

Sach, Jefferey D. 2005. *The End of Poverty: Economic Posibilities for Our Time.* 1st Ed. New York, USA: Penguin Press.

Sajogyo dan Pujiwati (Editor). 1992. *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan.* Cet. ke sepuluh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press-UGM.

Shower, Karen M and Catherine N. Dulmus. 2008. *Comprehensive Handbook of Social Work and Social Welfare: Social Policy and Policy Practice*. Volume 4. New Jersey, Canada: John Wiley and Sons. Inc.

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Walker, Robert (Ed.). 1999. *Ending Child Poverty: Popular welfare for the 21st century*. Great Britain: the Policy Press.

Wang, Ya Ping 2004, Urban Poverty, Housing and Social Change in China, NY, USA: Routledge.

Weiss, John (Editor). 2005. *Poverty Targeting in Asia*. Cheltenham, UK., and Massachussets, USA: Asian Development Bank Institute and Edward Elgar Publishing.

Zastrow, Ch. and Karen K. Kirst-Ashman. 2007. *Understanding of Human Behavior and the Social Environment*, 7th Ed. Belmont, CA., USA: Thomson/Brook-Cole.

Zastrow, Ch. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering people.* 10th Ed. Belmont, USA: Brook/Cole.

Rujukan lain

Kementerian Sosial. 2012. *Kementerian Sosial Dalam Angka Tahun 2012*. Jakarta.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83.

Data kependudukan RT 04 dan RT 05.

Rujukan Elektronik

http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1369; diunduh pada Oktober 2016.

https://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10; diunduh pada Oktober 2016.

Ensiklopedia Internasional, Merriam Webster, *Poverty*, dalam . 18 Desember 2013.